



**PENGARUH POLA PERTUMBUHAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TERHADAP PERENCANAAN LINGKUNGAN
DI KAWASAN SIMPANG LIMA, SEMARANG**

T e s i s

**Diajukan guna memperoleh
derajat Sarjana Strata 2 (S2)**

**Disusun oleh :
Laily Widyaningtyas
L4K0020012**

**MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
TAHUN 2004**

KATA PENGANTAR

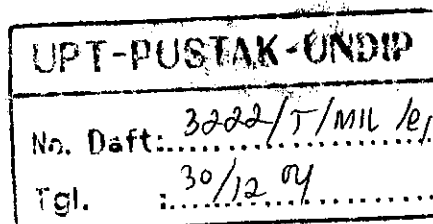
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penyusun selama persiapan sampai selesainya pembuatan tesis dengan judul :

PENGARUH POLA PERTUMBUHAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP PERENCANAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN SIMPANG LIMA, SEMARANG.

Penyusun menyusun tesis ini karena sebagai warga kota Semarang ingin kawasan Simpang Lima menjadi kawasan yang indah, dengan segala problematikanya, untuk itu diperlukan sebuah perencanaan lingkungan dan perilaku ramah lingkungan bagi peggungannya, terutama Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warga kota Semarang sebagai peggungannya.

Tesis ini dapat tersusun berkat bantuan, bimbingan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penyusun. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Sudharto P Hadi, MES, Dra. Hartuti Purnaweni, MPA, Ir. Wahyu Krisna Hidayat, MT, Ir. Parfi Khadiyanto, MT selaku pembimbing dan penguji yang telah memberikan bimbingan, saran, perbaikan , kritik dan semangat dalam penyusunan tesis ini ;



2. Bp. H.Sukawi Sutarip, SH, SE (Walikota Semarang) , Bp. Drs. Saman Kadarisman (Sekretaris Daerah Kota Semarang), dan Bp. Bimbong Yogatama, SH (Camat Gayamsari) yang telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro ini;
3. Ibu Hj. Churijah Gundiharti, ibuku tercinta dan Hartanto, suamiku tercinta, atas dorongan, semangat dan toleransinya sehingga tesis ini dapat selesai;
4. Anakku tercinta, Atika dan Icha yang merelakan dan mengijinkan ibunya beraktivitas lebih saat pembuatan tesis ini ;
5. Segenap Teman, Staf MIL yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini.

Penyusun berharap tesis ini akan dapat bermanfaat bagi pembaca dan Pemerintah Kota Semarang dalam perencanaan lingkungan kawasan Simpang Lima, Semarang. Kritik dan saran terhadap hasil penelitian ini sangat terbuka guna perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.

Semarang, 9 Juni 2004

Penyusun.

Judul Tesis : PENGARUH POLA PERTUMBUHAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TERHADAP PERENCANAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN SIMPANG LIMA, SEMARANG.

Nama Mahasiswa : LAILY WIDYANINGTYAS

Nomor Mahasiswa : L4K0020012

Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan

Konsentrasi : Perencanaan Lingkungan


Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal : 15 Juni 2004.

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui,


Pembimbing I


Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

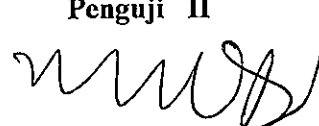
Pembimbing II


Ir. Wahyu Krishna Hidayat, MT

Penguji I


Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

Penguji II


Ir. Parfi Khadiyanto, MT



Panitia Ujian Akhrit Program

Magister Ilmu Lingkungan


Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES.

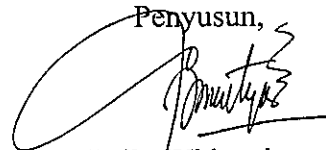
NIP. 130 810 134

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Juni 2004

Penyusun,



Laily Widyaningtyas

Karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk :

- ✦ Yang sangat aku cintai, kedua orang tuaku yang senantiasa memberi motivasi, dukungan, doa restu dalam studi.
- ✦ Yang terkasih suamiku, Hartanto, terima kasih atas segala kesabaran dukungan dan pengorbanannya
- ✦ Hartaku yang paling berharga, putriku Atika dan Icha yang telah memberikan toleransi serta semangat untuk segera menyelesaikan studi ini.
- ✦ Alamaterku ...

RIWAYAT HIDUP



Laily Widyaningtyas lahir di Semarang, pada tanggal 3 Oktober 1968, putra ketiga dari pasangan Jodhi . . Soewito, BA dan Dra. Hj. Churijah Gundiharti. . Menyelesaikan studi Sekolah Dasar di Semarang Tahun 1981, Sekolah Menengah Pertama negeri 2 di Semarang tahun 1984, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 tahun 1987.

Pada tahun 1987 diterima di FISIP Universitas Diponegoro, dan meraih Sarjana Sosial pada tahun 1993.

Pada tahun 1990 diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang. Pada tahun 1992 menikah dengan Hartanto dan dikaruniai dua orang puteri yaitu Atikah Rizky Kusumaningtyas (10 tahun) dan Iedha Rizka Puspitaningtyas (5 tahun).

ABSTRAKSI

Kota sebagai satu pusat pemerintahan, pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, kiranya merupakan daya tarik penduduk untuk bermigrasi. PKL ini senantiasa tumbuh subur memilih lokasi untuk berdagang dengan memanfaatkan lahan kota yang potensial untuk sirkulasi kegiatan penduduk kota dan mudah dijangkau oleh publik. Kawasan Simpang Lima sebagai obyek penelitian juga menghadapi permasalahan oleh sektor ini.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pertumbuhan PKL dan dampak yang terjadi karena adanya kegiatan tersebut dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi PKL di kawasan ini. Adapun sasaran yang diinginkan adalah mengusulkan beberapa alternatif usulan penataan PKL di Kawasan Simpang Lima yang berbasis pada pemahaman lingkungan PKL maupun pengguna lainnya, serta mengusulkan beberapa alternatif Perencanaan Lingkungan dengan perencanaan partisipatif dan 7 tahapan perencanaan mengikut sertakan PKL, Masyarakat selaku konsumen dan Pemerintah Kota Semarang selaku pengambil keputusan.

Populasi penelitian ini adalah para PKL di Kawasan Simpang Lima dan masyarakat (konsumen) yang melakukan transaksi dengan PKL di Kawasan Simpang Lima. Sedangkan untuk memperkaya pemahaman terhadap PKL, dilakukan wawancara mendalam dengan pejabat5 yang bertanggung jawab langsung pada masalah PKL. Di samping itu data-data sekunder dihimpun dari instalasi terkait. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survai *explanatory* dengan pendekatan analisa *kualitatif*.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah PKL di Kawasan Simpang Lima Semarang terdapat dua pola pertumbuhan PKL yaitu PKL dengan pola pertumbuhan linier dan pola pertumbuhan aglomerasi. Karakteristik PKL umumnya berpendidikan rendah, sedikit yang berpendidikan SLTA ke atas dalam usia kerja produktif. Umumnya mereka sebagai pendatang yang telah tinggal di Kota Semarang lebih dari 5 tahun.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota dalam upaya pembinaan dan penataan PKL melalui instrumen hukum telah membuktikan penanganan dan antisipasi. Hal ini terlihat dari beberapa peraturan yang secara normatif dirumuskan bagaimana prosedur dan kewajiban-kewajiabn yang harus dilakukan baik oleh Pemerintah Kota maupun oleh para PKL.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya perencanaan Lingkungan Kawasan Simpang Lima dengan mengajak dan mengikut sertakan PKL dan konsumen menentukan penataan yang bagaimana yang diinginkan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dengan tahapan yang sesuai yaitu tujuh langkah perencanaan (*The seven steps of planning*). Pada rekomendasi penelitian ini Pemerintah hendaknya membuat dan menentukan Perencanaan Lingkungan dalam bentuk RTBL atau *Urban Environmental Planning Guide Lines* (Panduan Perencanaan Lingkungan Kota) lebih *komprehensif* dan *holistic*.

Kata kunci :

- Pola pertumbuhan pedagang kaki lima.
- Ada dampak dari kegiatan tersebut.
- Kebijakan Pemerintah Kota Semarang.
- Bentuk perencanaan lingkungan.

ABSTRACT

A city as the center of administration, education, industries, trades and services, becomes a power of attraction for people to immigrate. Sidewalk traders (Pedagang Kaki Lima/PKL) choose the location to trade by taking advantage on the city area that is potential for the circulation of city people activities and easy to be reached by the public. The site of Simpang Lima as the object of this research also faces such a problem.

The main goal of this research was to know the pattern of sidewalk traders growth and the impact of their activities and also the policies made by the government of Semarang City in handling the problem of those traders in this site. The target was to propose some alternatives in arranging the traders which was based on the understanding of sidewalk trader environment and other users, and to propose some alternatives in making the environmental planning using participatory planning and the seven steps of planning by involving the traders, the public as the consumers, and the Government of Semarang City as the policy maker.

The population of this research was the sidewalk traders in the site of Simpang Lima and the customers who make the transaction with them. Meanwhile, to enrich the appreciation on the sidewalk traders, an in-depth interview was carried out with the official who has the responsibility on this. Besides, the secondary data were collected from the related authority. The research was done by using explanatory method to survey and qualitative approach to analyze.

The result was that in the site of Simpang Lima, there were two patterns of sidewalk trader's growth linear concentration growth and agglomeration growth. The characteristic of the traders was uneducated people. Just few of them who has graduated from senior high school in productive age. Most of them were outsiders who have lived in Semarang more than 5 years.

The result of the analysis showed that the role of city government in guiding and arranging those traders through judicial instruments has proved the handling and the anticipation. It was seen from the rules which were normatively formulated how the procedures and obligations that have to be done by both the government and the traders.

Based the conclusion of this research, the recommendation which can be proposed was that it is important to make an environmental planning in Simpang Lima site by involving the traders and the consumers to make the desired system based on city government policy with the appropriate steps namely the seven steps of planning. In this recommendation, the government should make and determine the environmental planning in RTBL form or Urban Environmental Planning Guide Lines which is more comprehensive and holistic.

Key word :

- The pattern of sidewalk traders growth.
- The impact of activities.
- The Government of Semarang City policies.
- Need the environmental planning.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar isi	iii
Daftar tabel	iv
Daftar gambar.....	v
Abstraksi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Sektor Informal	10
2.2. Pedagang Kaki Lima	11
2.3. Ruang Terbuka Kota	15
2.4. Kualitas Lingkungan	18
2.5. Perencanaan lingkungan.....	21
BAB III :	
3.1. Lokasi dan waktu penelitian	26
3.2. Metode Penelitian	28
3.3. Sumber data dan tehnik pengumpulan data.....	29
3.4. Sampling dan Teknik Pengambilan Sampling.....	30
3.5. Tehnik pengolahan data	33
3.6. Tehnik analisa data	33
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran umum lokasi penelitian	35
4.2. Gambaran kawasan Simpang Lima	38
4.3. Karakteristik umum PKL.....	43
4.4. Analisis Pola pertumbuhan PKL.....	45
4.5. Analisis dampak yang ditimbulkan karena adanya PKL	50
4.6. Persepsi konsumen tentang keberadaan PKL Di kawasan Simpang Lima	73
4.7. Kajian rencana kota terhadap PKL.....	77
4.8. Analisis pengaruh pola pertumbuhan dan	

	penanganan dampak dengan perencanaan lingkungan.....	92
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	97
	5.1. Kesimpulan	97
	5.2. Rekomendasi.....	103
	5.3. Usulan-usulan Penataan PKL Dalam Perencanaan Lingkungan di Kawasan Simpang Lima.....	106
	DAFTAR PUSTAKA	107
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Area Kawasan Simpang Lima.....	4
Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	6
Gambar 3 Peta Batasan Lokasi Penelitian.....	11
Gambar 4 Kawasan Simpang Lima dan Salah Satu Sudut Simpang Lima yang Dipergunakan untuk Kegiatan PKL	28
Gambar 5 Keadaan Fisik Kawasan Simpang Lima	40
Gambar 6 Peta dan Akses Jalan di Kawasan Simpang Lima.....	41
Gambar 7 Simpang Lima di Malam Hari	42
Gambar 8 Kawasan Simpang Lima sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota pada Era Tahun 1990-an	43
Gambar 9 Kawasan Simpang Lima Kondisi Sekarang	44
Gambar 10 Peta Lokasi PKL di Kawasan Simpang Lima	47
Gambar 11 Model penanganan Perencanaan Lingkungan Kawasan Simpang Lima	108

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang.....	38
Tabel 4.1	Proporsi Responden Menurut Tingkat Pendidikan PKL di Kawasan Simpang Lima	45
Tabel 4.2	Kedekatan Lokasi Jualan PKL dengan Pusat Kegiatan/Keramaian Kota PKL Kawasan Simpang Lima	49
Tabel 4.3	Kemudahan Memperoleh Angkutan Umum di Sekitar Lokasi Jualan PKL Kawasan Simpang Lima	50
Tabel 4.4	Daerah Asal PKL Kawasan Simpang Lima	53
Tabel 4.5	Alasan Memilih Kota Semarang sebagai Tujuan PKL Kawasan Simpang Lima	54
Tabel 4.7	Alasan Menjadi PKL Kawasan Simpang Lima	56
Tabel 4.8	Jenis Pelayanan PKL Kawasan Simpang Lima	57
Tabel 4.9	PKL Berdasarkan Jenis Tempat Usaha di Kawasan Simpang Lima	58
Tabel 4.10	PKL Berdasarkan Kepemilikan Tempat Usaha di Kawasan Simpang Lima	59
Tabel 4.11	PKL Berdasarkan Jenis Usaha di Kawasan Simpang Lima	60
Tabel 4.12	Besar Modal PKL di Kawasan Simpang Lima.....	61
Tabel 4.13	PKL yang Membayar Restribusi di Kawasan Simpang Lima	63
Tabel 4.14	Target dan realisasi Restribusi PKL di Kota Semarang.....	63

Tabel 4.15	Cara PKL Mendapatkan Air Bersih di Kawasan Simpang Lima.....	68
Tabel 4.16	Penanganan Sampah PKL di Kawasan Simpang Lima	69
Tabel 4.17	Persepsi PKL tentang Keindahan Lingkungan Tempat Usaha di Kawasan Simpang Lima	71
Tabel 4.18	Persepsi PKL tentang Cara Memelihara Lingkungan Tempat Usaha di Kawasan Simpang Lima	72
Tabel 4.19	Ukuran Ruang Sarana Usaha di Kawasan Simpang Lima	73
Tabel 4.20	Persepsi PKL di Kawasan Simpang Lima terhadap Kebijakan Pemerintah	78
Tabel 5.1.	Usulan Perencanaan lingkungan secara fisik di Kawasan Simpang Lima	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi yang saat ini melanda negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan Kawasan Asia Tenggara khususnya, telah menyebabkan terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Krisis yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut dan terpaksa harus gulung tikar. Akibatnya, mereka terpaksa melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Sehingga peluang kerja di perusahaan-perusahaan, termasuk di pabrik-pabrik, perkantoran dan lainnya tersebut kecil. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang kemudian terjun untuk bekerja di sektor informal, dengan menjadi pedagang kaki lima. Bukti yang dapat kita saksikan secara langsung dari kondisi tersebut saat ini, khususnya di pusat Kota Semarang adalah meningkatnya jumlah pedagang kaki lima baru yang banyak menempati trotoar-trotoar jalan-jalan utama dan beberapa ruang terbuka umum (*public space*). Banyak PKL memulai berdagang dengan menggunakan uang pesangon dari PHK mereka. Para pedagang kaki lima tersebut menjual berbagai macam dagangan atau jasa sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik berupa makanan, mainan anak, pakaian, sepatu, hingga menyemir sepatu. Usaha kaki lima itu sendiri sebenarnya tumbuh sebagai salah satu pemecahan terhadap permasalahan kelangkaan kesempatan kerja yang terjadi di banyak kota besar di dunia, khususnya pada kota-kota di negara berkembang. Para urbanis yang datang ke kota dengan

tidak memiliki bekal keahlian tertentu dan tidak mampu bersaing untuk merebut pekerjaan di sektor formal, banyak yang kemudian memanfaatkan usaha berdagang kaki lima sebagai jalan keluar untuk dapat bertahan hidup di kota. Pengertian pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri adalah usaha informal yang dilakukan tanpa menggunakan lokasi yang menetap dan biasanya dilakukan dengan manajemen yang sederhana dan modal yang kecil.

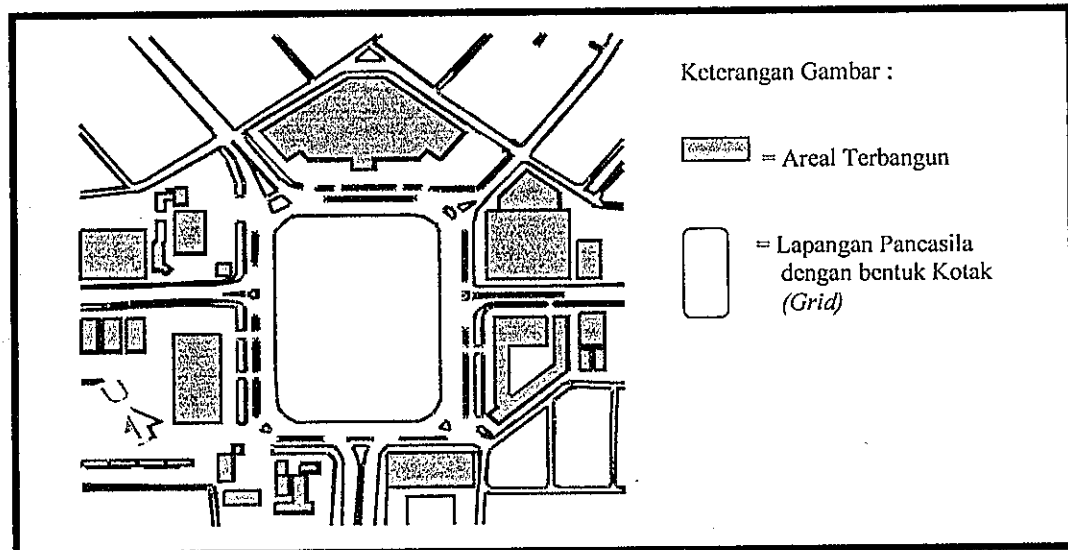
Pertumbuhan usaha sektor informal yang berupa PKL memang merupakan salah satu bentuk *elastisitas* masyarakat untuk tetap bertahan hidup. Tetapi, jika perkembangan mereka tidak direncanakan atau tidak ditempatkan pada lokasi yang tepat, akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu ketidakteraturan wajah kota. Sesuai dengan hukum ekonomi, para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan keramaian konsumen. Tetapi, karena alasan itu pulalah, mereka sering tidak mempertimbangkan faktor perencanaan kota. Mereka cenderung menempati lokasi-lokasi yang tidak sesuai bagi mereka, misalnya di trotoar atau di badan jalan yang tidak diperuntukkan bagi mereka, sehingga hal ini biasanya mengganggu arus lalu lintas. Demikian juga PKL yang menempati taman-taman kota akan menyebabkan wajah kota menjadi kumuh.

Penempatan lokasi yang tidak terarah tersebut akhir-akhir ini mulai terjadi di di Pusat Kota Semarang, yaitu di Kawasan Simpang Lima. Pertumbuhan PKL di Kawasan Simpanglima terpusat di sekitar Lapangan Pancasila yang kemudian tumbuh ke kawasan sekitarnya. Dengan adanya kecenderungan perkembangan ini, maka wajah kawasan tersebut mulai berubah. Jika dibiarkan, perkembangan tersebut dikhawatirkan akan merusak wajah Kawasan Kota pada umumnya dan Kawasan Simpang Lima khususnya.

Dari kegiatan PKL tersebut dilihat dari pandangan lingkungan, keadaan kawasan Simpang Lima lebih luas akan menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu :

1. Terkonsentrasinya kegiatan perdagangan, jasa , hiburan dan pendidikan.
2. Tidak lancarnya arus lalu lintas ,
3. Menurunnya kualitas lingkungan.
4. Menurunnya kualitas estetika kawasan
5. Menimbulkan polusi sampah
6. Menimbulkan polusi udara dan suara
7. Menempati ruang-ruang publik dan privat yang tidak tepat
8. Dipergunakannya trotoir (lokasi untuk pejalan kaki dan masyarakat umum) menjadi tempat beraktifitas para PKL dan tukang parkir liar .

Dalam fungsinya Kawasan Simpang Lima merupakan suatu tempat terbuka dan tempat berinteraksinya warga kota Semarang, berpola *Grid* (kotak) dengan dibatasi oleh trotoar yang mengelilinginya sebagai pengaman dan jalur pedestrian. Sebagaimana gambar 1 di bawah ini .



Gambar 1
Gambar Area Kawasan Simpang Lima

Oleh karena dampak negatif yang timbul belum diakomodasikan melalui perencanaan yang matang, maka penempatan kios-kios para pedagang sektor informal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Para PKL tersebut menempati ruang-ruang milik umum (*public space*) dan ruang milik pribadi (*private space*) untuk menempatkan kios-kios mereka, termasuk ruang-ruang di tepi jalan yang seharusnya untuk parkir kendaraan. Di samping itu, penampilan kios-kios PKL juga telah menurunkan kualitas penampilan fisik kawasan. Penampilan kios-kios yang cenderung kumuh, dengan kondisi yang biasanya relatif amat sederhana dengan bahan material bangunan yang seadanya, atau dengan menggunakan dinding-dinding bangunan sebagai tempat menyandarkan kios, maka kios-kios tersebut telah mengganggu keindahan dan keunikan penampilan kawasan secara menyeluruh.

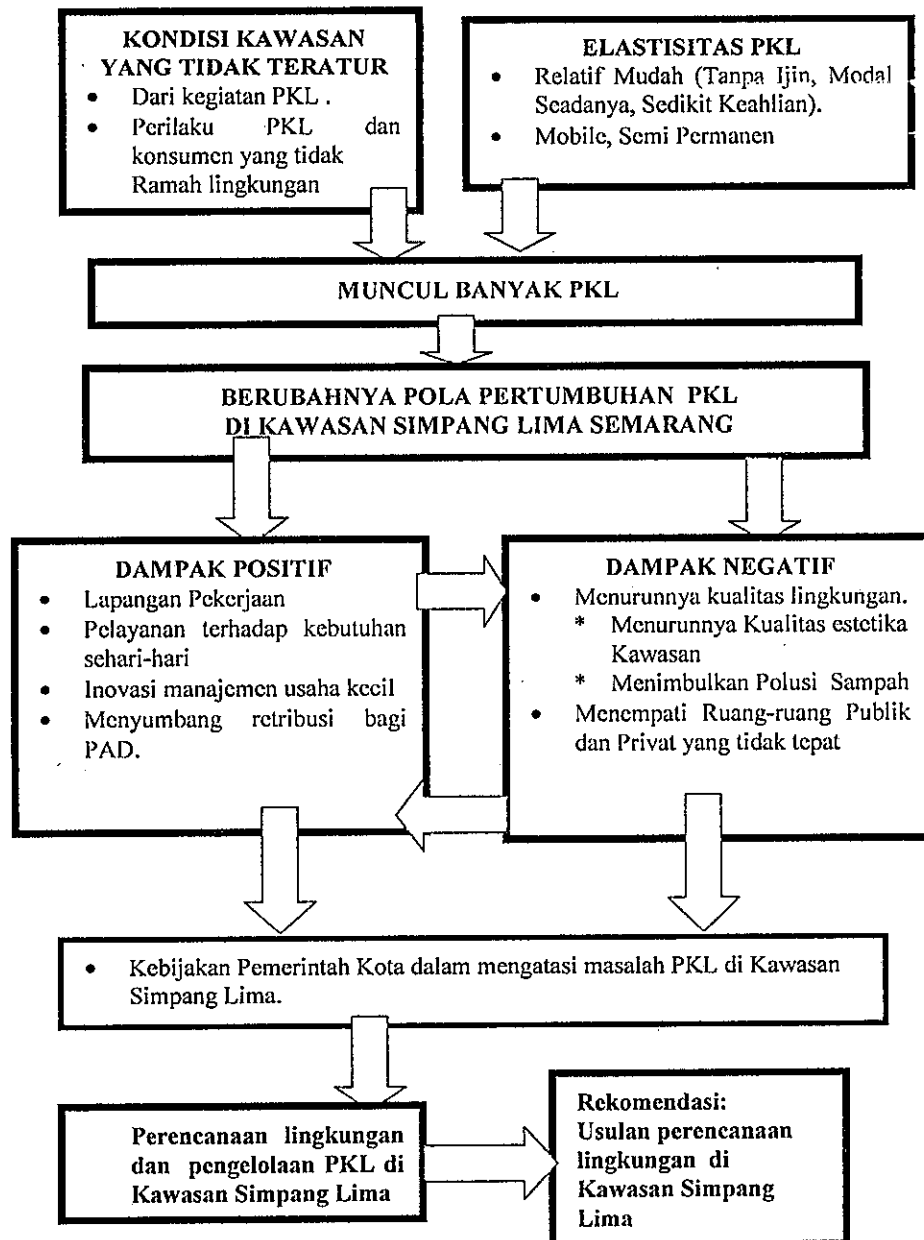
Permasalahan lainnya adalah kurangnya dukungan jaringan utilitas terhadap kegiatan PKL, seperti jaringan air bersih, pembuangan sampah, listrik, taman kota,

pulau jalan dan penanganan parkir. Kurangnya dukungan jaringan air bersih dan penanganan sampah menyebabkan timbulnya kesan kotor pada kios-kios mereka, karena kurangnya sarana untuk memelihara kebersihan sekitar kios PKL. Dengan kurangnya tempat pembuangan sampah yang *representative* membuat para pedagang tersebut cenderung membuang sampah di sembarang tempat, bahkan juga pada saluran-saluran drainase yang terdapat di sekitar lokasi para PKL tersebut.

Dengan mempertimbangkan bahwa pengembangan PKL yang tepat akan dapat menyerap banyak tenaga kerja pada saat krisis ekonomi ini, maka sudah seharusnya Pemerintah Kota Semarang memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan mereka dan memberikan mereka fasilitas yang memadai. Dengan demikian, diharapkan pengembangan sektor informal akan menjadi salah satu katub pengaman bagi golongan masyarakat marginal untuk dapat tumbuh dan berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan, rencana strategis dan rencana-rencana praktis yang telah diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka untuk mengatasi pertumbuhan PKL yang amat pesat. Kerangka Pikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 2.
Kerangka Pemikiran Penelitian



1.2. PERMASALAHAN

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia telah menyebabkan semakin sempitnya lapangan kerja formal, sementara itu angka jumlah pengangguran meningkat dengan tajam. Hal ini menyebabkan banyak

masyarakat yang kemudian mengembangkan usaha pada sektor informal, khususnya menjadi PKL di kota-kota besar termasuk di Kota Semarang, khususnya di kawasan-Simpang Lima. Maraknya pertumbuhan PKL ini ternyata menimbulkan permasalahan baru, khususnya permasalahan rusaknya wajah kawasan dan terganggunya kegiatan-kegiatan di dalam kawasan tersebut.

Permasalahan yang serius di Kawasan Simpang Lima, adalah karena keberadaan PKL dianggap sebagai penyebab terjadinya kesemrawutan wajah kota. Bentuk fisik mereka yang biasanya beragam, bahkan terkadang berupa kios-kios kecil yang dibentuk seadanya sering dianggap merusak wajah fisik lingkungan di Kawasan Simpang Lima . Rencana pembangunan lingkungan yang sudah tertata dan terpadu dapat saja menjadi tidak berhasil diimplementasikan karena keberadaan dan pertumbuhan mereka. Pola pertumbuhan dan dampak yang terjadi akan sangat mempengaruhi jenis perencanaan lingkungan yang akan ditetapkan di Kawasan Simpang Lima.

Dari uraian di atas maka dalam penelitian ini akan dibahas pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana pola pertumbuhan PKL di kawasan Simpang Lima ?
- b. Bagaimana dampak kegiatan PKL di kawasan Simpang Lima ?
- c. Bagaimana kebijakan PKL dilakukan Pemerintah Kota Semarang di kawasan Simpang Lima ?
- d. Bagaimana perencanaan lingkungan seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka perencanaan Kawasan Simpang Lima ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pola pertumbuhan PKL di kawasan Simpang Lima .
- b. Untuk mengetahui dampak kegiatan pedagang kaki lima di kawasan Simpang Lima.
- c. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota terhadap PKL di kawasan Simpang Lima.
- d. Untuk memberikan usulan perencanaan lingkungan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan kawasan Simpang lima .

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Usulan dari penelitian ini kemudian digunakan untuk merumuskan suatu rekomendasi untuk menyusun arahan pertumbuhan PKL ke dalam bentuk perencanaan lingkungan di Kawasan Simpang Lima. Sehingga pertumbuhan PKL tersebut dapat mejadi suatu kegiatan yang menguntungkan bagi semua pihak, baik PKL Kawasan Simpang Lima itu sendiri, masyarakat kota Semarang pada umumnya serta Pemerintah Kota Semarang.

Sedangkan sasaran-sasaran kegiatannya adalah :

1. Identifikasi dan kajian kondisi dan permasalahan pola pertumbuhan PKL di Kawasan Simpang Lima, Semarang.
2. Identifikasi dan kajian kebijakan, rencana strategis dan rencana praktis, yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai arahan penataan PKL di Kawasan Simpang Lima , Semarang.

3. Usulan penataan PKL dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kawasan Simpang Lima dengan pendekatan perencanaan lingkungan yang berkelanjutan di Kawasan Simpang Lima .

Hasil penelitian yang berupa usulan dan arahan penataan dan pengelolaan PKL di Kawasan Simpang Lima diharapkan akan menjadi masukan bagi masyarakat, LSM dan Pemerintah Kota Semarang sebagai pengambil kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap substansi dari hasil penelitian, pada bab ini akan dibahas tinjauan pustaka terhadap bahan-bahan yang menjadi acuan dasar bagi pengkajian pada tahap analisis dan temuan hasil penelitian. Tinjauan pustaka berisi kajian berbagai hal yang terkait materi penelitian.

2.1. SEKTOR INFORMAL

Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali diidentikkan dengan istilah sektor informal, meskipun banyak yang menyatakan adanya perbedaan antara keduanya. Istilah sektor informal merupakan istilah yang diadopsi dari istilah Bahasa Inggris : *informal sector*, yang telah umum digunakan oleh dunia. Istilah tersebut kemudian diterjemahkan dan dikaitkan secara umum ke dalam istilah Bahasa Indonesia menjadi *pedagang kaki lima*.

Istilah pedagang kaki lima itu sendiri sebenarnya berasal dari jaman pemerintahan Raffles, Gubernur Jenderal Pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata *5 feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut dipakai untuk kegiatan berjualan pedagang kecil, sehingga kemudian disebut sebagai PKL. Adapun alasan sektor informal di kalangan masyarakat luas dikenal sebagai sebutan PKL adalah karena sebagian besar pekerja sektor informal terjun dan menekuni bidang usaha kaki lima (Ardiyanto, 1998).

- Ruang Privat

Jenis ruang yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Misalnya lahan pribadi yang dimiliki oleh pemilik pertokoan, perkantoran dan sebagainya.

b. Bentuk Sarana Usaha

Sarana berusaha PKL amat bervariasi. Bentuk sarana berusaha tersebut dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Bentuk sarana usaha ini meliputi :

- Gerobak/kereta dorong. Gerobak dorong dipakai untuk jenis usaha makanan berat, makanan ringan, dan minuman.
- Lesehan, bentuk sarana berusahanya sama dengan gerobak, yaitu makanan berat dan minuman.
- Pikulan, dipakai untuk jenis usaha makanan ringan, mainan anak-anak, asesoris dan binatang piaraan (ikan hias).
- Gelaran, dipakai untuk jenis usaha berupa majalah, gambar poster, kerajinan tangan, dll.
- Tenda. Sarana berusaha bentuk tenda dipergunakan untuk jenis usaha makanan berat, makanan ringan dan minuman. Tenda ini ada dua macam, yaitu tenda yang tersedia meja kursi untuk pengunjung dan tenda untuk lesehan.
- Kios. Kios ini dipakai untuk berjualan rokok, minuman ringan, makanan ringan dan bensin.

c. Jenis Barang dan Jasa

Kategori sektor informal berdasarkan jenis barang dan jasa yang ditawarkan, dapat dikelompokkan menjadi tiga macam kebutuhan yaitu :

1. *Kebutuhan primer*, terdiri dari makanan dan minuman. Dari cara menjajakannya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :
 - Mereka yang berjualan dengan cara menetap dengan menggunakan bangunan kios/tenda.
 - Mereka yang berjualan dengan cara keliling yaitu mereka yang menggunakan gerobak beroda yang didorong.
2. *Kebutuhan sekunder* yang terdiri dari barang kelontong, pakaian / tekstil, buah-buahan, rokok/obat-obatan dan majalah/koran
3. *Kebutuhan jasa* yaitu jasa perorangan. Meliputi afdruk foto, tukang kunci, tukang tambal ban. Kelompok ini dapat dijumpai di sepanjang jalan protokol serta tempat disekitar pasar dan waktunya beroperasinya tidak mengenal waktu siang maupun malam kecuali komoditi tertentu.

d. Penggunaan Lokasi Berdagang

Berdasarkan lokasi berdagang, PKL biasanya mencari tempat-tempat strategis untuk menggelar barang dagangannya. Tempat strategis itu terletak di pusat-pusat keramaian seperti di pusat kota, dekat pusat hiburan, disekitar pasar, dan sebagainya. Para PKL dalam menempati lokasinya ada yang sesuai dengan ijin lokasi yang telah ditetapkan, tetapi ada juga yang bersifat dinamis yaitu dengan cara berpindah-pindah dan memakai lokasi trotoar untuk tempat berjualan.

Lokasi yang tidak menetap dan mudah berpindah ini menimbulkan kecenderungan bahwa kebanyakan PKL memilih ruang-ruang umum yang bisa digunakan oleh semua orang, seperti trotoar, taman, pinggiran badan jalan, kawasan tepi sungai dan di atas saluran-saluran drainase. Dengan kemampuan yang amat mobil tersebut, mereka dapat dengan mudah memindahkan usahanya dari suatu tempat ke tempat lain, jika tempat tersebut dianggap kurang strategis dan tidak menguntungkan atau bahkan jika terjadi operasi pelarangan atau pembersihan lokasi mereka. Dengan kemampuannya tersebut mereka bahkan juga mampu dengan cepat menempati lokasi-lokasi yang amat strategis di pusat kota dan bernilai ekonomis amat tinggi, yang bagi usahawan formal amat sukar untuk menjangkaunya.

2.2.3. Pola Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima

Ditinjau dari sudut pola pertumbuhan PKL, dibedakan menjadi dua pola pertumbuhan fisik yaitu :

a. Pola pertumbuhan memanjang (*linear concentrations* /penghubung).

Alasan para penjaja memilih lokasi ini adalah karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga mempunyai potensi yang besar untuk mendatangkan konsumen. Aktivitas dengan pola penyebaran memanjang biasanya terdiri dari barang kelontong, pakaian/tekstil, majalah/koran dan campurannya.

b. Pola pertumbuhan mengelompok (*focus agglomeration*)

Pola pertumbuhan ini dapat dijumpai pada ruang-ruang terbuka, taman, lapangan dan sebagainya. Pola ini dipengaruhi oleh pertimbangan faktor aglomerasi yaitu keinginan para penjual untuk melakukan pengelompokan penjual sejenis dengan sifat dan komoditas sama

untuk lebih menarik minat pembeli. Aktivitas dengan pola penyebaran ini biasanya terdiri dari penjaja jenis makanan dan minuman.

2.2.4. Pola Pelayanan Kegiatan

Kategori aktivitas juga ditentukan berdasarkan fungsi pelayanan, golongan pengguna jasa, skala pelayanan dan waktu pelayanan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a) Waktu Berdagang

Waktu pelayanan sektor informal ini terbagi menjadi beberapa periode waktu dalam sehari. Pembagian waktu pelayanan menunjukkan bahwa tidak seluruh waktu dalam satu hari penuh dipergunakan oleh penjaja dalam melakukan aktivitasnya. Demikian pula dalam melaksanakan fungsi pelayanan umumnya dilakukan secara berturut-turut, misalnya dari waktu pagi hari sampai siang hari atau dari siang hari sampai malam hari, dan sebagainya. Para penjaja tidak hanya melakukan kegiatannya pada satu waktu tertentu saja, misalnya hanya pada waktu pagi hari saja atau siang hari saja.

Saat-saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi aktivitas jasa tersebut terhadap pusat-pusat kegiatan di sekitarnya. Saat-saat teramai bagi aktivitas jasa sektor informal di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat teramai di kawasan rekreasi, permukiman, perkantoran, dan sebagainya.

b) Sifat Pelayanan

Berdasarkan sifat pelayanannya, pedagang sektor informal dibedakan atas pedagang menetap (*static*), pedagang semi menetap (*semi static*), dan pedagang keliling (*mobile*). Pengertian dari ketiga sifat tersebut diuraikan sebagai berikut :

- **Pedagang menetap (*static*)**

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang itu sendiri.

- **Pedagang semi menetap (*semi static*)**

Merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Penjaja akan menetap apabila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat ramainya pengunjung ke pusat kota, misalnya pada saat ada pertunjukan, malam hari libur, dan perayaan acara lainnya. Apabila kemungkinan pembeli yang cukup besar tidak dijumpai, maka dia akan berkeliling.

- **Pedagang keliling (*mobile*)**

Yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat untuk selalu berusaha mendatangi atau “mengejar” konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil.

2.3. RUANG TERBUKA KOTA

2.3.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau Kota

Pemerintah mengatur pelaksanaan penataan Ruang Terbuka Hijau kota dengan Undang-undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang diharapkan mampu mengatasi kendala pelaksanaan manajemen pembangunan. Hal ini dikuatkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota.

Tujuan dari pengaturan adalah :

- a. Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, dan sebagai sarana pengamanan lingkungan dan
- b. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat .

Manfaat penyediaan ruang terbuka hijau adalah menumbuhkan kesegaran, kenyamanan, keindahan lingkungan, menurunkan polusi dan mewujudkan keserasian lingkungan.

Dalam konteks pemanfaatan, pengertian ruang terbuka hijau Kota mempunyai lingkup lebih luas dari sekedar pengisian hijau tumbuh-tumbuhan, sehingga mencakup pula pengertian dalam bentuk pemanfaatan ruang terbuka bagi kegiatan masyarakat. Ruang terbuka hijau kota dapat diklasifikasikan , baik dalam tata letak dan fungsinya. Berdasarkan tata letak, ruang terbuka hijau kota bisa berwujud :

- a. Ruang terbuka kawasan Pantai (*Coastal open Space*)
- b. Dataran banjir Sungai (*River Flood Plain*)
- c. Ruang Terbuka pengaman jalan bebas hambatan (*Greenways*)

- d. Ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan Bandar udara .

2.3.2. PEMANFAATAN RUANG TERBUKA KOTA

Kajian terhadap pemanfaatan ruang terbuka perlu dilakukan, karena biasanya para PKL pada khususnya dan sektor informal pada umumnya menggunakan ruang terbuka sebagai tempat kegiatan usahanya.

Ruang terbuka adalah kawasan yang tidak terbangun atau yang secara dominan lahannya tidak terbangun pada areal perkotaan dan memiliki fungsi untuk taman dan rekreasi, konservasi tanah dan sumber-sumber alam, serta tujuan pendidikan dan perlindungan sejarah. Atau dapat juga diartikan bahwa ruang terbuka kota adalah ruang yang mempunyai peran, fungsi dan keberadaannya ditentukan oleh bangunan-bangunan yang melingkupinya, sehingga berbentuk *urban space* (ruang kota).

Kualitas bangunan yang melingkupi ruang terbuka tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas *space* yang ditimbulkannya. Peran sosial dalam *urban space* dapat dipengaruhi oleh elemen-elemen fisik arsitektur yang dapat dikategorikan dari dua sudut pandang, yaitu :

- Publik domain/ruang publik, adalah *openspace* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Private domain/ruang pribadi, adalah *openspace* yang terdapat pada lahan milik perorangan atau *space* terbuka yang merupakan suatu bagian dari bangunan milik perorangan.

Masyarakat kota selalu membutuhkan ruang terbuka kota sesuai dengan kepentingannya. Sosial budaya warga kota menentukan kebutuhan ruang terbuka

kota yang diperlukan. Menurut Danisworo, 1991, wajah kota sebenarnya juga merupakan manifestasi fisik organisasi atau jaringan sosial masyarakat yang terbentuk sebagai akibat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam. Suatu kota senantiasa terdapat ruang terbuka sebagai area kontak sosial masyarakatnya. Ruang terbuka kota sebagai ruang publik merupakan ruang yang direncanakan untuk kepentingan umum misalnya sebagai area pejalan kaki, area rekreasi, area lalu lintas, atau sebagai area tempat pertunjukan.

Ruang terbuka yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima di perkotaan selalu memunculkan problem keruangan berkaitan dengan keberadaanya yang senantiasa menempati bagian ruang publik seperti lapangan, pinggir jalan atau pada tempat-tempat tertentu yang banyak berkumpul anggota masyarakat.

2.4. KUALITAS LINGKUNGAN

Menurut Soemarwoto (1991) tidak mudah mengatakan apa yang disebut dengan kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat kualitas kehidupan dalam lingkungan tertentu, makin tinggi pula kualitas lingkungan tersebut, demikian pula sebaliknya.

Kualitas hidup bergantung dari derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan yang sehat. Kebutuhan dasar dimaksud adalah :

- a. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. Kebutuhan hidup hayati yang paling pokok yaitu kebutuhan untuk mendapatkan air, udara dan pangan dalam kuantitas dan mutu tertentu. Selain itu terdapat pula kebutuhan akan keamanan.
- b. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, yaitu kebutuhan akan estetika, perlindungan hukum yang adil, kebutuhan beragama, pendidikan, energi maupun lapangan pekerjaan .
- c. Kebutuhan dasar untuk memilih, dimana untuk dapat memilih harus ada keanekaragaman.

Herman haeruman (1995) harapan dimasa depan untuk mendapatkan kualitas lingkungan perkotaan yang lebih baik akan tergantung pada kepada 4 hal yaitu :

1. Ketepatan alokasi ruang untuk setiap kegiatan pembangunan.
2. Ketersediaan dan kemampuan kelembagaan dan proses pengelolaan lingkungan.
3. Pengendalian kegiatan pembangunan yang mengarah kepada efisiensi penggunaan bahan dan pengendalian perencanaan dan perusakan fungsi .
4. Tingkat peran serta masyarakat dan disiplin bermasyarakat kota.

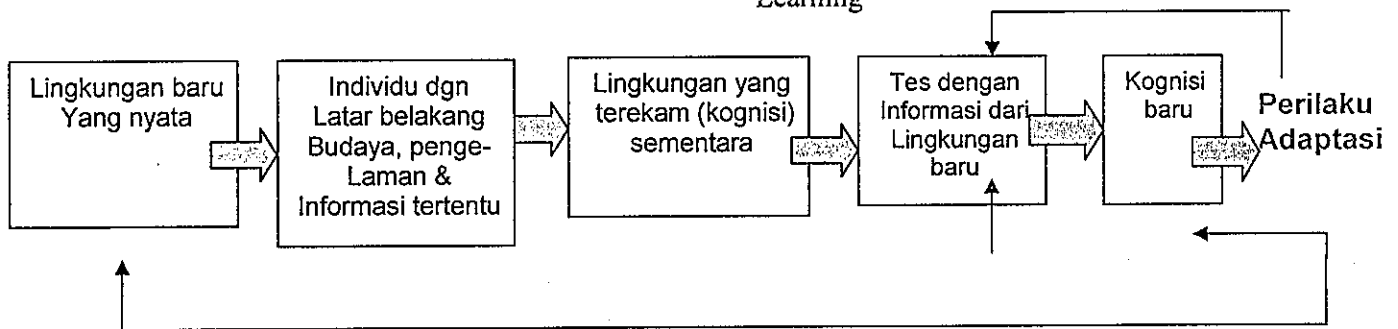
Secara konseptual kualitas lingkungan merupakan hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya serta interaksi antara keduanya dalam menghasilkan suatu perilaku yang dapat memahami lingkungannya. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa manusia adalah mahluk yang menentukan kualitas lingkungannya sendiri,

apapun yang dilakukan oleh manusia akan berakibat langsung pada kualitas lingkungan. Dengan demikian interaksi antara manusia dan lingkungan tidak dapat diinterpretasikan secara sederhana dan mekanik, melainkan sangat kompleks dan cenderung dilihat sebagai suatu yang probabilistik.

2.4.1. PEMAHAMAN LINGKUNGAN

Pemahaman lingkungan oleh Takashi Inoguchi dalam bukunya Kota dan Lingkungan (2003) diartikan sebagai keseluruhan proses yang berputar dari pembentukan *kognisi*, skemata serta peta mental. Proses pemahaman lingkungan meliputi pemahaman yang menyeluruh dan kontinyu tentang suatu lingkungan oleh seseorang. Dalam pemahaman terhadap lingkungan melalui proses pembelajaran lingkungan dengan model sebagaimana Skema 2 dibawah ini :

Skema 2.
Model Environmental
Learning



Sumber : Takashi Inoguchi, 2003

Diagram di atas menjelaskan bahwa pembentukan kognisi mengenai suatu lingkungan merupakan suatu pengetahuan, pemahaman dan pengertian dinamis yang

berputar. Setiap menjumpai suatu lingkungan baru, seseorang berusaha membentuk kognisinya terhadap lingkungan tersebut berdasarkan latar belakang pendidikan, kultur serta pengalamannya. Proses ini menghasilkan apa yang disebut lingkungan yang terkognisi sementara. Kognisi baru ini kemudian mempengaruhi pola perilaku seseorang. Secara berputar perilaku ini kemudian kembali berpengaruh terhadap proses kognisi orang tersebut terhadap lingkungan baru yang ia kunjungi atau tempati. Hal di atas menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi perencana.

Dari keseluruhan proses *environmental learning*, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang disebut sebagai persepsi mengenai kualitas lingkungan atau *Environmental Quality Perception*. Konsep ini sangat penting dalam kajian perencanaan lingkungan kota dan perilaku, karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai secara optimal kualitas lingkungan yang baik.

Kualitas lingkungan yang baik tidak hanya dilihat dari aspek fisik dan bio kimia saja, tetapi dipahami dengan cara mengkaitkan aspek-aspek psikologis dan sosio kultural masyarakat yang menghuni suatu lingkungan. Meskipun kualitas lingkungan sangat subyektif, terdapat pula unsur-unsur dasar kualitas lingkungan yang harus dijaga, terutama yang berkaitan dengan penyediaan air bersih, sanitasi dan persampahan.

2.5. PERENCANAAN LINGKUNGAN

2.5.1. TEORI PERENCANAAN

Perencanaan menurut Freidman (Hadi:1987) mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelum suatu aktivitas tentang keputusan dan implementasi.

Dari definisi diatas tampak bahwa perencanaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi yang bisa diterapkan untuk organisasi publik maupun privat.

Tujuan utama dari teori perencanaan adalah bagaimana mengkaitkan pengetahuan teknis (*technical knowledge*) untuk diterjemahkan dalam *public actions*, ada tiga konsep yang ditawarkan oleh Friedman yaitu :

- a. *action* dalam domain politik
- b. proses arah sosial
- c. proses *transformasi* sosial.

Selain pendapat diatas para pemrakarsa paradigma baru dari perencanaan seperti Boland an Forester (Hadi,2001) menganggap aspek social merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan merupakan aktivitas moral melalui interaksi dan komunikasi, perencana bersama dengan masyarakat membantu merumuskan masalah, menetapkan tujuan, analisis kondisi, mencari alternative solusi, memilih alternatif terbaik, mengkaji alternatif dan mengimplementasikan

Hal ini merupakan proses pembelajaran yang timbal balik yang merupakan aspek penting dari proses perencanaan. Dengan kata lain menurut Burchel (1988 dalam Hadi, 2001) pendekatan transaktif merupakan suatu media untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa yang kita ketahui dengan bagaimana kita harus mengeliminasi kontradiksi antara apa yang kita ketahui dengan bagaimana kita harus melakukan. Tujuan dari dialog adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, nilai dan perilaku, kapasitas untuk tumbuh melalui kerjasama dan semangat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Perencana dan masyarakat terlibat dalam proses dialog yang tidak formal atau *non hierarchical*. Peran perencana lebih sebagai *fasilitator*.

2.5.2. PERENCANAAN LINGKUNGAN

Manusia dan lingkungan pada hakekatnya satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan sedang lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Manusia adalah makhluk yang aktif sedangkan lingkungan bersifat pasif. Kualitas lingkungan bergantung dari kualitas manusia, hal ini sering tidak disadari oleh manusia. Proses perubahan kualitas lingkungan hanya bisa dimengerti dengan baik jika lingkungan dilihat sebagai suatu satuan system yang utuh yang disebut ekosistem. Ada dua bentuk ekosistem yaitu ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan ekosistem buatan (*artificial ecosystem*). Di dalam kehidupannya manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan mengelola sumberdaya alam yang ada, namun dalam perkembangannya pengelolaan tersebut tidak terkendali lagi, dan akhirnya menyebabkan pencemaran dan penipisan persediaan sumberdaya alam.

Dalam menghadapi masalah lingkungan dibutuhkan suatu perencanaan lingkungan. Ada dua pola strategi yang berorientasi pada masalah lingkungan yang timbul dan strategi yang menekankan pada pengaturan (*problem oriented*) dan penataan lingkungan hidup (*program oriented*).

Perencanaan lingkungan pada dasarnya adalah proses dinamik. Amsyari, (1995) perencanaan lingkungan tidak hanya merupakan satu tindakan saja, namun lebih banyak sebagai suatu rentetan aktivitas yang tersusun sistematis dan bertahap, mengarah pada hasil perbaikan lingkungan hidup yang lebih mantap.

Adapun proses kegiatan perencanaan lingkungan pada hakekatnya adalah rantai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perbaikan kualitas terencana, sistematika dan

rasional. Proses ini meliputi berbagai aktivitas yang bisa di klasifikasikan dalam tujuh kelompok pokok. Yaitu :

1. Analisis lingkungan (*environmental analysis*)
2. Penetapan dan penyusunan urutan prioritas masalah lingkungan (*definition of environmental problem and priority statement*)
3. Penyusunan alternatif pemecahan masalah lingkungan (*development of alternative solutions*)
4. Pilihan alternative dan penentuan rencana perbaikan lingkungan (*selection of alternatives solution and statement of environmental policy*)
5. Pelaksanaan rencana dan program perbaikan lingkungan (*implementation of environmental policy and programs*)
6. Pengawasan dalam pelaksanaan (*supervision and revision*)
7. Evaluasi pelaksanaan (*evaluation as an element of a new environmental analysis*)

Ketujuh aktivitas perencanaan lingkungan diatas pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang senantiasa ada dan dilaksanakan dalam upaya perbaikan lingkungan.

2.5.3. PERENCANAAN KOTA

Perencanaan kota pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang kota agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam disekitarnya berkembang secara harmonis dan bersifat lestari. Dua hal pokok yang menjadi azas pemanfaatan ruang di Indonesia yakni :

Pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang kota yaitu manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan berada dalam keseimbangan, sehingga aktivitas manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya harus memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungannya yang berorientasi pada kehidupan yang berkelanjutan.

Kedua, proses pemanfaatan ruang harus bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak secara terpadu, berdaya guna dan serasi. Kedua hal tersebut diatas diatur dalam Undang-undang Nomor 24/1992 tentang Pemanfaatan Ruang.

Perkembangan sosial politik di Indonesia, terjadi tuntutan masyarakat yang mengakibatkan adanya pergeseran pola pikir yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah daerah yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Bergesernya peran pelaku pembangunan dari Pemerintah ke masyarakat dan dunia usaha, mengakibatkan munculnya paradigma baru dalam proses perencanaan kota. Perencanaan kota yang lebih dikenal dengan Perencanaan Tata Ruang merupakan suatu bentuk kesepakatan publik dan mengikat sebagai suatu kontrak sosial, atau suatu bentuk keputusan kolektif yang dihasilkan dari proses politik dan kemudian menjadi kebijakan publik yang harus ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada penelitian mengenai pemahaman pengaruh pola pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Perencanaan Lingkungan Di Kawasan Simpang Lima, Semarang ini memerlukan suatu panduan pelaksanaan (guidelines) yang terencana dengan baik sehingga penjabaran penelitian dapat lebih sistematis, teratur, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab ini akan menguraikan tentang beberapa aspek yang terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Beberapa aspek tersebut meliputi : lokasi dan waktu penelitian, sampling dan tehnik pengambilan sampel, sumber data dan tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data serta tehnik analisa data.

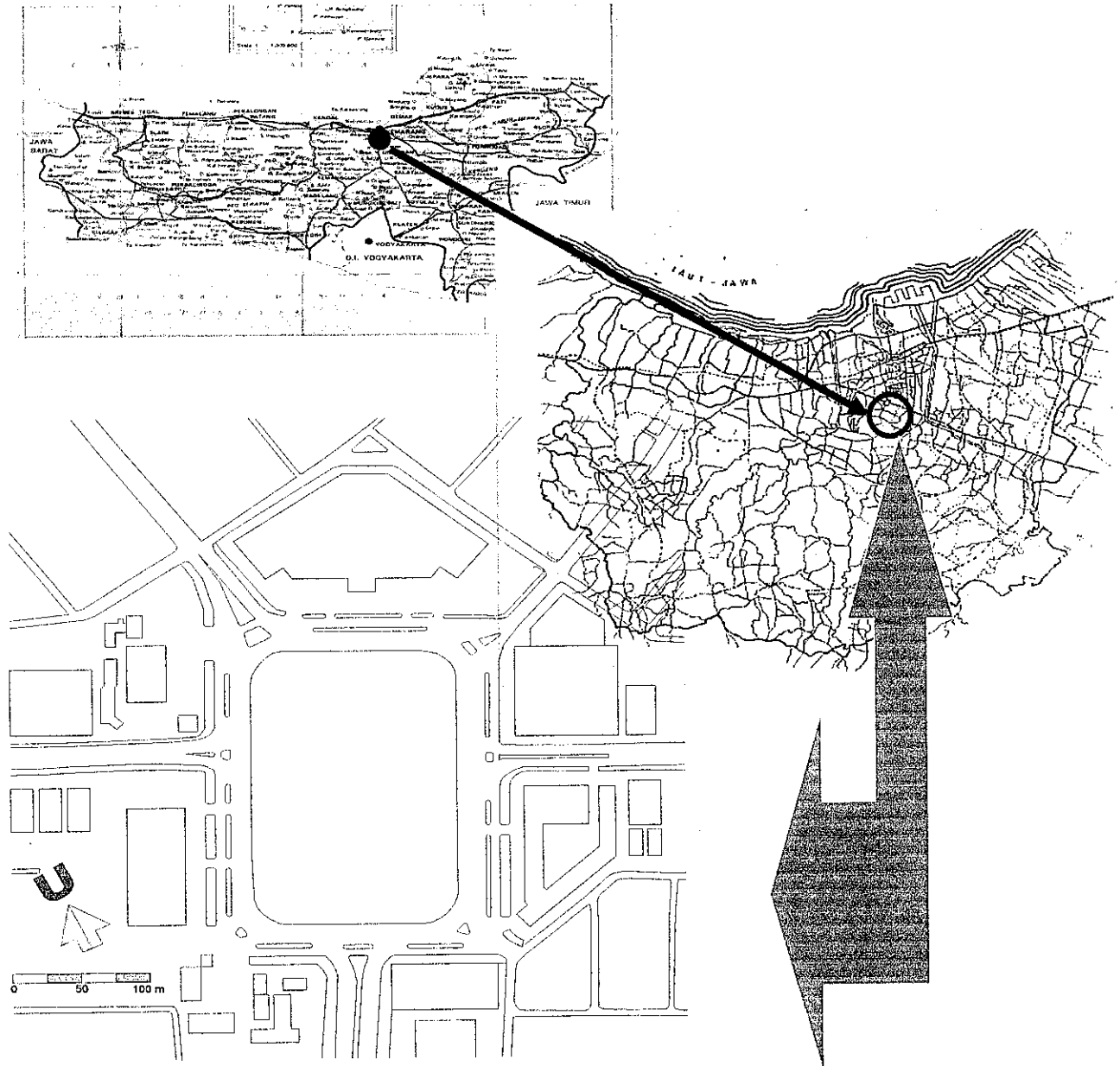
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Lokasi penelitian adalah kawasan Simpang Lima dengan pertimbangan bahwa kawasan ini merupakan pusat bisnis/pertokoan, pusat kota dan pusat pemerintahan dengan keanekaragaman aktivitas pengguna ruang didalam suatu penataan ruang berpola formal. Kawasan Simpang Lima merupakan Pusat Kota yang merupakan CBD (*Central Bussnies Distrik*) . Dari karakter tersebut perkembangan jumlah PKL akan sangat cepat. Karena merupakan favorit tempat tujuan utama warga kota Semarang.

Disamping itu Kawasan Simpang Lima memiliki gejala pergeseran peran dan fungsi. Peran dan fungsinya saat ini menjadi pusat aktivitas warga dan pemerintah (upacara, dan sebagainya). Hal ini tampak dari pemilihan lokasi penyelenggaraan berbagai acara dalam agenda kota seperti pentas musik *live*, promosi produk, kampanye dan demonstrasi, peringatan

upacara, peringatan hari besar oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Semarang selalu diadakan di lapangan ini.

Adapun lokasi Kawasan Simpang Lima adalah sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 3
Peta Batasan Lokasi Penelitian

Kawasan Simpang Lima Semarang, merupakan suatu pusat kegiatan yang berada disekitar Lapangan Pancasila, dalam penelitian ini kami bagi dengan pembagian *zona*. yaitu :

Zona I = Lapangan Pancasila

Zona II = Jl. Ahmad Yani (dari depan Brahma sampai dengan eks SE)

Zona III = Jl. Pandanaran (dari depan Plaza sampai dengan Gramedia)

Zona IV = Jl. KH. Ahmad Dahlan (dari depan Hotel Horison sampai RS Tlogorejo)

Zona V = Jl. Gajahmada (dari depan Baiturrahman sampai ASPAC Building)

Zona VI = Jl Pahlawan (dari depan Ramayana sampai Air Mancur)

Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, yaitu mulai bulan Pebruari sampai dengan Mei 2004. Penelitian ini dilakukan pada hari kerja (Senin – Jumat) mulai pukul 16.00 sampai dengan 21.00 WIB.

Kegiatan penelitian ini yang meliputi pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan dan analisa data serta sampai penulisan tesis.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian *deskriptif*. Menurut Nawawi (2001), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan obyek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan suatu frekuensi adanya hubungan atau pengaruh antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran sistematis (Nazir, 1988-61).

Berangkat dari adanya perumusan masalah dalam penelitian mengenai PKL di kawasan Simpang Lima, maka akan dilakukan penelitian dengan *metode kualitatif* dan dipandu dengan *kuesioner*.

Adapun pendekatan yang akan dilakukan sesuai dengan sasaran studi, sebagai berikut:

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (1988), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, sebaliknya data yang didapat dari suatu lembaga yang dengan tujuan tertentu menggali data tersebut sebelumnya, akan menjadi data sekunder. Data yang akan dipakai sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.3.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh di lapangan/langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara:

a. Observasi (pengamatan) yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung ke obyek atau lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. Peneliti dalam melakukan observasi berperan sebagai *marginal partisipan* yaitu ikut hidup dalam kelompok, identitas peneliti diketahui kelompok yang diteliti dan menyusup ke dalam situasi kehidupan masyarakat (Hadi, 1997).

b. Wawancara

Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan panduan pertanyaan (*questions guide*), yang ditujukan kepada sumber informasi yaitu Kepala Bapeda Kota Semarang dan Kepala UPD PKL Kota Semarang. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pengelolaan, kebijakan dan pembinaan tentang PKL di Kota Semarang.

c. Kuesioner

Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah dirancang secara sistematis dengan pertanyaan tertutup dan terbuka. Penggunaan kuesioner ini adalah bertujuan untuk mendapatkan data primer yaitu : karakteristik, pertumbuhan, jenis usaha dan pemahaman Lingkungan oleh PKL dan persepsi masyarakat sebagai konsumen

3.3.2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur, hasil penelitian maupun karya ilmiah terdahulu, serta. berasal dari sumber tertulis atau, dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3.4. Sampling dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Nawawi (2001) yang dimaksud dengan teknik pengambilan sampel (teknik sampling) adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang *representatif* atau benar-benar mewakili populasi.

Teknik sampling yang dipergunakan berdasarkan *Teknik Random Sampling* yaitu teknik sampling yang setiap anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Kartono, 1986), sehingga hasilnya dapat menggambarkan kondisi umum (digeneralisasi). Cara yang dipergunakan, bisa dengan undian, pengurutan atau ordial dan tabel bilangan random.

Lebih spesifik lagi, berdasarkan hasil sampelnya, teknik yang digunakan adalah *Proportional Stratified Random Sampling*, yaitu salah satu pengembangan sampel berstrata (stratified sample) dengan penentuan jumlah sampel pada setiap stratum. Bentuk stratum dalam

studi ini berupa zona (*areal sample*). Sedangkan Jumlah Sample yang diambil, dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. (Kartono, 1986) :

$$N = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{N \cdot d^2 + z^2 \cdot p \cdot (1-p)}$$

Keterangan :

N = Jumlah Populasi

d = Maximum error 10 %

n = Sample

r = Rasio Populasi 30 %

Z = derajat kecermatan 1,645

Dengan memasukkan jumlah populasi pengguna kawasan yang merupakan warga kota Semarang sebanyak 1.309.667 jiwa (BPS Kota Semarang, 2001) maka diperoleh besarnya sampel minimal yang harus diambil adalah 56,824 , atau dibulatkan menjadi 60 responden. Karena jenis sample ada dua yaitu PKL dan konsumen, maka jumlah respondennya masing-masing 50 %. Pembagian tersebut dikarenakan pendapat PKL dan pendapat konsumen mempunyai bobot yang sama dalam analisis maupun kesimpulan yang akan diambil.

a. Sample Pedagang Kaki Lima

Dari jumlah sample 50 % dari 60 adalah 30 PKL, maka pengambilan sample sesuai dengan Zona adalah sebagai berikut :

Zona I = Lapangan Simpang Lima	= 5 responden
Zona II = Jl. Ahmad Yani	= 5 responden
Zona III = Jl. Pandanaran	= 5 responden
Zona IV = Jl. KH. Ahmad Dahlan	= 5 responden
Zona V = Jl. Gajahmada	= 5 responden
Zona VI = Jl Pahlawan	<u>= 5 responden</u>

Total Responden PKL dari 6 lokasi adalah 30 Responden .

b. Sample Konsumen (pembeli)

Karena jumlah konsumen yang menjadi responden 50 % dari jumlah keseluruhan responden, Dengan demikian jumlah responden untuk konsumen di dapat 30 responden.

Dengan jenis dan jumlah responden tersebut, hasil penelitian terhadap kondisi mereka dibahas secara detail di dalam bab-bab berikut ini. Selanjutnya, hasil penelitian ini digunakan sebagai upaya untuk memberikan rekomendasi penataan PKL di Kota Semarang,

3.5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini khusus untuk data tentang PKL dan persepsi masyarakat di kawasan Simpang Lima yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya diolah melalui : (a) editing, yaitu meneliti serta memilah kembali kelengkapan dan kebenaran data yang dibutuhkan; (b) tabulasi, yaitu pengelompokkan data untuk mempermudah proses analisis.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Sudharto (2000) metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penilaian data, temuan dan visualisasi di lapangan dilakukan dengan pengkajian pola spasial. Metode kualitatif mengutamakan uraian, penjelasan, dan perbandingan, yang meliputi :

1. *Deskriptif*, yaitu menganalisa melalui uraian-uraian, pengertian-pengertian, maupun penjelasan-penjelasan baik terhadap komponen analisis yang terukur atau yang bersifat tidak terukur. Berdasarkan jawaban responden dibuat rangking, tabel maupun persentase, dan dengan hasil tersebut akan dianalisis secara *deskriptif*. Metode *deskriptif* ini digunakan untuk menganalisis karakteristik PKL dan karakteristik pengunjung.

2. *Asumtif*, yaitu memberikan anggapan-anggapan atas kondisi yang ada baik kondisi eksisting maupun kondisi yang diperkirakan didapat berdasarkan data yang telah ada yang dianggap layak dan dapat diterima oleh umum. Metode asumtif ini digunakan untuk menganalisis kondisi eksisting pola spasial pedagang kaki lima dan perancangan pola spasial pedagang kaki lima.
3. *Normatif*, yaitu analisis yang menyangkut keadaan yang seharusnya mengikuti suatu norma atau pedoman ideal tertentu. Pedoman atau norma ideal tersebut dapat berupa standar yang ditentukan oleh institusi tertentu, kondisi setempat, dan lain sebagainya terutama yang berhubungan dengan kondisi yang ada.

Mengacu pada tujuan penelitian untuk mencari signifikansi pengaruh pola pertumbuhan Pedagang Kali Lima (PKL) dengan perencanaan lingkungan di kawasan Simpang Lima, Semarang, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu ciri-ciri keilmuan yang mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Rasional, artinya kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau dengan penalaran manusia.
- b. Empiris, artinya cara-cara yang digunakan tercermati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan.
- c. Sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono,2000)

Oleh karena itu langkah-langkah dalam penelitian ini harus dilakukan berdasarkan fakta dan keadaan sesungguhnya sehingga dapat diterima secara rasional, empiris dan disusun dalam suatu sistematika yang baik dengan logika yang tepat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

Dari segi topografi, Kota Semarang terbagi atas dua bagian yaitu daerah atas yang berbukit-bukit dan daerah bawah yang berupa dataran alluvial. Sedangkan dari ciri masyarakatnya juga terbagi dua yaitu masyarakat dengan karakteristik perkotaan yang menempati daerah pusat kota dengan lingkungan pemukiman yang berciri kekotaan dan masyarakat dengan karakteristik perdesaan yang menempati daerah perluasan.

4.1.2. KONDISI ALAM

Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 4'$ Lintang Selatan dan garis $110^{\circ} 21' - 110^{\circ} 29'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah meliputi $373,67 \text{ Km}^2$ dan dibatasi oleh:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak atau Kabupaten Grobogan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang
- Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa, dengan panjang garis pantainya meliputi 13,6 km.

Wilayah Kota Semarang terdiri dari daerah pantai, daerah dataran rendah dan daerah perbukitan. Dengan demikian topografi kota Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai macam kemiringan dan tonjolan (relatif). Di bagian utara yang merupakan dataran pantai dan dataran rendah, memiliki kemiringan antara 0 – 2%,

sedangkan di bagian selatan yang merupakan daerah dataran tinggi, memiliki kemiringan yang sangat bervariasi, yaitu antara 2 – 40 %.

Adapun ketinggiannya juga bervariasi. Daerah pantai memiliki ketinggian antara 0 – 0,75 m, sedang daerah dataran rendah disini memiliki ketinggian antara 0,75 – 3,50 m. Sedangkan untuk daerah perbukitan atau dataran tinggi ketinggiannya bervariasi antara 90 – 359 m diatas permukaan laut. Daerah atau satuan dataran rendah Semarang, menempati daerah pantai utara, memanjang dari barat ke timur. Bentuk medan dataran rendah ini agak menyempit bagian tengah dengan lebar \pm 3 km dan melebar di bagian barat (3-4 km) dan bagian timur (6-11 km).

Pertumbuhan medan daerah kota Semarang ini mulanya dikontrol terutama oleh pembentukan delta Kaligarang, dengan arah pertumbuhan dari arah timur laut, sehingga daerah dataran rendah dibagian timur paling lebar. Kecepatan pertumbuhan pantai Semarang ini, kurang lebih berkisar antara 8 m setahun. Satuan dataran ini umumnya dibentuk oleh endapan alluvium yang terdiri dari pasir, lanau dan lempung. Lahan di sini telah tumbuh dan dimanfaatkan untuk pelabuhan laut, pelabuhan udara, pertokoan, industri, kantor dan pemukiman. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata faktor-faktor diatas banyak memberikan keuntungan dan kerugian. Salah satu kerugian yang ditimbulkan adalah masalah genangan air yang terjadi di wilayah bagian bawah.

Kota Semarang, secara hidrologis beriklim tropis dengan 2 (dua) pergantian musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi antara bulan Nopember sampai dengan April yang dipengaruhi oleh angin musim barat. Hujan tahunan adalah sekitar 3.138 mm dengan rata-rata hari hujan 224 hari pertahun.

4.1.3. KONDISI DAN POTENSI PENDUDUK

Berdasarkan Data Kependudukan di Kota Semarang pada tahun 2001, penduduk Kota Semarang berjumlah 1.146.931 jiwa terdiri dari laki-laki 567.629 dan perempuan 579.302 jiwa.

Dua faktor utama dalam permasalahan kependudukan yang harus mendapatkan prioritas dalam penataan kota Semarang adalah faktor pertumbuhan dan penyebarannya. Adapun gambaran pertumbuhan kota Semarang dari tahun 1981 sampai akhir tahun 2001 adalah seperti terlihat dalam tabel 3.2.

Dari tabel tersebut tampak bahwa pertumbuhan penduduk Kota Semarang rata-rata 1,27% pertahun. Angka pertumbuhan penduduk ini termasuk tinggi, jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan penduduk nasional, yaitu sebesar 1,2% pertahun.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang

No	Tahun	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	1981	480,142	495,401	975,543
2.	1990	548,152	564,023	1,112,175
3.	1991	551,177	567,859	1,119,036
4.	1992	556,565	569,700	1,126,265
5.	1993	567,629	579,302	1,146,931
6.	1994	570,093	582,842	1,152,935
7.	1995	578,918	592,660	1,171,578
8.	1996	586,270	600,187	1,186,457
9.	1997	598,452	619,873	1,218,325
10.	1998	613,421	623,489	1,236,910
11.	1999	551,177	567,859	1,119,036
12.	2000	556,565	569,700	1,126,265
13.	2001	567,629	579,302	1,146,931

Sumber : BPS Kota Semarang

4.2. GAMBARAN KAWASAN SIMPANG LIMA.

Ide pembangunan Simpang Lima muncul dari Prof. Ir. Sumarman selaku Kepala DPU Jawa Tengah, dengan ide dari Prof. Ir. Purbodiningrat, Guru Besar Planologi pada Fakultas Teknik Universitas Gajahmada, Yogyakarta, yang menyarankan dibuat pusat kota Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya oleh Ir. Sidharta dan Ir. Lukita Wijaya dibuat rancangan pengembangan Simpang Lima. Rancangan dasarnya membuat lapangan berbentuk segi empat pada pertemuan lima jalan. Lapangan segi empat ini merupakan kompleks kantor Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

4.2.1. Orientasi Kedudukan Simpang Lima dalam Konteks Kota Semarang

Kota Semarang yang berpenduduk 1,3 Juta merupakan salah satu kota besar di Negara Indonesia, mengalami berbagai perkembangan kota yang menyebabkan perubahan pada tata guna lahan kawasan dan mobilitas penduduk. Kawasan dengan luas 1,08 Ha sekarang ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan komersil seperti Mal dan Hotel Ciputra, Plaza Simpang Lima, Ramayana Departement Store, Kompleks Pertokoan dan Bioskop Plaza, Masjid Baiturrahman , Hotel Horison dan bangunan eks SE. Dengan perubahan fungsi ini kawasan ini berubah menjadi pusat perdagangan dengan aktivitas yang sangat tinggi karena selain sebagai pusat perdagangan juga menjadi pusat perkantoran, jasa, rekreasi, pendidikan, dan ruang interaksi publik warga kota Semarang.

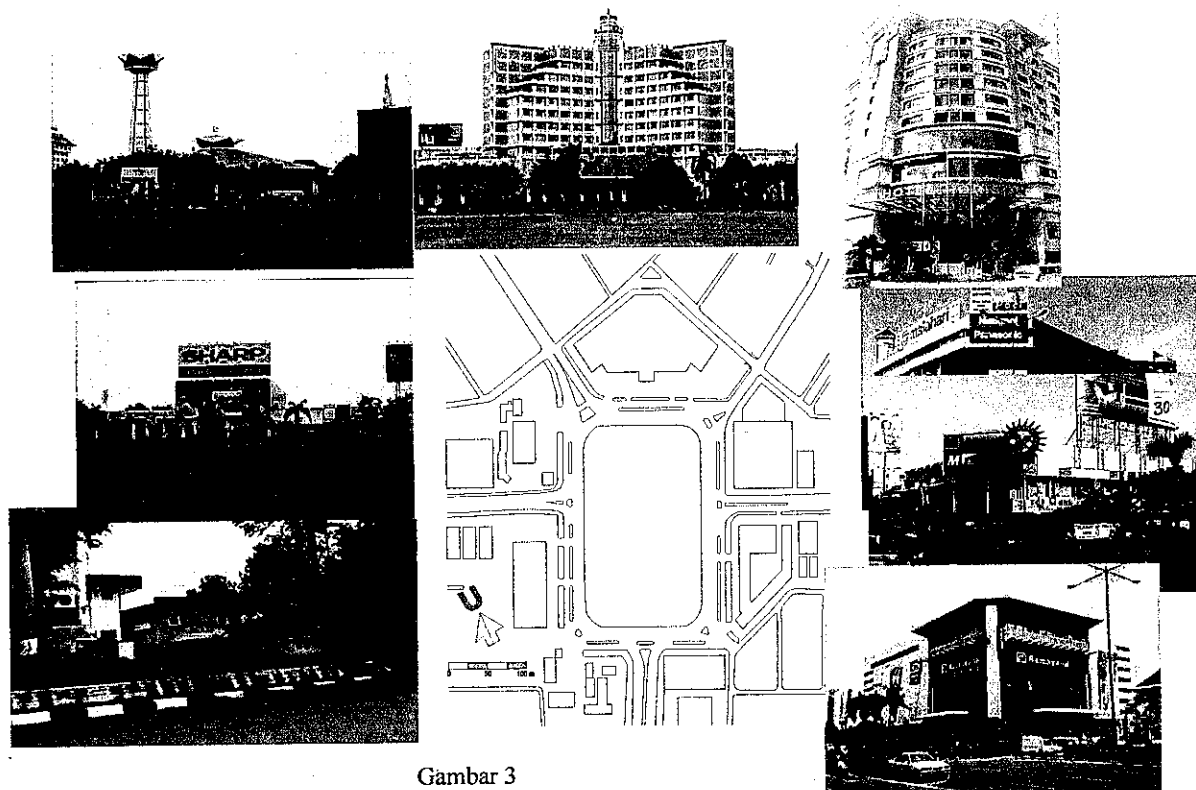
4.2.1.1. Arahan Pola Tata Ruang Menurut RDTRK Semarang

Kawasan Simpang Lima secara administratif masuk wilayah Kecamatan Semarang Tengah. Sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Kawasan Simpang Lima terbagi dalam dua sub lokasi, yaitu Sub Wilayah 1 B untuk kawasan Simpang Lima bagian Utara dan sub wilayah 2 untuk kawasan Simpang Lima bagian Selatan.

Sub wilayah 1 B merupakan daerah eksistensi pengembangan fungsi di daerah inti pusat kota yang mendominasi kegiatan perdagangan, eceran, jasa dan komersial lainnya dengan pelayanan lingkup kota dan lokal, lingkungan perkantoran kota Semarang dan lingkungan permukiman padat.

Sub wilayah 2 merupakan pengembangan pusat kegiatan kota yang menampung kegiatan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, jasa komersial , pusat komersial dan budaya.

Adapun gambaran kondisi kawasan Simpang Lima secara fisik sebagaimana gambar dibawah ini.



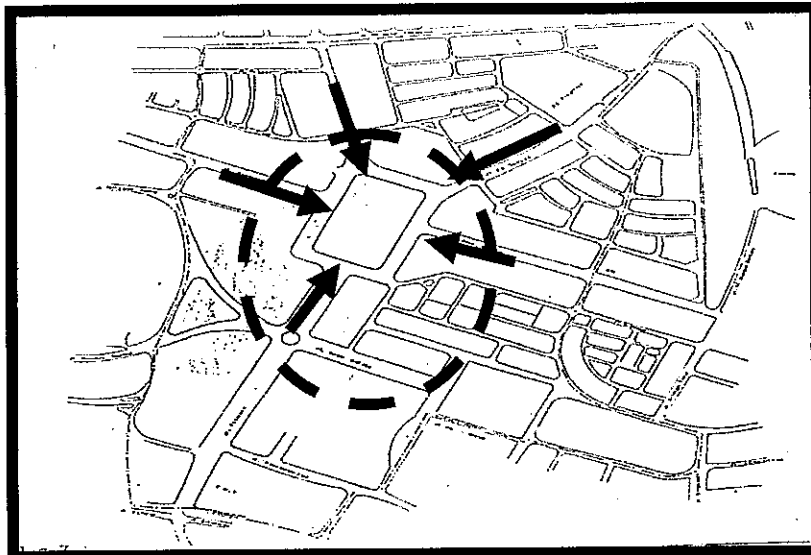
Gambar 3
Keadaan fisik Kawasan Simpang Lima


4.2.1.2. Pendukung Kawasan Simpang Lima

Kawasan Simpang Lima merupakan kawasan yang berkembang menjadi CBD baru. Dalam perkembangannya sarana yang menunjang sebuah kawasan sangat menentukan apakah kawasan tersebut baik atau tidak. Sarana jalan, drainase, penerangan jalan, taman kota, tempat parkir, sarana kebersihan (persampahan), dan pengaturan pedagang kaki lima, dan aspek sosial yang mengikuti perkembangan di atas. Pembahasan secara detil sebagai berikut :

a. Sarana Jalan.

Jalan-jalan di kawasan Simpang Lima terdiri dari berbagai fungsi dan kelas jalan. Jalan primer terdiri dari Jl Ahmad Yani, Jl Pahlawan, Jl. Gajahmada, Jl KHA Dahlan, dan Jl. Pandanaran. Dan jalan sekunder sebagai pendukung keberadaan jalan primer serta untuk menampung luberan arus lalu lintas pada jalan primer yaitu Jl. Seroja , Jl. Erlangga, Jl. Pandanaran II, Jl. Tri Lomba Juang, Jl. Hayamwuruk, dan Jl. Pekunden. Adapun kondisi jalan sekarang masih dalam keadaan baik pada jalan primer dan dalam keadaan kurang baik untuk jalan sekunder. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar peta berikut.



Keterangan =  Akses jalan ke Kawasan Simpang Lima

b. Saluran Air/drainase.

Saluran Kawasan Simpang Lima merupakan saluran tertutup yang mempunyai panjang 31.223 meter dengan lebar 0,3 – 6,00 meter dan kedalaman 0,4 – 3,00 meter sehingga mempunyai daya tampung volume air sekitar 87.87,52 m³. Kawasan ini merupakan daerah genangan rutin yang cukup parah, tetapi hal ini tidak berlangsung lama karena adanya saluran yang dilengkapi penggelontoran air ke Sungai banjir Kanal Timur dengan sarana rumah pompa Jl. Kartini

c. Penerangan Jalan

Lampu-lampu penerangan jalan dirancang secara spesifik sehingga menjadi identitas kawasan ini. Adapun lampu-lampu merkuri dan lampu pelengkap lainnya berjumlah 803 buah. Penggunaan daya untuk keperluan penerangan jalan di kawasan ini adalah sebesar 13.425.505 Kwh/Tahun.

Dengan luas kawasan 1.089.890 m², maka tiap m² lahan yang digunakan menggunakan daya 12,32 Kwh/tahun.

Gambar di bawah ini menunjukkan Simpang Lima di waktu malam dengan penerangan jalan yang belum memadai terutama di tengah lapangan dan sudut lapangan yang masih gelap.



Gambar 5
Simpang Lima di malam hari

d. Taman Kota

Kondisi Kawasan Simpang Lima sebagai Ruang terbuka hijau kota dan ruang interaksi publik warga kota Semarang pada tahun 1990-an masih dalam kondisi baik dan terawat sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 6
Kawasan Simpang Lima sebagai ruang terbuka hijau kota
Pada era 1990-an

Akan tetapi kawasan ini menjadi sangat kotor dan tidak terawat sebagaimana gambar 7 berikut ini.



Gambar 7
Kawasan Simpang Lima kondisi sekarang
(diambil pada Mei 2004)

4.3. KARAKTERISTIK UMUM PKL

Sebagai upaya untuk mengetahui gambaran umum PKL di Kota Semarang, maka pada bagian ini akan dikaji karakteristik umum PKL yang menjadi responden pada penelitian ini.

Hal penting yang akan mempengaruhi kajian terhadap rekomendasi untuk kegiatan perbaikan adalah tingkat pendidikan dan kelompok umur yang merupakan karakteristik para pedagang kaki lima yang diperkirakan akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap bidang kerja yang dijalani.

Kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan juga ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan dipandang tidak hanya menambah pengetahuan tetapi dapat juga meningkatkan ketrampilan (keahlian) yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.

Sedangkan menurut Ramli (1992) tingkat pendidikan dan kelompok umur para PKL berpengaruh pada pola-pola sosialisasi di perkotaan. Hal ini karena tingkat pendidikan memberi pengaruh terhadap kemampuan berpikir, beradaptasi dan bereaksi dengan lingkungan barunya, sedangkan umur akan memberi pengaruh kepada kemampuan fisik PKL dan adaptasi terhadap pola-pola sosial budaya baru. Semakin tua seseorang ada kemungkinan semakin lebih mempertahankan pola sosial budaya lama.

Dari penelitian ini didapat bahwa tingkat pendidikan PKL, kebanyakan hanya pernah mengenyam pendidikan dasar (SD dan SLTP). Sebagaimana tercantum pada tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1
Proporsi Responden Menurut Tingkat Pendidikan
PKL Kawasan Simpang Lima

No	Tingkat Pendidikan PKL	Frekuensi	Persentase
1	SD	6	20 %
2	SLTP	16	53 %
3	SLTA	5	17 %
4	Lainnya (perguruan tinggi)	3	10 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber : Data Primer, 2004

4.4. ANALISIS POLA PERTUMBUHAN PKL

Sebagaimana teori tentang pola pertumbuhan PKL ada dua pola pertumbuhan fisik yaitu Pola pertumbuhan memanjang (*linier concentrations*) dan pola pertumbuhan mengelompok (*focus agglomeration*), dimana masing-masing mempunyai ciri-ciri yang spesifik.

Pada penelitian ini yang menjadi pembahasan dalam pola pertumbuhan adalah sebagai berikut :

4.4.1. Kondisi Lokasi PKL

Kondisi lokasi PKL, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi lokasi penelitian, baik dari lokasi jalan, penggunaan lahan, kegiatan PKL pada lokasi terpilih yaitu :

Zona I = Lapangan Simpang Lima

Zona II = Jl. Ahmad Yani

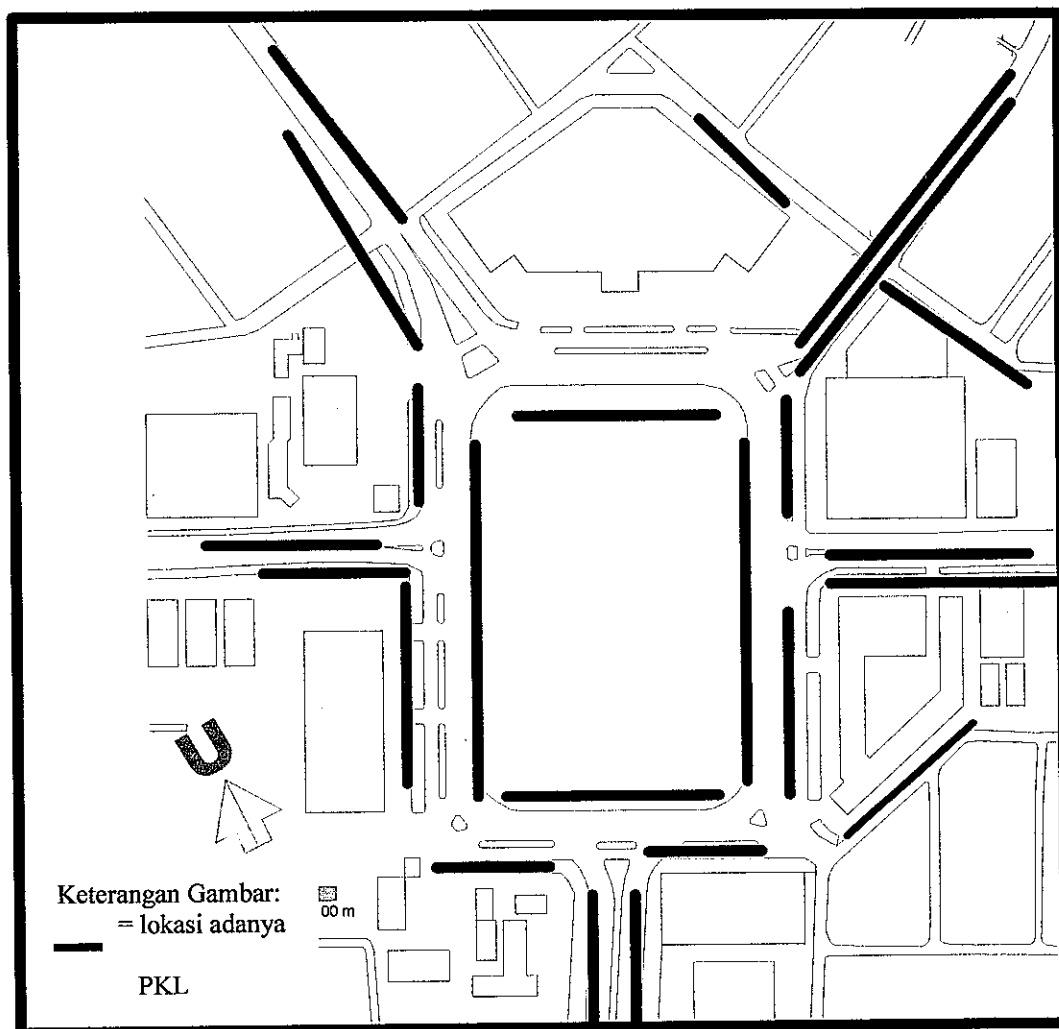
Zona III = Jl. Pandanaran

Zona IV = Jl. KH. Ahmad Dahlan

Zona V = Jl. Gajahmada

Zona VI = Jl Pahlawan

Lokasi berjualan PKL di Kawasan Simpang Lima berada pada sisi kiri dan kanan jalan, dimana trotoar yang dipergunakan untuk pejalan kaki dipergunakan untuk berjualan. Sebagaimana gambar 8 berikut ini.



Gambar 8
 Peta lokasi PKL di Kawasan Simpang Lima

4.4.2. Jenis tempat usaha

Kawasan Simpang Lima merupakan tempat usaha yang banyak diminati juga oleh para PKL. Lokasi jalan yang mengelilingi Lapangan Pancasila merupakan persimpangan jalan yang mempertemukan Jl. Pandanaran, Jl. Gajahmada, Jl.KH. Ahmad Dahlan, Jl. Pahlawan dan Jl. Ahmad Yani. Lokasi PKL yang dominan adalah

yang berjualan pada malam hari dengan dominasi jenis dagangan adalah jenis makanan/minuman dan sebagian lagi berjualan seperti dompet, ikat pinggang, topi, kaset, poster terutama pada trotoar sekeliling lapangan.

Sebagaimana diketahui Kawasan Simpang Lima dikelilingi oleh aktivitas komersial, peribadatan, perkantoran. Kawasan komersial seperti Citraland pada sisi utara, sebelah timur adalah pusat perbelanjaan Matahari, sebelah selatan eks Super Ekonomi dan sebelah barat adalah pertokoan Gajah Mada Plaza dan Ramayana Departemen Store serta Masjid Baiturrahman. PKL menempati ruang-ruang kosong milik pribadi maupun milik pemerintah, baik itu area terbuka (*open space*) maupun milik perorangan (*private space*)

4.4.3. Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Keramaian Kota

Dalam penelitian ini mencatat bahwa pada umumnya, responden berusaha memilih lokasi (menempatkan barang) secara fisik sedekat mungkin dengan calon pembeli. Lokasi-lokasi yang banyak calon pembeli adalah pada tempat dimana terdapat kegiatan-kegiatan kota atau keramaian seperti misalnya kawasan perdagangan, perkantoran, sekolahan, rumah sakit dan keramaian lainnya. Sedangkan seberapa dekat lokasi-lokasi PKL tersebut dengan tempat kegiatan kota, atau keramaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel.4.2.
Kedekatan Lokasi Jualan PKL dengan Pusat Kegiatan/Keramaian Kota
PKL Kawasan Simpang Lima

Jarak	Frekuensi	Persentase (%)
< 100 m	15	51 %
100 m – 500 m	13	43 %
> 500 m	2	6 %
Jumlah	30	100 %

Sumber : Data Primer, 2004

Terlihat sebagian besar responden menjawab bahwa jarak lokasi PKL dengan tempat kegiatan / keramaian kota adalah dekat (51 %) dan sedang (43 %). Hal ini menunjukkan bahwa PKL mempunyai kecenderungan untuk memasarkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Kawasan Simpang Lima merupakan tempat yang banyak orang yang beraktifitas baik perdagangan , pemerintahan, pendidikan maupun peribadatan, dimana tempat tersebut banyak calon pembeli potensial. Aspek Kedekatan (*proximity*) dengan sektor formal ini kiranya menunjukkan keinginan dari para PKL untuk beraglomerasi baik aglomerasi pada kegiatan-kegiatan serupa maupun aglomerasi karena saling menunjang (*komplementer*).

4.4.4. Kemudahan Memperoleh Angkutan Umum di Lokasi

Kemudahan (*conveniencies*) dan kedekatan (*proximity*) dalam suatu wilayah atau kota berfungsi untuk memperlancar pertukaran barang-barang dan jasa. Sedang menurut Nelson (1958) daya tarik pada suatu fasilitas perdagangan bagi konsumen (pembeli) adalah adanya faktor kemudahan yaitu. baik transportasi umum. (biaya, waktu,

frekuensi) maupun transportasi pribadi (parkir, aksesibilitas, kondisi lalu lintas, jarak parkir).

Dalam penelitian ini mencatat bahwa hampir semua responden menjawab bahwa di lokasi mudah untuk memperoleh angkutan umum (19%) dan sedang (34%) hanya satu responden yang menjawab bahwa angkutan umum yang lewat dekat lokasi.

Tabel 4.3.
Kemudahan Memperoleh Angkutan Umum
di Sekitar Lokasi Jualan PKL Kawasan Simpang Lima

Kemudahan Angkutan Umum	Frekuensi	Persentase
Mudah	19	63 %
Agak sulit	10	34 %
Sulit	1	3 %
Jumlah	30	100 %

Sumber: Data Primer, 2004

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden kebanyakan menciptakan lokasi usahanya dimana mudah untuk memperoleh angkutan umum. Hal ini disamping lokasi tersebut mudah dijangkau oleh para konsumen, juga merupakan alat transportasi yang kebanyakan dimanfaatkan oleh para PKL untuk menuju lokasi kerja dari tempat tinggal. Di lokasi-lokasi penelitian juga terlihat bahwa pada lokasi-lokasi tersebut banyak dilewati angkutan umum.

Hal tersebut diatas terbukti bahwa usaha PKL terdapat kaitan yang erat antara persebaran lokasi PKL dengan jaringan transportasi, dimana usaha PKL tumbuh pesat di sepanjang jalan besar dan memerlukan sarana prasarana transportasi untuk melayani penduduk.

Dari analisis jenis tempat usaha, kedekatan lokasi dengan pusat keramaian, kemudahan memperoleh angkutan umum dan kondisi lokasi PKL di kawasan Simpang Lima terbukti bahwa pola pertumbuhan PKL di sini adalah pola campuran.

Pola ini terdiri dari kecenderungan pola pertumbuhan memanjang (*linier concentration*) dan terdapat juga pola pertumbuhan mengelompok (*focus agglomerations*). Pola pertumbuhan memanjang dibuktikan dari penelitian ini bahwa PKL berjualan pada sisi kiri dan kanan jalan di kawasan Simpang Lima dengan mempergunakan trotoir sebagai tempat berjualan. Pola pertumbuhan mengelompok dilihat dari mengelompoknya PKL berusaha/berjualan di tempat yang mendekati lokasi PKL dengan pusat keramaian dan tempat yang mudah dijangkau oleh angkutan umum. Pengelompokan juga terjadi pada jenis barang yang dijual.

4.5. ANALISIS DAMPAK YANG DITIMBULKAN KARENA ADANYA PKL

Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan karena adanya PKL di Kawasan Simpang Lima, ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator. Dampak itu sendiri terdiri dari dampak positif dan dampak negatif yang masing-masing dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini.

4.5.1. Analisis mengenai dampak positif karena adanya PKL di Kawasan

Simpang Lima.

Dari pembahasan tentang dampak positif karena adanya kegiatan PKL ini banyak dari aspek sosial ekonomi dan pemasukan retribusi ke Pemerintah Kota. Adapun bahasan dari hasil penelitian akan diuraikan secara bertahap yaitu :

- a. Pengaruh PKL terhadap pembukaan lapangan kerja
- b. Pelayanan terhadap kebutuhan sehari-hari
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
- d. Menyumbang retribusi (PAD) pada Pemerintah Kota.
- e. Adanya inovasi manajemen usaha kecil

4.5.1.1. Pengaruh PKL terhadap pembukaan lapangan kerja

Krisis ekonomi yang melanda negara ini sangat dirasakan oleh masyarakat kecil. PKL yang merupakan salah satu usaha informal menjanjikan perbaikan kondisi ekonomi rakyat kecil. PKL dirasakan oleh masyarakat kecil bisa dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tanpa menggantungkan dirinya pada orang lain dan jenis usaha mereka sesuai dengan kebiasaan dan keahlian mereka masing-masing. Kemerosotan dan krisis ekonomi juga melanda kota kecil sekitar Semarang, hal ini menyebabkan adanya migrasi penduduk untuk membuka usaha di kota Semarang.

Pengkajian daerah asal PKL dimaksudkan untuk dapat mengetahui siapa sebetulnya yang menjadi PKL. Pengalaman negara-negara berkembang menunjukkan bahwa umumnya PKL terdiri dari para migran (Manning dan Effendi, 1985).

Kecenderungan tersebut juga dapat dilihat pada PKL yang menjadi responden pada penelitian ini. Ditemukan 57 % dari responden PKL merupakan pendatang (migran) ke Kota Semarang.

Dari hasil penelitian ini didapatkan komposisi PKL berdasarkan daerah asalnya seperti yang terlihat pada tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4
Daerah Asal PKL Kawasan Simpang Lima

No	Daerah Asal Pedagang	Frekuensi	Persentase
1	Kota Semarang	9	30 %
2	Sekitar kota Semarang	15	51 %
3	Di luar Jawa Tengah	4	13 %
4	Lainnya	2	6,7 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber : Data Primer, 2004

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa para PKL sebagian statusnya sebagai pendatang dari luar Semarang, yaitu sebesar 51 %. Asal daerah PKL terbanyak dari kota sekita Semarang antara lain dari Demak, Grobogan, Pati, Pekalongan, Salatiga, Ungaran. Sedangkan PKL yang berasal dari luar Jawa Tengah berasal dari : Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya serta dari luar Jawa dari Palembang, dll.

Menurut Mantra, (1985) faktor kesempatan kerja di kota merupakan faktor daya tarik positif yang menarik orang pedesaan untuk bermigrasi ke kota. Demikian juga menurut teori migrasi Todaro (Todaro 1994), keputusan untuk migrasi dari desa ke kota tergantung pada perbedaan pendapatan riil yang diharapkan antara pedesaan dan perkotaan daripada upah yang sebenarnya dan lebih terbukanya lapangan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam penelitian ini alasan mengapa mereka memilih kota Semarang sebagai tujuan migrasi adalah sebagian besar mereka menganggap di kota Semarang ada kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan kerja (66,6 %).

Tabel 4.5
Alasan Memilih Kota Semarang Sebagai Tujuan
PKL Kawasan Simpang Lima

No	Alasan Memilih Kota Semarang	Frekuensi	Persentase
1	Di kota Semarang ada kesempatan kerja	20	66,6 %
2	Ada family di kota Semarang	6	20 %
3	Jarak dari tempat asal cukup dekat	4	13,3 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber : Data Primer, 2004

Penelitian Sethuraman (1981) menyebutkan bahwa para migran dalam sektor informal ini kebanyakan sebagai penganggur sebelum mengadakan migrasi. Kecenderungan tersebut juga nampak dari hasil penelitian ini dimana sebanyak 28,9 % pendatang yang menjadi PKL adalah mereka yang semula sebagai penganggur (tidak bekerja), seperti terlihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
Pekerjaan Semula para PKL
PKL Kawasan Simpang Lima

No	Pekerjaan semula	Frekuensi	Persentase
1	Karyawan swasta	7	23 %
2	Buruh /pabrik	12	40 %
3	Pegawai Negeri	2	7 %
4	Tidak/belum bekerja	5	17 %
5	Lainnya	4	13 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber: Data Primer, 2004

Melihat tabel-tabel di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menarik PKL ke kota adalah faktor pekerjaan. Pada akhirnya tujuan mencari kerja berorientasi pada pencapaian penghasilan. Sethuraman (1981), mengatakan bahwa perpindahan penduduk ke kota banyak disebabkan oleh adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

yang terjadi pada awal tahun 1988 sampai dengan era 1990-an. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan sosial menyebabkan banyaknya industri yang melakukan pengurangan pegawai/buruh bahkan penutupan usaha, sehingga banyak buruh mencari pekerjaan di sektor lain. Karena hampir semua industri mengalami hal sama, maka lapangan kerja sektor industri menjadi tertutup kemungkinan. Sektor informal seperti PKL menjadi pilihan utama masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun harapan tersebut sering meleset dari kenyataan, tetapi setidaknya para PKL tersebut sudah mendapatkan pilihan yang lebih baik daripada pekerjaan di kota asalnya. Hal ini tercermin dengan adanya fasilitas yang terdapat di kota Semarang yang dianggap dapat menampung segala kegiatan dibandingkan keadaan di desa/kota asalnya.

Implikasi dari kecenderungan tersebut adalah terjadinya hubungan yang kuat antara PKL dengan situasi ekonomi. Dengan demikian, selagi masih terjadi PHK dan kecilnya kesempatan kerja maka potensi pertumbuhan PKL masih sangat besar dan menyebabkan sumber bagi muka-muka baru PKL.

Mengenai alasan responden termotivasi menjadi PKL, ada beberapa kemungkinan. Penelitian ini mencatat bahwa alasan menjadi PKL seperti pada tabel 4.7. berikut ini :

Tabel 4.7
Alasan menjadi PKL
Kawasan Simpang Lima

No	Alasan menjadi PKL	Frekuensi	Persentase
1	Karena dapat memberi hasil yg cukup	8	28 %
2	Karena sulit mendapat pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan/ketrampilan	8	28 %
3	Karena di PHK dari pekerjaan semula	10	33,3 %
4	Karena dapat berpindah-pindah dengan cepat	2	6,7 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber: Data Primer, 2004

Menurut hasil penelitian mengenai PKL di Kawasan Simpang Lima, sebagian besar PKL di kota Semarang berasal dari keluarga korban PHK (33,3 %) dari berbagai perusahaan swasta di Kota Semarang

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa responden merasa termotivasi menjadi PKL antara lain karena PHK dari pekerjaan semula. Bidang usaha PKL ini juga dapat mereka kerjakan sendiri atau dengan keluarga yang dapat memberikan pendapatan yang relatif cukup. Selain itu dari penelitian ini juga mencatat bahwa setelah menjadi PKL mereka menganggap bahwa usaha mereka merupakan pekerjaan tetap artinya bahwa menjadi PKL ini merupakan penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, yang merupakan pemenuhan kebutuhan tingkat pertama.

4.5.1.2. Pelayanan terhadap kebutuhan sehari-hari

Untuk mengetahui bentuk pelayanan yang dilakukan oleh PKL di Kawasan Simpang Lima, dapat dilihat dari pandangan konsumen yang menjadi pemakai jasa atau produk PKL tersebut.

Tabel 4.8.
Pelayanan PKL berdasarkan Jenis Usaha
Di Kawasan Simpang Lima

No	Jenis Usaha PKL	Frekuensi	Persentase
1	Kios Rokok	5	17 %
2	Bengkel	3	10 %
3	Makanan-minuman	13	43 %
4	Kios Baju	1	3 %
5	Kios Kelontong	6	20 %
6	Lainnya	2	7 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber: Data Primer, 2004

Dari data diatas terlihat bahwa jenis dagangan yang dijual PKL adalah bervariasi dimana konsumen mereka adalah warga sekitar yang membutuhkan pelayanan kebutuhan sehari-hari. Karena kebutuhan sehari-hari mereka tersedia di kawasan ini maka pelanggan akan terus mendatangi PKL di kawasan ini karena menurut konsumen menjadi sisi yang amat menguntungkan karena sekali bepergian semua kebutuhan sehari-hari mereka dapat diperoleh dengan lengkap.

4.5.1.3. Inovasi Manajemen usaha kecil

Dalam membahas permasalahan PKL, harus diketahui juga aspek ekonomi dan manajemen usaha mereka. Pada pembahasan manajemen PKL akan dibahas secara detail beberapa analisis yaitu :

4.6.1.3.1. Sarana Berusaha.

Dalam memulai suatu usaha seseorang harus memiliki sarana berusaha, yaitu tempat yang memadai. Pada penelitian ini PKL lebih memilih untuk berusaha

dengan kios/rombong atau tenda (57 %) dibandingkan dengan bangunan semi permanen atau lesehan, sebagaimana dalam tabel 4.9. berikut ini.

Tabel 4.9.
PKL berdasarkan Jenis Tempat Usaha
Di Kawasan Simpang Lima

No	Jenis Tempat Usaha PKL	Frekuensi	Persentase
1.	Permanen	0	0
2.	Semi Permanen	4	13 %
3.	Kios/Rombong/Tenda	17	57 %
4.	Lesehan	7	23 %
5.	Lainnya	1	4 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber: Data Primer, 2004

Dari data dapat dilihat bahwa PKL lebih memilih Kios/Rombong/Tenda yang relatif mudah diperoleh, mudah dibongkar pasang, murah harganya, dan lebih mudah untuk dipindahkan ke tempat lain. Yang lainnya memilih berjualan dengan lesehan, terutama PKL yang berjualan di Lapangan Pancasila dan depan Masjid Baiturrahman.

4.5.1.3.2. Kepemilikan tempat usaha

Pada sektor informal seperti PKL banyak mempergunakan ruang publik sebagai tempat usahanya. Tapi perlu diteliti tentang hubungan kepemilikan tempat usaha sebagaimana tabel 4.10. dibawah ini :

Tabel 4.10.
PKL berdasarkan Kepemilikan Tempat Usaha
Di Kawasan Simpang Lima

No	Jenis Tempat Usaha PKL	Frekuensi	Persentase
1	Pemilik	5	17 %
2	Penyewa	10	33 %
3	Menggunakan tanpa membayar	12	40 %
4	Membayar	3	10 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber: Data Primer, 2004

Dari tabel 4.10 di atas terlihat bahwa PKL terbanyak adalah pengguna tanpa membayar. Hal ini memperlihatkan gejala bahwa lebih banyak PKL mempergunakan lahan Pemerintah yang seharusnya untuk kepentingan umum dan pengguna lainnya tetapi dipakai untuk berdagang/berusaha. Disini tampak bahwa kesadaran hukum sangat rendah karena tidak mempedulikan kepemilikan ataupun status tanah yang dipakai untuk berusaha di Kawasan Simpang Lima. Selanjutnya PKL yang memperoleh tempat dengan menyewa antara Rp 100.000 sampai dengan Rp. 250.000 (40 %).

4.5.1.3.3. Jenis Usaha dan Modal Kerja

Jumlah PKL di kota Semarang menurut hasil pendataan UPD-PPKL kota Semarang tahun 2004 adalah sekitar 12.091 pedagang. Dari data tersebut jenis usaha yang terbanyak dilakukan oleh PKL adalah usaha makanan-minuman.

Adapun jenis kegiatan usaha PKL yang menjadi sampel pada lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut ini.

Tabel 4.11.
PKL berdasarkan Jenis Usaha
Di Kawasan Simpang Lima

No	Jenis Usaha PKL	Frekuensi	Persentase
1	Kios Rokok	5	17 %
2	Bengkel	3	10 %
3	Makanan-minuman	13	43 %
4	Kios Baju	1	3 %
5	Kios Kelontong	6	20 %
6	Lainnya	2	7 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber: Data Primer, 2004

Hal tersebut karena usaha tersebut merupakan usaha yang fleksibel ditinjau dari sudut modal, syarat ketrampilan, pemasaran serta kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan pengamatan di lapangan terlihat adanya pengelompokan PKL pada jenis dagangan tertentu, seperti misalnya jenis dagangan makanan/minuman serta kelontong.

Dari sebagian besar jawaban, baik melalui kajian terhadap jawaban atas kuesioner maupun hasil wawancara terhadap para PKL yang menjadi responden penelitian, sebagian besar menyatakan bahwa kurangnya modal usaha adalah salah satu permasalahan penting yang mereka alami. Kurangnya modal usaha ini disebabkan oleh tidak adanya akses bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman atau kredit yang dapat mereka peroleh.

Sarana permodalan merupakan kebutuhan utama bagi PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik pada saat awal memulai usaha atau pada saat pengembangan usaha. Modal awal berfungsi dalam pembelian peralatan, seperti tempat dasaran, peralatannya dan biaya awal lainnya. Selanjutnya, modal kerja diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha seperti pembelian bahan/barang dagangan dan barang-barang dan biaya lainnya.

Besar modal awal yang dimiliki oleh PKL bervariasi dari Rp. 50.000,- sampai dengan diatas Rp. 1.000.000,- dengan perincian sebagai tersebut pada, tabel 4.12. di bawah ini:

Tabel 4.12
Besar Modal PKL Di Kawasan Simpang Lima

No	Besar Modal (Rupiah)	Frekuensi	Persentase
1	< 100.000	8	27 %
2	101.000 - < 500.000	12	40 %
3	501.000 - > 1.000.000	6	20 %
4	> 1.000.000	4	13 %
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Primer, 2004

Dari tabel di atas, dapat dilihat besarnya modal awal para PKL tersebut kebanyakan sebesar antara Rp. 101.000,- sampai Rp. 500.000,-

Pemilikan modal awal kurang dari Rp. 500.000,- umumnya dimiliki oleh pedagang non-makanan, seperti rokok, kelontong, barang bekas. Bila ada yang tergolong pedagang makan/minuman tetapi hanya sebatas penyediaan minuman saia.

Pemilikan modal awal lebih besar Rp. 500.000,- umumnya dimiliki oleh PKL yang berdagang makanan/minuman (warung makan) yang membutuhkan peralatan-peralatan cukup banyak.

Rendahnya modal ini sesuai dengan salah satu ciri-ciri PKL dimana rendahnya modal tersebut antara lain disebabkan kurangnya akses PKL terhadap lembaga-lembaga keuangan formal terutama perbankan. Hal tersebut dikarenakan : (1) tidak dimilikinya agunan dari PKL; (2) fasilitas modal/kredit yang disediakan cenderung menguntungkan pedagang berskala kuat, walaupun ada paket kredit yang diperuntukkan bagi pedagang kecil belum menyentuh ke PKL; (3) belum adanya "lembaga penjamin dengan sistem kemitraan" dari yang kuat kepada PKL, karena dianggap skala usaha mereka terlalu kecil dan bersifat labil (Firadusy, 1994).

Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh para PKL pada umumnya adalah sumber modal usaha mereka tidak terkait dengan sumber-sumber peminjaman modal yang resmi yang ditawarkan oleh sistem kredit perbankan atau badan peminjaman keuangan resmi lainnya. Sumber-sumber modal para pedagang kaki lima biasanya dari kalangan mereka sendiri. Dengan kata lain, sumber-sumber tersebut berasal dari "badan-badan" keuangan yang "non-formal". Karakteristik tersebut ternyata juga dimiliki oleh bagian besar para PKL di kota Semarang.

4.5.1.4. Penyumbang pendapatan bagi PAD Pemerintah Kota Semarang

Retribusi oleh Pemerintah kota dijadikan salah satu sumber PAD yang pada praktiknya sehari-hari diserahkan oleh Kelurahan sebagai salah satu dari 11 bidang yang di limpahkan (*breakdown*) oleh Walikota kepada Lurah dan Camat, sesuai dengan SK

Walikota tanggal 20 Agustus 2000 tentang pelimpahan sebagian tugas Walikota kepada Lurah dan Camat. Adapun target dan realisasi pendapatan dari sektor PKL adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Target dan Realisasi Retribusi PKL

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tahun 2000	506.000.000	482.000.000
2	Tahun 2001	1,3 M	1,1 M
3	Tahun 2002	1,5 M	1,3 M
4	Tahun 2003	1,7 M	1,5 M
5	Tahun 2004	1,8 M	Belum ada data

Sumber : UPD PKL, Dinas Pasar Kota Semarang, 2004

Dari data di atas cukup besar pula kontribusi PKL terhadap PAD Kota Semarang, tapi apakah PKL juga menerima manfaat dan kontribusi dari PKL misalnya pengembangan usahanya. Untuk mengetahui berapa retribusi dan bagaimana penarikan retribusi dilakukan . Sebagaimana tabel 4. 13 berikut ini.

Tabel 4.13.
PKL yang membayar retribusi
Di Kawasan Simpang Lima

No	Pendapat	Frekuensi	Persentase
1	Ya.	28	94 %
2	Kadang-kadang	1	3 %
3	Tidak	1	3 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber : Data primer, 2004

Tabel 4.14.
 Besar Retribusi setiap hari
 Di Kawasan Simpang Lima

No	Pendapat	Frekuensi	Persentase
1	< Rp. 500	6	20 %
2	Rp. 500 – Rp. 1000	16	53 %
3	Rp. 1000 – Rp. 2500	5	17 %
4	Rp. 2500 – Rp. 5000	2	6 %
5	> Rp 5000	1	3 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data primer, 2004

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kawasan Simpang Lima merupakan penghasil PAD yang cukup besar. Sehingga seharusnya Pemerintah Kota memperhatikan PKL di kawasan ini misalnya pemberian modal, penataan dengan tenda atau kios dengan baik, atau pemberian pelatihan manajemen usaha kecil atau pelatihan ketrampilan bagi PKL. Hal ini akan dapat memotivasi PKL untuk berorientasi pada peningkatan kualitas diri sendiri, keluarga maupun lingkungannya.

Dan yang perlu dipikirkan oleh Pemerintah Kota adalah cara penarikan retribusi itu sendiri. Penarikan hendaknya dilakukan kepada PKL yang berada di tempat yang diijinkan, sedangkan di tempat yang dilarang, semestinya tidak dilakukan penarikan. Karena hal tersebut akan menjadi *boomerang* pada saat akan ada penertiban atau penataan ulang lokasi PKL itu sendiri.

4.5.2. Analisis mengenai dampak negatif karena adanya PKL di Kawasan

Simpang Lima.

Kegiatan PKL sebagai salah satu sektor informal selalu menimbulkan banyak sekali dampak negatif, baik itu secara fisik maupun secara sosial. Pada penelitian ini juga diteliti sejauh mana dampak negatif itu mempengaruhi kegiatan warga kota Semarang dan dampak negatif yang bagaimana yang dirasakan oleh warga kota Semarang. Untuk membahas dampak negatif yang ada akan dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Mengurangi kualitas lingkungan, misalnya :
 - Menurunkan kualitas estetika Kawasan Simpang Lima.
 - Menimbulkan Polusi Sampah
- b. Menempati ruang-ruang publik dan privat yang tidak tepat.

4.5.2.1. Mengurangi kualitas lingkungan

Salah satu aspek yang dibutuhkan oleh para PKL di dalam melakukan tindakan-tindakannya adalah pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Kualitas lingkungan sekitar tempat berjualan khususnya dan pemahaman lingkungan seluruh kawasan dimana PKL berjualan pada umumnya. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Herman Haeruman (1995) bahwa untuk mendapatkan kualitas lingkungan perkotaan yang lebih baik akan tergantung pada kepada 4 hal yaitu :

- a. Ketepatan alokasi ruang untuk setiap kegiatan pembangunan.
- b. Ketersediaan dan kemampuan kelembagaan dan proses pengelolaan lingkungan.

- c. Pengendalian kegiatan pembangunan yang mengarah kepada efisiensi penggunaan bahan dan pengendalian perencanaan dan perusakan fungsi .
- d. Tingkat peran serta masyarakat dan disiplin bermasyarakat kota.

Kualitas hidup bergantung dari derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan yang sehat. Kebutuhan dasar dimaksud adalah :

- b. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. Kebutuhan hidup hayati yang paling pokok yaitu kebutuhan untuk mendapatkan air, udara dan pangan dalam kuantitas dan mutu tertentu. Selain itu terdapat pula kebutuhan akan keamanan.
- c. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, yaitu kebutuhan akan estetika, perlindungan hukum yang adil, kebutuhan beragama, pendidikan, energi maupun lapangan pekerjaan .
- d. Kebutuhan dasar untuk memilih, dimana untuk dapat memilih harus ada keanekaragaman.

Kualitas lingkungan yang baik tidak hanya dilihat dari aspek fisik dan bio kimia saja, tetapi dipahami dengan cara mengkaitkan aspek-aspek psikologis dan sosio kultural masyarakat yang menghuni suatu lingkungan. Meskipun kualitas lingkungan sangat subyektif , terdapat pula unsur-unsur dasar kualitas lingkungan yang harus dijaga, terutama yang berkaitan dengan penyediaan air bersih, sanitasi dan persampahan.

Pada penelitian ini pemahaman masalah lingkungan yang berkaitan dengan kualitas lingkungan di Kawasan Simpang Lima akan secara detail dibahas sebagai berikut:

- Air bersih, adalah prasarana pendukung yang dibutuhkan terutama oleh para pedagang kaki lima untuk mendukung kegiatan pembersihan dan penyediaan makanan dan minuman. Bagi para pedagang kaki lima yang berkecimpung di dalam bidang penyediaan makanan dan minuman, seperti warung-warung makan, air bersih merupakan prasarana mutlak yang dibutuhkan mereka.
- Listrik, adalah prasarana pendukung yang dibutuhkan terutama oleh para pedagang kaki lima untuk mendukung tersedianya tenaga listrik untuk menghidupkan berbagai peralatan yang membutuhkan tenaga listrik tersebut. Secara khusus, listrik biasanya dibutuhkan untuk penerangan oleh seluruh pedagang kaki lima yang menjalankan kegiatannya pada malam hari. Beberapa jenis pedagang kaki lima, seperti reparasi peralatan elektronik amat membutuhkan tersedianya listrik tersebut.
- Pembuangan sampah, adalah prasarana pendukung yang dibutuhkan oleh hampir seluruh pedagang kaki lima, terutama pedagang kaki lima yang menghasilkan sampah dari hasil kegiatan yang dilakukannya. Mengingat bahwa kebersihan merupakan salah satu faktor yang dapat mendatangkan konsumen atau pembeli, maka sistem pembuangan sampah merupakan salah satu faktor yang mutlak diperhatikan di dalam pengembangan bidang pedagang kaki lima tersebut.
- Kebutuhan akan keindahan lingkungan berusaha PKL, keberhasilan berusaha PKL sebagian karena kebersihan tempat usaha. Kebersihan ini juga dibutuhkan bukan

hanya di dalam tempat usaha PKL tersebut, tetapi juga kebersihan disekitar tempat berjualannya.

- Penanganan Parkir, di kawasan Simpang Lima antara parkir dan PKL tidak dapat dipisahkan, hal ini disebabkan karena konsumen memarkir kendaraan sedekat mungkin dengan tujuan PKL. Hal ini sangat mengganggu pengguna lainnya, karena area parkir di kawasan Simpang Lima sudah banyak tersedia, hanya kesadaran konsumen/masyarakat yang perlu ditingkatkan. Adapun kantong parkir resmi yang dapat dipergunakan dan masih dapat menampung adalah parkir Eks SE (bagian depan dan tengah), parkir Citraland (Jl Seroja), Gedung parkir Plaza Simpang Lima, parkir Gajahmada Plaza dan parkir Masjid Baiturrahman. Tetapi banyak kantong-kantong parkir tidak resmi yang sangat mengganggu keindahan lingkungan kawasan terutama parker tersebut mengikuti adanya PKL di sekitar Kawasan Simpang Lima.

Berikut ini akan dikaji beberapa kondisi kebutuhan dan tersedianya prasarana pedagang kaki lima yang terdapat di Kota Semarang.

4.5.2.1.1. Kurangnya sarana air bersih

Sedangkan kebutuhan akan air bersih terutama dirasakan oleh para PKL yang membutuhkannya untuk berbagai keperluan kegiatannya seperti warung-warung makanan/minuman, tambal ban dan pedagang unggas. Sedangkan bagi PKL lainnya, kebutuhan air bersih bukan merupakan persyaratan mutlak. Adapun untuk memperoleh air sebagaimana tabel 4.15. di bawah ini :

Tabel 4.15
 Cara PKL mendapatkan Air Bersih
 Di Kawasan Simpang Lima

No	Asal Air bersih	Frekuensi	Persentase
1	Membeli dari penjual keliling	15	50 %
2	Air sumur penduduk	13	43 %
3	Air PDAM sekitar kawasan	1	3 %
4	Lainnya	1	3 %
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Primer, 2004

Dari tabel diatas tampak bahwa sarana air bersih di Kawasan Simpang Lima tidak tersedia dengan baik, karena sebagian PKL (50 %) mendapatkan air bersih dari membeli penjual air keliling. Sangat tidak layak apabila kawasan Simpang Lima seluas 1,08 Ha tidak tersedia fasilitas air bersih yang cukup. Untuk itu perlu direncanakan pengadaan air bersih khusus untuk pemenuhan kebutuhan kawasan.

4.5.2.1.2. Kurangnya Penanganan Sampah Kawasan

Sebagian besar PKL menyatakan bahwa mereka membutuhkan tempat pembuangan sampah yang secara rutin diambil oleh petugas kebersihan. Mereka telah menyadari sepenuhnya bahwa kebersihan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan konsumen atau pembeli mereka datang. Oleh karenanya, mereka sangat mengharapkan tersedianya sistem pembuangan sampah di lingkungan tempat bekerja.

Untuk lebih jelasnya, kondisi kebutuhan prasarana pendukung PKL di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini.

Tabel 4.16.
Penanganan Sampah PKL
Di Kawasan Simpang Lima

No	Jenis Penanganan Sampah PKL	Frekuensi	Persentase
1	Kontainer	10	33 %
2	Membuang Sendiri	7	23 %
3	Petugas pengambil sampah	7	23 %
4	Di selokan/saluran	6	21 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data primer, 2004

Dari tabel di atas, kesadaran PKL untuk membuang sampah sudah baik 79 % dari seluruh responden , tapi ada yang belum sadar membuang sampah di selokan sekitar 21 %, namun 21 % inilah yang perlu penanganan serius. Volume sampah yang tidak besar tapi apabila terakumulasi dalam kurun waktu tertentu, maka akan besar pula. Yang lebih bahaya adalah membuang di selokan yang ada, apalagi selokan di Kawasan Simpang Lima adalah selokan besar bawah tanah yang dipergunakan untuk membuang air dari Simpang Lima ke Pompa Air Kartini. Apabila saluran tersebut tersumbat sampah maka banjir akan terjadi di Simpang Lima maupun tempat/jalan yang dilalui saluran tersebut.

Hal ini terbukti pada awal tahun 2004 petugas Dinas Kebersihan bekerja sama dengan DPU membuka saluran tersebut dan membersihkan saluran tersebut, mendapatkan sampah 10 kontainer sampah.

4.5.2.2. Turunnya kualitas estetika Kawasan

Menurut Darmawan, Edi (2003) ada beberapa faktor yang mempengaruhi estetika wajah kota, yaitu :

- Persepsi pandangan adalah suatu fungsi mata yang menerima pesan-pesan dan diterjemahkan oleh otak menjadi bayangan. Persepsi pandangan ini dicapai dengan adanya skala dan warna. Skala sendiri dapat dicapai dari warna, karena warna juga dapat memberikan kesan skala ruang seperti luas-sempit, besar-kecil, tinggi-rendah, dsb
- Anthropometri, dengan ukuran-ukuran atau dimensi-dimensi yang manusiawi akan membentuk kesan kita terhadap suatu kota atau lingkungan.
- Stimulan atau gejala responsif, pemakaian jenis dan tekstur bahan akan mempengaruhi kesan kita untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu fasilitas kota.

Pada penelitian ini didapatkan bahwa PKL di kawasan Simpang Lima masih sebagian yang memahami tentang perlunya keindahan lingkungan, sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 4.17.
Persepsi PKL tentang keindahan lingkungan Tempat Usahanya
Di Kawasan Simpang Lima

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Ya, tahu	4	13 %
2	Ya, tapi tidak memperdulikan	23	77 %
3	Tidak tahu	2	7 %
4	Lainnya	1	3 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data primer, 2004

Sebagaimana dalam teori tentang kualitas lingkungan, yang mengatakan bahwa kualitas lingkungan dapat diperoleh apabila kebutuhan dasar seorang manusia sudah tercukupi maka faktor-faktor lainnya misalnya keindahan lingkungan maupun pemeliharaan lingkungan baru akan dipahami dan diimplementasikan secara baik.

Sebagaimana tabel 4.17 di atas, terlihat bahwa para PKL tahu bahwa keindahan lingkungan itu diperlukan, tetapi tidak peduli karena alasan belum memikirkan hal itu. Prioritas utama dari mereka adalah pemenuhan kebutuhan dasar mereka yaitu makan, sandang, perumahan dan biaya anak sekolah. Dari hasil tersebut kiranya harus ada pihak yang mengadakan sosialisasi bahwa menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan harus dilakukan saat ini juga, demi masa depan kota Semarang ini dan tidak memerlukan biaya banyak apabila dilakukan secara kontinue.

Dibawah ini juga penelitian mengenai persepsi PKL tentang bagaimana cara memelihara keindahan kawasan ini, sebagaimana dalam tabel 4.18 di bawah ini

Tabel 4.18.
Persepsi PKL Terhadap Cara Memelihara Lingkungan Tempat Usaha
Di Kawasan Simpang Lima

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Memelihara keindahan cat bangunan	10	33 %
2	Memelihara bangunan agar terlihat baik	10	33 %
3	Memberi tanaman supaya terlihat indah	7	24 %
4	Lainnya	3	10 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber : Data primer, 2004

Melihat hasil persepsi responden terhadap cara memelihara keindahan

lingkungan, terbukti bahwa secara manusiawi mereka membutuhkan dan mengerti akan keindahan. Sebagian mereka berpendapat bahwa memelihara cat bangunan dan fisik bangunan itu sendiri adalah paling penting. Mereka menganggap keindahan hanya diwujudkan pada bangunan yang terawat dan indah. Keindahan dengan memberikan tanaman hias agar terlihat asri masih belum di mengerti dengan baik, karena menurut mereka membutuhkan pemeliharaan yang khusus karena iklim kota Semarang tidak memungkinkan.

4.6. Persepsi Konsumen tentang keberadaan PKL di Kawasan Simpang Lima

4.6.1. Karakteristik Konsumen

Persepsi konsumen dan harapan konsumen terhadap keberadaan PKL di kawasan ini sebagaimana hasil penelitian berikut.

Konsumen (pembeli) produk atau jasa Pedagang Kaki Lima menurut penelitian Dewan Riset Nasional (Firdausy, 1994), adalah kebanyakan hanya dinikmati oleh golongan yang berpendapatan menengah ke bawah. Dari penelitian ini ditunjukkan karakteristik konsumen dilihat dari tipe sarana transportasi yang digunakan oleh konsumen seperti pada tabel 4.8. berikut ini.

Tabel 4.8.
Karakteristik Konsumen
PKL Kawasan Simpang Lima

No	Tipe Konsumen	Frekuensi	Persentase
1	Jalan Kaki	5	17 %
2	Naik becak	2	7 %
3	Naik Angkutan Kota	6	20 %
4	Sepeda Motor	13	43 %
5	Bermobil	3	10 %
6	Lainnya	1	3 %
	Jumlah	30	100,0 %

Sumber : Data Primer, 2004

Dilihat dari tabel di atas, konsumen yang berjalan kaki dan naik becak adalah sebanyak (43 %). Disini dapat diartikan bahwa kebanyakan konsumen PKL masyarakat di sekitar (dekat) dengan lokasi PKL. Tapi terbanyak adalah konsumen yang mempergunakan kendaraan bermotor, hal ini menunjukkan bahwa pengunjung bukan hanya dari sekitar Kawasan Simpang Lima, tapi juga seluruh kota Semarang yang mempunyai kepentingan berkunjung di Kawasan Simpang Lima. Dari temuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kawasan Simpang Lima adalah tempat yang paling dituju atau menjadi tujuan utama konsumen di kota Semarang, hal ini karena selain PKL yang ada Kawasan Simpang Lima juga ada tempat-tempat lain yang menyediakan berbagai kebutuhan warga, baik itu kebutuhan makan dan minum, kebutuhan barang elektronik, kebutuhan rekreasi dan sebagainya.

Salah satu faktor daya tarik konsumen untuk mengunjungi suatu kawasan perdagangan menurut Nelson (1958) adalah adanya kemudahan sarana dari prasarana transportasi, baik transportasi umum maupun transportasi pribadi. Dalam penelitian ini mencatat, bahwa menurut persepsi responden terhadap kemudahan memperoleh

angkutan kota 77,1 % menjawab bahwa angkutan kota untuk menuju lokasi PKL adalah mudah, 17,1 % agak sulit dan 6,7 % menjawab sulit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada kaitan yang erat antara lokasi PKL dan jaringan transportasi. PKL kebanyakan tumbuh pesat di sepanjang jalan besar dan memerlukan jalur untuk melayani penduduk. Semua ini kebanyakan terdapat di pusat kota, tetapi kurang di pinggiran kota.

Keberadaan PKL yang biasanya berjualan di tempat-tempat strategis memberikan pengaruh positif dan negatif. Ditinjau dari sisi positif, keberadaan PKL dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah, misalnya tanggapan konsumen terhadap manfaat keberadaan PKL adalah konsumen merasa mudah mencari makan (31,4 %), mudah mencari kebutuhan sehari-hari (40 %), dan harga murah (25,7 %).

PKL yang berjualan makanan/minuman yang dekat dengan perkantoran akan sangat membantu sekali bagi para karyawan, dimana mereka akan mudah untuk mencari makan siang. Lebih-lebih instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja dimana karyawan baru pulang sore hari, kiranya keberadaan PKL yang ada di sekitarnya sangat dirasakan manfaatnya.

4.6.2. Persepsi Konsumen Terhadap Penataan Ulang Lokasi PKL

Pendapat konsumen terhadap upaya pengaturan (penataan ulang) lokasi PKL mendapat tanggapan positif. Dari 30 responden yang setuju dengan penataan ulang

adalah 62,9 % dan yang tidak setuju 37,1 %. Sedangkan bagaimana bentuk penataan ulang yang diinginkan oleh konsumen yang setuju ditata ulang adalah sebagai berikut:

- Dipindah ke lokasi sekitar kawasan Simpang Lima dan mengelompokkan usaha sejenis (60,8 %)
- Lokasi masih pada tempat semula, cukup ditertibkan dan dirapikan serta dikelompokkan sesuai jenis dagangannya (13,8 %),
- Lokasi masih pada tempat semula, cukup ditertibkan dan dirapikan (16,4 %),
- Lainnya (4,5 %)

Persepsi konsumen mengenai penataan ulang lokasi terdapat kecenderungan yang sama dengan pihak PKL. Sebagian besar PKL maupun konsumen mendukung adanya penataan lokasi PKL yaitu dengan merapikan dan menertibkan lokasi dan mengelompokkan usaha sejenis, namun tetap pada lokasi yang ada saat ini. Penataan lokasi dalam bentuk pemindahan (relokasi) bagi PKL terdapat kecenderungan untuk menolak, untuk konsumen terdapat kecenderungan untuk mendukung.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penataan terhadap keberadaan PKL, adalah suatu kebutuhan semua pihak termasuk bagi para PKL sendiri. Bagi para konsumen keberadaan PKL memang dibutuhkan, namun mereka juga menginginkan lingkungan yang bersih, tertib dan rapi sehingga mereka dapat menikmati suasana yang nyaman. Selain dari itu, bentuk penataan lokasi baik menurut PKL maupun menurut konsumen mengarah kepada bentuk pengelompokan menurut jenis dagangan, hal ini bagi konsumen menyangkut luasnya pilihan dan mudah untuk mendapatkan barang yang

akan dibeli. Disini terlihat bahwa jenis dagangan PKL merupakan faktor yang berpengaruh dalam penentuan lokasi baik ditinjau dari sisi PKL maupun konsumen.

PKL yang berjualan makanan/minuman yang dekat dengan perkantoran akan sangat membantu sekali bagi para karyawan, dimana mereka akan mudah untuk mencari makan siang. Lebih-lebih instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja dimana karyawan baru pulang sore hari, kiranya keberadaan PKL yang ada di sekitarnya sangat dirasakan manfaatnya.

Sedangkan pengaruh negatif dari keberadaan PKL terhadap lingkungannya menurut tanggapan konsumen adalah karena mengganggu lalu lintas (17,1%), mengganggu pejalan kaki (8,6 %), lingkungan kurang bersih dan tidak tertib (57,1%), mengganggu keamanan' (0 %), menghalangi pemandangan (8,6 %) dan lainnya (8,6 %).

Nampak bahwa pengaruh negatif adanya PKL menurut tanggapan konsumen yang terbanyak adalah bahwa keberadaan PKL menjadikan lingkungan kurang bersih dan tidak tertib. Kebanyakan PKL, yang masuk kategori ini berdasarkan pengamatan adalah PKL-PKL yang berjualan makanan/minuman (warung makan), dimana mereka membuang sampah dan sisa-sisa makanan pada pada selokan-selokan yang ada di dekat tempat jualannya. Disamping itu pemasangan tenda atau penutup tempat berdagang jauh dari kesan rapi.

Tempat berdagang para PKL di tempat-tempat strategis secara tidak langsung akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Hal ini karena banyak dari PKL yang berjualan di bahu jalan, disamping karena lalu lalang dari para pembeli. Namun

demikian adanya kemacetan lalu-lintas justru dimanfaatkan oleh para PKL untuk mempromosikan barang dagangan mereka.

4.7. KAJIAN RENCANA KOTA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

4.7.1. Persepsi PKL terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang

Pedagang Kaki Lima pada sebelum era krisis moneter diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Ada beberapa dasar hukum yang mendasari tindakan dari Pemerintah Kota yaitu :

- a. Undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
- b. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- c. Undang-undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
- e. Rencana Induk Kota Semarang 1975 – 2000, Bappeda Kodya Dati II Semarang
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota , BWK Pusat Kota 1992 – 2002, Bappeda Kotamadya Dati II Semarang.
- g. Perda No. 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Tempat Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Semarang.
- h. Perda No. 2 Tahun 1990 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Semarang.

- i. Surat Keputusan Walikota tanggal 18 Maret 1991 Nomor 511.3/367/1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lima (UPD-PPKL) Kotamadya Dati II Semarang.
- j. Surat Keputusan Walikota Nomor 511.2/368/1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Penetapan Lahan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang. Nomor 511-2/169/94 tanggal 2 Maret 1994 dan diperbaharui lagi dengan SK.
- k. Surat Keputusan Walikota Nomor 511.3/367/99 tanggal 6 Agustus 1999, yang isinya mengenai lokasi-lokasi yang diijinkan untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima. Sedangkan perubahan-perubahan pada SK tersebut menyangkut penambahan jumlah lokasi-lokasi yang diijinkan,

Pemahaman dan persepsi para PKL terhadap kebijakan yang ada, adalah sebagaimana tabel di bawah ini .

Tabel 4.18.

Persepsi PKL terhadap kebijakan Pemerintah

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Sudah baik	12	40 %
2	Belum baik	16	53 %
3	Tidak Tahu	2	7 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data primer, 2004

Dari hasil penelitian di atas PKL berpendapat bahwa mereka belum mendapatkan kebijakan yang baik dari pemerintah. Responden memperkirakan adanya ketidakadilan dalam memperlakukan PKL di Kawasan Simpang Lima dan juga disinyalir oleh mereka, lahan milik Pemerintah yang menurut mereka untuk kepentingan umum (termasuk PKL) dimiliki oleh pihak tertentu sehingga responden harus menyewa/membeli pada orang yang bukan berhak memperjual belikan/menyewakan. Dan responden berpendapat sekarang *pressure* terbesar bukan dari Pemerintah tapi dari pihak lain yang mempergunakan nama sebagai pengelola keamanan.

Berpijak dari keadaan sekarang dengan sebelum krismon apakah ada perbedaan dan di bidang apa perbedaan kebijakan tersebut dirasakan oleh para PKL. Sebagaimana tabel di bawah ini .

Tabel 4.18.

Adakah perbedaan kebijakan Pemerintah terhadap PKL

No	Pendapat	Frekuensi	Persentase
1	Ya, Ada perbedaan	21	70 %
2	Tidak ada perbedaan	6	20 %
3	Tidak tahu	3	10 %
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data primer, 2004

Tabel 4.19.
Perbedaan Kebijakan Pemerintah

No	Pendapat	Frekuensi	Persentase
1	Lokasi berjualan	10	33 %
2	Bentuk fisik PKL	2	7 %
3	Perijinan	2	7 %
4	Jenis Usaha	5	15 %
5	Kelonggaran waktu	8	28 %
6	Lainnya	3	10 %
	Jumlah	30	100 %

Sumber : Data primer, 2004

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada perbedaan kebijakan Pemerintah terhadap PKL (70 %). Perbedaan terbesar ada pada kebijakan tentang lokasi berjualan, dahulu berjualan bebas tidak harus di tempat yang ditentukan dan tidak boleh di Lapangan Pancasila. Tetapi sekarang bebas berjualan di sembarang tempat sesuai dengan keinginan PKL dan berkesan *lost of the control*.

Yang paling menonjol perbedaan kebijakan adalah kelonggaran waktu berjualan, hal ini terjadi sejak awal tahun 2000 memberikan keleluasaan waktu untuk berusaha di Kawasan Simpang Lima. Kebijaksanaan Walikota ini secara *sporadic* memacu keinginan warga kota Semarang mendirikan usaha PKL di setiap sudut kawasan Simpang Lima. Dari segi ekonomi sangatlah baik, tetapi dari segi kebersihan,

lingkungan, tata ruang , estetika kota, ketertiban lalu lintas dan sebagainya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang terbaik harus ditetapkan adalah pengaturan jam berjualan dengan alat/tempat kerja yang segera dibersihkan dari tempat berjualan di Kawasan Simpang Lima untuk dipindahkan di tempat yang tidak mengganggu lingkungan dan keindahan.

4.7.3. Kebijakan Pengaturan Ruang Pedagang Kaki Lima

Walikota Semarang sebagai Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk merencanakan dan menyelenggarakan hal-hal yang dianggap perlu dan penting demi pengembangan kota. Pedoman pengaturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 tentang Pengaturan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986, pengertian PKL adalah mereka yang di dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan/trotoar, tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Selanjutnya dalam penjelasan umumnya, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 menyebutkan bahwa:

- Adanya PKL adalah suatu kenyataan maka Pemerintah Daerah menaruh perhatian untuk menampung usaha tersebut serta memberikan pembinaan usahanya
- Pengaturan PKL dimaksudkan untuk memberikan jaminan tempat usaha yang layak bagi usahanya dan perekonomian daerah
- Pemerintah Daerah memberikan perhatian, bimbingan, dan pembinaan kepada golongan ekonomi lemah agar PKL dapat berkembang dan dalam jangka waktu tertentu mampu berpindah ke toko-toko/pasar-pasar sehingga PKL tidak tumbuh dan berkembang secara liar
- Mengingat tempat-tempat untuk berdagang yang ditunjuk untuk PKL tersebut adalah bidang tanah yang sudah mempunyai fungsi tertentu menurut perencanaan kota maka perlu diatur dengan jam-jam tertentu dengan bangunan tidak permanen sehingga akan tercipta kota yang aman tertib, lancar, dan sehat.

Penunjukan lokasi tempat-tempat usaha PKL menurut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 adalah meliputi lokasi milik, dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah maupun swasta. Untuk yang dikuasai swasta harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Penunjukan pengaturan lokasi ditetapkan oleh Walikota.

Tempat Usaha menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tersebut dikelompokkan dalam 3 tipe sebagai berikut:

- Tipe A dengan luas lebih dari 5 M² dengan batas maksimum 40 M²;
- Tipe B dengan luas lebih dari 3 M² sampai dengan 5 M²

- Tipe C dengan luas $3M^2$ ke bawah.

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Daerah disebutkan bahwa pada tempat-tempat yang telah diberi ijin, di atasnya tidak boleh didirikan bangunan semi permanen/permanen dan disebutkan pula, bahwa ijin tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.

Pembinaan PKL merupakan kewajiban Pemerintah Daerah beserta lembaga/instansi yang terkait (diatur dalam Pasal 8), yaitu antara lain menyangkut kewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan cara-cara berusaha pada Pedagang Kaki Lima. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dan diatur oleh Walikota (Pasal 10).

Pengaturan PKL tersebut di atas dilengkapi dengan ancaman sanksi. Sanksi yang diatur di dalam pada Pasal 9 Peraturan Daerah tersebut yaitu; pelanggaran terhadap larangan melakukan kegiatan di luar lokasi yang ditunjuk; pelanggaran terhadap tanggung jawab keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usaha; pelanggaran karena mendirikan bangunan semi permanen/permanen; dan pelanggaran terhadap pengenaan retribusi.

Terhadap pelanggaran ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya enam (6) bulan atau denda Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Di samping hukuman tersebut di atas, pelanggar dapat dikenakan sanksi pembongkaran oleh Walikota.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 tersebut, Walikota dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1991 Nomor

511.3/367/1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lima (UPD-PPKL) Kotamadya Dati II Semarang membentuk lembaga pelaksana yang khusus melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah PKL. Kemudian yang berkaitan dengan masalah tempat usaha PKL, Walikota telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lahan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Semarang, berturut-turut adalah SK. Nomor 511.2/368/1991 tanggal 18 Maret 1991, kemudian diperbaharui dengan SK. Nomor 511-2/169/94 tanggal 2 Maret 1994 dan diperbaharui lagi dengan SK. Nomor 511.3/367/99 tanggal 6 Agustus 1999, yang isinya mengenai lokasi-lokasi yang diijinkan untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima. Sedangkan perubahan-perubahan pada SK tersebut menyangkut penambahan jumlah lokasi-lokasi yang diijinkan,

Keberadaan PKL di Kota Semarang sebagai pengguna ruang publik tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas lingkungan yang ditempati. Pada pasal 3 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 tahun 1986 disebutkan bahwa setiap PKL yang menggunakan tempat usaha bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan menjaga kesehatan lingkungan di sekitar tempat usaha yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Pasal 4 disebutkan bahwa penunjukan/penetapan tempat-tempat usaha diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan fasilitas prasarana yang ada, tempat ibadah, dan tempat kepentingan umum lainnya. Pada Pasal 6 Peraturan Daerah yang sama juga mengatur tentang larangan mendirikan bangunan semi permanen/permanen.

Permasalahan PKL yang menyangkut lingkungan ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Pada Pasal 3 ayat (5) mengatur kewajiban PKL, yaitu setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan dijinjing, dipikul, didorong, atau PKL, wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

Sesuai ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut PKL mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu:

- PKL mempunyai tanggung jawab berupa kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat mereka berjualan. Hal ini merupakan penghormatan atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi orang lain yang merupakan pengguna ruang publik dan hak lingkungan hidup itu sendiri untuk dijaga kelestarian fungsinya dan keindahan kota (estetika).
- Adanya larangan mendirikan bangunan semi permanen dan permanen bagi PKL.

Pada pengamatan di lapangan dijumpai banyak PKL yang tidak memperhatikan masalah kebersihan terutama pembuangan sampah dan adanya tenda-tenda yang tidak dibongkar pada waktu yang telah ditentukan, serta alat-alat seperti meja, kursi yang dibiarkan tergeletak begitu saja di trotoar atau pinggir jalan. Hal ini memberikan gambaran rendahnya perilaku kepedulian PKL terhadap kebersihan lingkungan dan keindahan kota. Perilaku semacam ini tidak terlepas dari kondisi internal dari PKL

sendiri, yaitu mereka menjadi PKL karena desakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kurang memperhatikan lingkungan. Dalam kaitan ini menurut Suparmoko (1994) yang mengatakan bahwa karena kemiskinan, seseorang cenderung untuk memikirkan kebutuhan yang paling mendesak (segera) dan untuk kebutuhan hidupnya sendiri.

Pemerintah Kotamadya Semarang dalam usahanya mengatasi masalah Pedagang Kaki Lima telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengaturan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Adapun di dalam Perda tersebut yang berkaitan dengan materi bahasan adalah pasal-pasal 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagai berikut :

- Pasal 2 dan Pasal 3, berisi pengaturan tempat usaha,
 - Lokasi penempatan tempat-tempat usaha Pedagang Kaki lima meliputi lokasi milik Pemerintah maupun swasta dan penetapan lokasi ini harus disetujui oleh yang bersangkutan.
 - Area tempat usaha dikelompokkan dalam 3 tipe sebagai berikut:
 - Tipe A, dengan luas lebih dari 5 m² dengan batas maksimum 40 m²; Tipe B dengan luas lebih dari 3 m² sampai 5 m²; Tipe C dengan luas 3 m² ke bawah.
 - Pedagang Kaki Lima dilarang beraktivitas di luar lokasi yang telah ditentukan.
 - Setiap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan tempat usaha, diwajibkan bertanggungjawab akan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan menjaga kesehatan lingkungan sekitar tempat usaha.

- Pasal 5 dan Pasal 6, berisi tentang perijinan,
 - Untuk dapat mempergunakan tempat usaha yang telah ditetapkan, setiap Pedagang Kaki Lima harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah.
 - Ijin berusaha pada suatu tempat diberikan dalam jangka waktu tertentu.
 - Pada tempat-tempat usaha yang telah diberi ijin, tidak diperbolehkan mendirikan bangunan semipermanen maupun permanen.
 - Ijin tempat usaha tidak boleh dipindahtangankan.
- Pasal 8, peraturan pembinaan,
 - Para Pedagang Kaki Lima berhak mendapat bimbingan dan penyuluhan cara-cara berusaha untuk dapat mengembangkan usahanya. Pembinaan dan penyuluhan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Adapun pedoman untuk penatan dan pelaksanaan fisik kota Semarang diatur dalam peraturan -peraturan sebagai berikut.

- Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 1981 Tentang Rencana Induk Kota Tahun 1975-2000 dan
- Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 1990 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 1981 Tentang Rencana Induk Kota Tahun 1975-2000.

Dijelaskan dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 1990 bahwa pertumbuhan yang terjadi di kota Semarang meletakkan dasar kota Semarang sebagai kota yang berada dalam kedudukan tertinggi dalam lingkup Regional Jawa Tengah dan

menjadi pusat dan kutub pengembangan terutama dalam pembangunan daerah Jawa Tengah sebagai bagian Pembangunan Nasional.

Dengan demikian PKL sebagai salah satu bagian dari sektor informal sesuai dengan penjelasan Peraturan Daerah tersebut termasuk dalam salah satu masalah Kota Semarang, yaitu adanya penumpukan kegiatan di sekitar pusat komersial.

- Masalah PKL sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tersebut merupakan bagian dari Rencana Pusat-pusat Kegiatan Kota Semarang. Pusat-pusat Kegiatan Kota Semarang dibagi dalam 3 kelompok yaitu : Pusat Pemerintah dan Perkantoran Pemerintah, Pusat Perdagangan dan Pusat Kebudayaan.

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai masalah PKL sesuai dengan rekomendasi pada penjelasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tersebut dan dengan memperhatikan perkembangan dan situasi yang ada, Pemerintah Kota menerbitkan Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan PKL.

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang tahun 2000-2010 membuka peluang partisipasi warga, yaitu pada pasal 52 menyatakan bahwa desakan masyarakat dapat dijadikan pedoman untuk memindahkan atau mempertahankan sebuah peruntukan yang tidak sesuai dengan rencana detail yang telah ditetapkan. Dari pasal ini dapat dilihat bahwa apabila kegiatan yang ada pada suatu tempat mengganggu lingkungan maka dapat segera dicegah atau dipindahkan ke tempat lain sesuai peruntukan ruangnya.

4.7.4. Pembinaan PKL terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pembahasan bagian ini adalah merupakan intisari dari hasil wawancara (*interview*) yang diuraikan sebagai berikut :

4.7.4.1. Upaya Pembinaan

Upaya pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan melalui berbagai instansi dinas atau organisasi. Pada umumnya pembinaan dilakukan dengan bekerja sama dengan organisasi PPJ (Persatuan Pedagang dan Jasa).

Pertemuan rutin selalu diadakan antara pihak UPD-PPKL dengan para PKL dengan memanfaatkan acara bulanan yang diselenggarakan oleh para PKL di masing-masing lokasi, baik melalui jalur PPJ Tingkat Kota maupun Tingkat Rayon/Unit se Kota Semarang. Pembicaraan berkaitan dengan masalah kebersihan lingkungan lokasi dan masalah-masalah lain, yang penting yang terjadi tiap hari, juga membahas penetapan tempat jualan yang tentunya ingin menciptakan kota Semarang yang tertib, rapi dan bersih tetapi tetap mempertahankan keberadaan PKL.

Pertemuan rutin antara Dinas dengan organisasi PKL dilakukan tidak hanya pada tingkat kota, tetapi juga sampai pada tingkat rayon. Disamping itu dilakukan juga pembinaan perkoperasian yang dikelola oleh organisasi itu sendiri, juga penyuluhan tentang permodalan.

Pertemuan rutin ini tidak diikuti oleh semua PKL, namun demikian masing-masing PKL telah diwakili oleh rekan-rekannya yang bertindak selaku ketua

kelompok. Upaya pembinaan yang dilakukan terhadap PKL dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

- Pembinaan, terutama bagi PKL yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 dan SK Walikota mengenai penataan PKL di Kota Semarang. Pembinaan ini dilakukan oleh UPD-PPKL dan frekuensinya tidak tentu, bahkan dapat dikatakan setiap hari. Oleh karena setiap hari selalu terdapat PKL yang melanggar dan saat itu pula selain diperingatkan, biasanya petugas sekaligus memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada yang bersangkutan.
- Sarasehan, dilakukan oleh UPD-PPKL dan instansi terkait, PPJ dan wakil PKL. Sarasehan ini berlangsung paling tidak setahun 1 (satu) kali, atau bila ada permasalahan yang segera diselesaikan..
- Penataan
- dan relokasi.

Tindakan ini memang secara operasional dilaksanakan secara terpadu bersarna dengan instansi terkait, antara lain UPD-PPKL, Tibum, DLLAJR, dan PPJ.

Penataan atau relokasi dilakukan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota memerlukan lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kepentingan umum atau lainnya.

Dalam hal ini Pemerintah Kota mengambil kebijaksanaan yaitu :

- Mencarikan lokasi PKL yang baru sebagai pengganti lokasi yang lama tanpa dipungut biaya.

- Menyediakan angkutan transportasi untuk mengangkut dan memindahkan barang dagangan dan alat-alatnya termasuk membantu dalam membongkarnya tanpa dipungut biaya.

4.7.5.2. Hambatan-hambatan

- Hambatan yang dialami dalam pembinaan PKL, antara lain disebutkan yaitu; adanya kesadaran dari PKL yang masih rendah disebabkan oleh tuntutan akan kebutuhan mereka yang sangat dominan; terbatasnya dana APBD dalam menangani masalah pembinaan bagi PKL; banyaknya tempat-tempat usaha yang tidak sesuai penggunaannya, antara izin yang diberikan pihak Pemerintah Kota dengan pedagang yang menempati lokasi tersebut. Hal ini disebabkan banyaknya tempat usaha yang dijual oleh PKL dan para PKL yang sudah memiliki izin tempat usaha ini kemudian mencari lokasi yang tidak diijinkan (liar).
- PKL dikenal sebagai pedagang yang mempunyai mobilitas yang tinggi, baik mobilitas usaha maupun mobilitasi lokasi, seperti pedagang oprokan, dimana mereka datang dari desa yang membawa dagangan untuk dijual di sekitar pasar pada saat-saat tertentu saja, misalkan pagi hari atau sore hari, atau pada musim-musim tertentu jadi sifatnya tidak menetap atau sering berpindah. PKL yang tidak menetap inilah yang sulit pengaturannya, dan ini berkaitan pula dengan kesulitan penarikan retribusi. Pengaturan tempat yang telah ditetapkan kadang dilanggar dan ini sering dibiarkan, karena jika ditindak tegas, maka akibatnya penarikan retribusi akan turun,

di lain pihak bahwa Pemerintah Kota mentargetkan penerimaan retribusi yang tiap tahun selalu naik.

- Hambatan lain yang dihadapi Pemerintah Kota sehubungan dengan penarikan retribusi, meliputi target yang ditentukan Pemerintah Kota melampaui kapasitas yang dapat dicapai, adanya organisasi PKL yang juga memungut iuran, bahkan lebih banyak diikuti/dituruti oleh para PKL dalam pelunasannya, serta adanya oknum-oknum baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain yang kadangkala merusak aturan yang telah ditetapkan pihak Pemerintah Kota sendiri.

4.7.5.3. Fasilitas yang diberikan Pemerintah

Disamping fasilitas yang berupa lokasi-lokasi jualan yang diijinkan, Pemerintah Kota bekerjasama dengan instansi/lembaga lainnya telah memberikan bantuan akan sarana/prasarana berdagang, seperti gerobak-gerobak rokok, bak sampah serta bantuan modal, sebagai contoh pada tahun anggaran 1998/1999 Pemerintah Kota memberikan bantuan modal kepada 400 orang PKL masing-masing sebesar Rp. 100.000,-

Namun demikian pemberian fasilitas tersebut sering disalahgunakan misalnya fasilitas lokasi-lokasi jualan yang telah diijinkan, kadang PKL tidak mau menempatnya. Di lain pihak, ada daerah lokasi PKL yang telah mapan, namun oleh PKL tersebut tempat jualan diperjualbelikan.

4.7.5.5. Pemberian Izin Tempat Usaha

Disamping kesadaran yang masih rendah dari PKL Kawasan Simpang Lima dalam masalah perijinan, yang menjadi sulit di sini adalah disatu pihak PKL ingin selalu dekat dengan pembeli, dilain pihak Pemerintah menentukan daerah tersebut tidak boleh untuk berjualan karena mengganggu lalu lintas dan mengganggu keindahan kawasan. PKL yang demikian memang sulit dalam pengaturannya/penentuan lokasinya,

Akibat belum tertatanya lokasi-lokasi PKL tersebut menyebabkan Peraturan Daerah yang ada juga belum dapat dilaksanakan secara optimal.

4.8. ANALISIS PENGARUH POLA PERTUMBUHAN DAN PENANGANAN DAMPAK DENGAN PERENCANAAN LINGKUNGAN.

Dilihat dari pola pertumbuhan PKL yaitu campuran, maka dikhawatirkan akan terjadi penambahan jumlah PKL secara terus menerus dan tidak terkendali. Demikian pula untuk mengatasi dampak negatif dari adanya PKL di kawasan Simpang Lima, harus dilakukan perencanaan lingkungan yang cukup kompleks yaitu perencanaan penanganan secara fisik dan sosial. Dari segi perencanaan fisik seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota yang diharapkan membiayai sarana *infrastruktur* yang mendukung kelengkapan sarana fisik suatu lingkungan kawasan , seperti kawasan Simpang Lima.

Perencanaan lingkungan bagi PKL itu sendiri harus ditangani di kawasan Simpang Lima ditinjau dari ruang lingkup lingkungan termasuk lingkungan mikro (*micro environmental*). Adapun yang tergolong pada lingkungan mikro yaitu :

- a. Kualitas rumah
- b. Penyediaan air bersih
- c. Sanitasi makanan
- d. Pembuangan tinja
- e. Pembuangan sampah
- f. Pembuangan air kotor

Tetapi berbeda perencanaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam menangani lingkungan kawasan Simpang Lima. Karena kompleksitas suatu kawasan pusat kota maka ruang lingkup penanganannya adalah perencanaan lingkungan makro. Adapun yang dibahas pada Perencanaan lingkungan makro yaitu :

- a. Pencemaran lingkungan
- b. Tata ruang wilayah
- c. Radiasi lingkungan
- d. Kerusakan/kemerosotan kualitas lingkungan.

4.8.1. PENGARUH POLA PERTUMBUHAN PKL TERHADAP PERENCANAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN SIMPANG LIMA.

Sebagaimana diketahui pola pertumbuhan PKL di Kawasan Simpang Lima adalah pola campuran. Tindakan yang harus diambil dalam mengatasi pola seperti ini adalah dengan cara pembatasan jumlah PKL baru dan penataan PKL lama.

Untuk mengadakan pembatasan PKL baru, tugas tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah Kota yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Kelurahan setempat.

Masalah yang akan timbul dari kedua alternatif mengatasi masalah adalah aspek sosial akan muncul dengan berbagai gejala dan reaksi.

Guna meminimasi gejala dan reaksi negatif dari para PKL , dibutuhkan suatu pemrakarsa media komunikasi untuk memberi wadah komunikasi dua arah antara PKL sebagai pengguna usaha Kawasan Simpang Lima dan Pemerintah Kota Semarang sebagai pengambil kebijakan, selain itu dibutuhkan juga suara konsumen yang menjadi wakil dari suara masyarakat kota Semarang.

Masalah penanganan lingkungan PKL di Kawasan Simpang Lima menurut lingkup perencanaannya dapat ditangani sebagaimana penanganan lingkungan mikro, yaitu kualitas rumah/berjualannya, penyediaan air bersih, sanitasi makanan, pembuangan tinja, pembuangan sampah , dan pembuangan air kotor.

Kegiatan di atas apabila tidak diatur sebagaimana mestinya akan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan dengan indikator adanya dampak negatif yang terjadi yang mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di tempat tersebut.

4.8.2. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TERHADAP PERENCANAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN SIMPANG LIMA.

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menata lingkungan kawasan Simpang Lima mempergunakan perencanaan lingkungan makro (*makro environmental*). Hal-hal yang harus dimasukkan dalam perencanaan Kawasan Simpang Lima adalah :

- Tampilan fisik PKL dengan ukuran, desain, bahan dan warna yang sama.
- Menyediakan ruang terbuka dan ruang interaksi publik yang cukup .
- Pengaturan transportasi/lalu lintas
- Pengaturan parkir
- Menyediakan cukup taman/tanaman guna penyerapan gas polutan di Kawasan Simpang Lima.
- Mengatur penggunaan kendaraan bermotor dengan pembatasan emisi gas buangnya.

Dampak negatif yang diakibatkan kegiatan para PKL dapat diminimasi dengan beberapa metode:

a. Metoda Penataan Lokasi

Penataan lokasi PKL di Kawasan Simpang Lima diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana peruntukannya. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah

Kota dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

*** Relokasi/pemugaran**

Bentuk relokasi ini adalah pemugaran suatu lokasi, baik untuk dijadikan suatu bentuk fungsional baru yang berbeda maupun perbaikan kondisi yang telah ada.

*** Stabilisasi/pengaturan**

Stabilisasi dimaksudkan untuk penataan keberadaan sektor PKL pada suatu lokasi. Salah satu dari tindakan tersebut adalah pengaturan kembali sektor agar harmonis dan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan tempat mereka melakukan usahanya. Beberapa alternatif pengaturan dan penataan ruang bagi sektor PKL didasarkan pada pengalaman yang pernah diterapkan atau dilakukan pada berbagai kota di negara-negara Asia termasuk Indonesia, di antaranya adalah :

- Peruntukan dalam ruang terbuka (*open market*)
- Pembebasan/penutupan jalan-jalan tertentu
- Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan/trotoar
- Multifungsi ruang terbuka (taman, lapangan, dsb)
- Pemanfaatan ruang parkir pada waktu tertentu
- Pemanfaatan ruang parkir untuk penampungan aktifitas perdagangan pada waktu-waktu tertentu.

*** *Removal/* pemindahan**

Dimaksudkan untuk pemindahan PKL ke satu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Pemindahan ke lokasi tetap ini dapat berupa pasar resmi atau sebuah lokasi khusus yang ditetapkan sebagai lokasi PKL.

Adapun keputusan yang diambil ada kemungkinan berbeda setiap zona, karena keputusan yang diambil sangat kompleks, maka proses perencanaan dengan 7 tahapan hendaknya diikuti, mulai dari identifikasi masalah sampai akhirnya dapat memutuskan alternatif mana yang diambil untuk menangani masalah di Zona tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Penelitian tentang “ Pengaruh Pola Pertumbuhan PKL terhadap Perencanaan Lingkungan di Kawasan Simpang Lima, Semarang” telah diuraikan dan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

5.1.1. Pola Pertumbuhan PKL

Pola pertumbuhan PKL di kawasan Simpang Lima adalah pola campuran. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis tentang jenis tempat usaha, kedekatan lokasi dengan pusat keramaian, kemudahan memperoleh angkutan umum dan kondisi lokasi PKL di kawasan Simpang Lima. Pola ini terdiri dari kecenderungan pola pertumbuhan memanjang (*linier concentration*) dan terdapat juga pola pertumbuhan mengelompok (*focus agglomerations*). Pada pola pertumbuhan seperti ini di khawatirkan akan terjadi tidak terkendalinya pertumbuhan PKL, untuk itu diperlukan penanganan dengan kebijakan dari Pemerintah Kota Semarang. Upaya mengatasinya diperlukan perencanaan lingkungan yang berkelanjutan agar lingkungan di kawasan Simpang Lima tidak rusak dan turun kualitas estetikanya.

PKL adalah pilihan utama untuk mengatasi tertutupnya kesempatan kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PKL akan terus tumbuh apabila kesempatan kerja

pada sektor formal masih tertutup. Apabila ingin mengurangi PKL salah satu cara adalah membuka dan menciptakan lapangan kerja.

5.1.2. Dampak yang terjadi akibat adanya PKL

Sektor PKL terbukti mempunyai dampak positif dan negatif bagi warga kota Semarang. Dari berbagai aspek, peranan PKL terbukti potensial yaitu disamping dapat menciptakan lapangan kerja, mereka mampu memberikan pelayanan dengan harga murah, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat khususnya konsumen menengah kebawah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi. Namun demikian bagi masyarakat dampak negatif keberadaan PKL yang menonjol adalah lingkungan menjadi kurang bersih dan tidak tertib. Pemahaman PKL tentang lingkungan masih sangat kurang hal ini disebabkan mereka merasa belum memikirkan kepentingan tersebut, karena prioritas mereka masih pada pemenuhan kebutuhan dasar. Namun pengertian dan pemahaman mereka sudah baik, perlu sosialisasi dan motivasi terus menerus yang berkelanjutan.

Prasarana air bersih di kawasan Simpang Lima masih sangat buruk, hal ini dikarenakan fasilitas air bersih untuk PKL di Kawasan tersebut tidak tersedia. Hal ini perlu menjadi perhatian karena air untuk sebuah kawasan seluas 1,08 Ha ini sangat diperlukan.

Penanganan sampah di kawasan Simpang Lima mulai membaik, dan 79 % responden sudah memperlakukan sampah dengan semestinya, tetapi 21 % diantaranya

masih membuang sampah dari limbah usahanya di selokan/saluran air. Hal ini perlu segera ditangani karena akumulasi sampah di saluran akan berakibat fatal. Saluran di Kawasan Simpang Lima adalah saluran besar yang mempunyai akses ke Pompa Air Kartini. Saluran ini dibuat karena Kawasan Simpang Lima adalah daerah banjir dengan genangan cukup tinggi, saluran tersebut digunakan untuk mengatasi banjir tersebut. Apabila perilaku PKL masih buruk (membuang sampah di saluran) maka banjir akan terjadi di di Kawasan Simpang Lima dan tempat/jalan yang dilalui saluran.

Lokasi usaha yang ditempati PKL sebagian besar berijin (*legal*), tetapi sebagian besar mereka mempergunakah lahan milik Pemerintah yaitu ruang ruang public (*open Space*). Hal ini sangat tidak baik bagi unsur *estetis* dari suatu lingkungan kawasan. Dirampasnya ruang publik untuk kepentingan perseorangan sebagaimana PKL di Kawasan Simpang Lima dibutuhkan formulasi kebijakan yang tepat untuk mengatur PKL tersebut.

PKL di kawasan Simpang Lima sudah mengerti arti keindahan lingkungan , tetapi karena keterbatasan pendidikan, kemampuan dan pemahaman tentang keindahan dan lingkungan secara makro, maka perilaku mereka seakan-akan tidak peduli. Alasan yang dikemukakan adalah masalah ekonomi. Pendapatan mereka dari sektor usaha ini menurut mereka “hanya “ cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Yang perlu dilakukan adalah memberi pengertian bahwa keindahan lingkungan usahanya akan menaikkan pendapatan, kalau tempat terlihat kumuh dan kotor maka pembeli akan enggan membeli. Persepsi mereka di motivasi untuk melakukan kegiatan memperindah

tempat usaha dan sekitar tempat usaha mereka guna menakikan omzet penjualannya. Jadi pendekayan pemenuhan kebutuhan dapat menjadi sarana motivasi bagi PKL di Kawasan Simpang Lima, sambil memperbaiki keindahan kawasan secara tidak langsung.

5.1.3. Persepsi Konsumen terhadap keberadaan PKL di Kawasan Simpang Lima.

Pengunjung/konsumen di Kawasan Simpang Lima adalah warga sekitar Kawasan Simpang Lima dan warga kota Semarang diseluruh penjuru kota. Dari hasil penelitian ini Kawasan Simpang Lima masih menjadi magnet kota, dan tujuan warga masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan pekerjaan, maupun untuk sekedar rekreasi dengan keluarga. Hal penting yang dapat disimpulkan disini adalah Kawasan Simpang Lima adalah milik publik/warga kota Semarang, apabila milik masyarakat ini hanya di nikmati oleh perseorangan, maka warga sebagai pengguna akan kehilangan tempat berinteraksi dengan warga lainnya. Apabila hal ini terjadi maka dikhawatirkan Kawasan Simpang Lima akan berubah fungsinya.

Konsumen sebagai pengguna sebagian besar mereka sependapat bahwa keberadaan PKL perlu ditata ulang. Namun terdapat kecenderungan PKL untuk mempertahankan eksistensinya pada lokasi yang ada sekarang. Hal ini terlihat dari sebagian besar PKL memberi jawaban bahwa penataan ulang tersebut cukup ditertibkan dan dirapikan dengan lokasi tetap, bahkan pendapat ini juga mendapat dukungan dari konsumen. Baik PKL maupun konsumen cenderung menginginkan adanya

pengelompokan menurut jenis dagangannya. Tetapi banyak hal yang harus dilakukan agar PKL tidak mengganggu kepentingan umum terutama ketertiban lalu lintas dan lingkungan. Konsumen selaku pengguna sangat mengharapkan penataan ulang PKL dengan cara-cara yang manusiawi tanpa merusak lingkungan kawasan Simpang Lima.

Penataan yang diharapkan konsumen dengan cara:

- a. pengelompokan jenis dagangan,
- b. penyeragaman bentuk,
- c. penyeragaman warna tempat berjualan,
- d. pemeliharaan tempat berjualan,
- e. pemeliharaan lingkungan sekitar tempat berjualan,
- f. penyeragaman waktu berjualan,
- g. peningkatan kualitas SDM PKL dengan pelatihan.

5.1.4. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota tentang PKL di Kawasan Simpang Lima.

Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang berupa lokasi-lokasi jualan yang diijinkan, Pemerintah Kota bekerjasama dengan instansi/lembaga lainnya telah memberikan bantuan akan sarana/prasarana berdagang, seperti gerobak-gerobak rokok, bak sampah serta bantuan modal, sebagai contoh pada tahun anggaran 1998/1999 Pemerintah Kota memberikan bantuan modal kepada 400 orang PKL masing-masing sebesar Rp. 100.000,-.

Upaya pembinaan yang dilakukan terhadap PKL dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

- Pembinaan, terutama bagi PKL yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1986 dan SK Walikota mengenai penataan PKL di Kota Semarang.
- Sarasehan, dilakukan oleh UPD-PPKL dan instansi terkait, PPJ dan wakil PKL. Sarasehan ini berlangsung paling tidak setahun 1 (satu) kali, atau bila ada permasalahan yang segera diselesaikan..
- Penataan
- dan relokasi.

Tindakan ini memang secara operasional dilaksanakan secara terpadu bersama dengan instansi terkait, antara lain UPD-PPKL, Tibum, DLLAJR, dan PPJ.

Penataan atau relokasi dilakukan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota memerlukan lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kepentingan umum atau lainnya. Dalam hal ini Pemerintah Kota mengambil kebijaksanaan yaitu :

- Mencarikan lokasi PKL yang baru
- Menyediakan angkutan transportasi untuk mengangkut
- Memindahkan barang dagangan dan alat-alatnya.

Namun demikian pemberian fasilitas tersebut sering disalahgunakan misalnya fasilitas lokasi-lokasi jualan yang telah diijinkan, kadang PKL tidak mau menempatinnya. Di lain pihak, ada daerah lokasi PKL yang telah mapan, namun oleh PKL tersebut tempat jualan diperjualbelikan.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan dan kajian yang telah dilakukan, maka dapat disusun rekomendasi bagi Perencanaan Lingkungan Kota di Kawasan Simpang Lima, yang dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang. Arah-an yang perlu disusun tersebut diantaranya adalah:

5.2.1. Perencanaan Lingkungan yang diambil guna mengatasi pola pertumbuhan

PKL di Kawasan Simpang Lima.

Karena pola pertumbuhannya PKL Kawasan Simpang Lima akan terjadi penambahan jumlah PKL secara terus menerus dan tidak terkendali maka dampak negatif dari adanya PKL di kawasan Simpang Lima semakin buruk. Perencanaan lingkungan yang harus diambil adalah penanganan secara fisik dan sosial. Dari segi perencanaan fisik seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota. Sedangkan perencanaan lingkungan bagi PKL itu sendiri harus ditangani oleh PKL itu sendiri, masyarakat LSM dan pengguna lainnya. Dengan perencanaan partisipatif tersebut PKL dapat dimotivasi dan dibentuk untuk mendukung lingkungan mikro (*micro environmental*). Tetapi perencanaan lingkungan kawasan Simpang Lima penanganannya adalah dengan perencanaan lingkungan makro (*macro environmental*).

5.2.1. Perencanaan Lingkungan yang diambil guna mengatasi dampak yang terjadi karena adanya PKL di Kawasan Simpang Lima.

Keberadaan PKL di kawasan Simpang Lima menimbulkan adanya tatanan dualistik baik dalam aspek fisik, aspek sosial, aspek ekonomi. Adapun salah satu kondisi dualistik aspek ekonomi adalah PKL yang tampil dengan tatanan fisik penuh kesederhanaan dan menempati ruang-ruang publik dalam ruang kota. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan pembangunan ruang kota belum ada upaya untuk mengantisipasi dan menyediakan ruang-ruang terpadu yang tepat dan memadai untuk lokasi PKL sesuai dengan perilakunya. Yang paling sesuai untuk digunakan untuk instrumen penataan fisik kegiatan sektor informal (PKL) adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota yang dilengkapi dengan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan.

Dalam melakukan perencanaan lingkungan kota, perencana hendaknya tidak hanya berkonotasi pada fisik semata. Tata ruang dan lingkungan hidup mengandung arti sangat luas, kecuali perencanaan fisik kota tetapi aspek manusia dengan segala kebutuhan dan perilakunya. Perencanaan kota sangat rumit dan pelik karena harus menyatukan tindakan sesuai dengan perkembangan penduduk, teknologi, kepentingan, sosial, budaya, ekonomi dan ekologi.

Pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola pertumbuhan, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

Komponen pengaturan penataan fisik sektor informal, antara lain meliputi :

- a. Lokasi
- b. Waktu berdagang
- c. Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan.

5.2.3. Kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Semarang.

Karena pola pertumbuhan dan dampak yang terjadi di Kawasan Simpang Lima maka tindakan yang harus dilakukan adalah pengendalian dengan penataan ruang yang sesuai dengan kondisi PKL dan juga harus disesuaikan dengan perencanaan lingkungan di kawasan Simpang Lima. Adapun usulan untuk Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi pola pertumbuhan PKL yang campuran serta cenderung tidak terkendali. Saran dari penelitian ini adalah :

- * Disusunnya suatu *Urban Environmental Planning Guide Lines* (Panduan Perencanaan Lingkungan Kota) yang berisi :

- ❖ Membuat perencanaan lingkungan bagi PKL di Kawasan Simpang Lima dengan pendekatan lingkungan mikro yaitu pendekatan ekologi dan partisipasi semua stake holders yang ikut terlibat di dalamnya dengan proses perencanaan *The seven steps of Planning* Perencanaan Lingkungan ini juga memungkinkan menata dan merencanakan lingkungan bersifat bottom up, dimana perencanaan lingkungan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dari dan untuk masyarakat.
- ❖ Membuat perencanaan lingkungan kawasan Simpang Lima dengan pendekatan lingkungan makro (*makro environmental*). Hal-hal yang harus dimasukkan dalam perencanaan kawasan Simpang Lima adalah :
 - Tampilan fisik PKL dengan ukuran, desain, bahan dan warna yang sama.
 - Menyediakan ruang terbuka dan ruang interaksi publik yang cukup .
 - Pengaturan transportasi
 - Pengaturan parkir
 - Menyediakan cukup tanaman guna penyerapan gas polutan di kawasan Simpang Lima.
 - Mengatur penggunaan kendaraan bermotor dengan batas tertentu emisi gas buangnya.

Adapun dampak negatif yang diakibatkan kegiatan para PKL dapat di minimasi dengan beberapa metode:

- * Metoda Penataan Lokasi
- * *Relokasi*/pemugaran
- * *Stabilisasi*/pengaturan
- * *Removal*/ pemindahan

Pada pertimbangan kualitas estetika lingkungan kawasan ada beberapa faktor yang mempengaruhi estetika wajah kota, yaitu :

- Persepsi pandangan masyarakat akan keindahan lingkungan kawasan yang dilihat secara visual.
- Adanya pendukung kegiatan lingkungan (*Activity Environmental Support*) Kegiatan pemeliharaan lingkungan timbul karena adanya kegiatan-kegiatan fungsional kota.

Pendukung kegiatan sebagai salah satu elemen dalam perencanaan kota, keberadaannya. tidak lepas dari tumbuhnya fungsi-fungsi kegiatan publik yang mendominasi penggunaan ruang fisik kota. Dengan kehadiran pendukung kegiatan ini, diharapkan kawasan kota ekologis dalam arti lebih hidup, lebih ramai, lebih segar, lebih nyaman dan lebih manusiawi, karena kawasan kota tidak dipandang hanya sebagai benda-benda atau bangunan mati saja, tetapi lebih dipandang sebagai interaksi kegiatan manusia sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

5.2.4. Usulan-usulan Penataan PKL dalam Perencanaan Kota di Kawasan

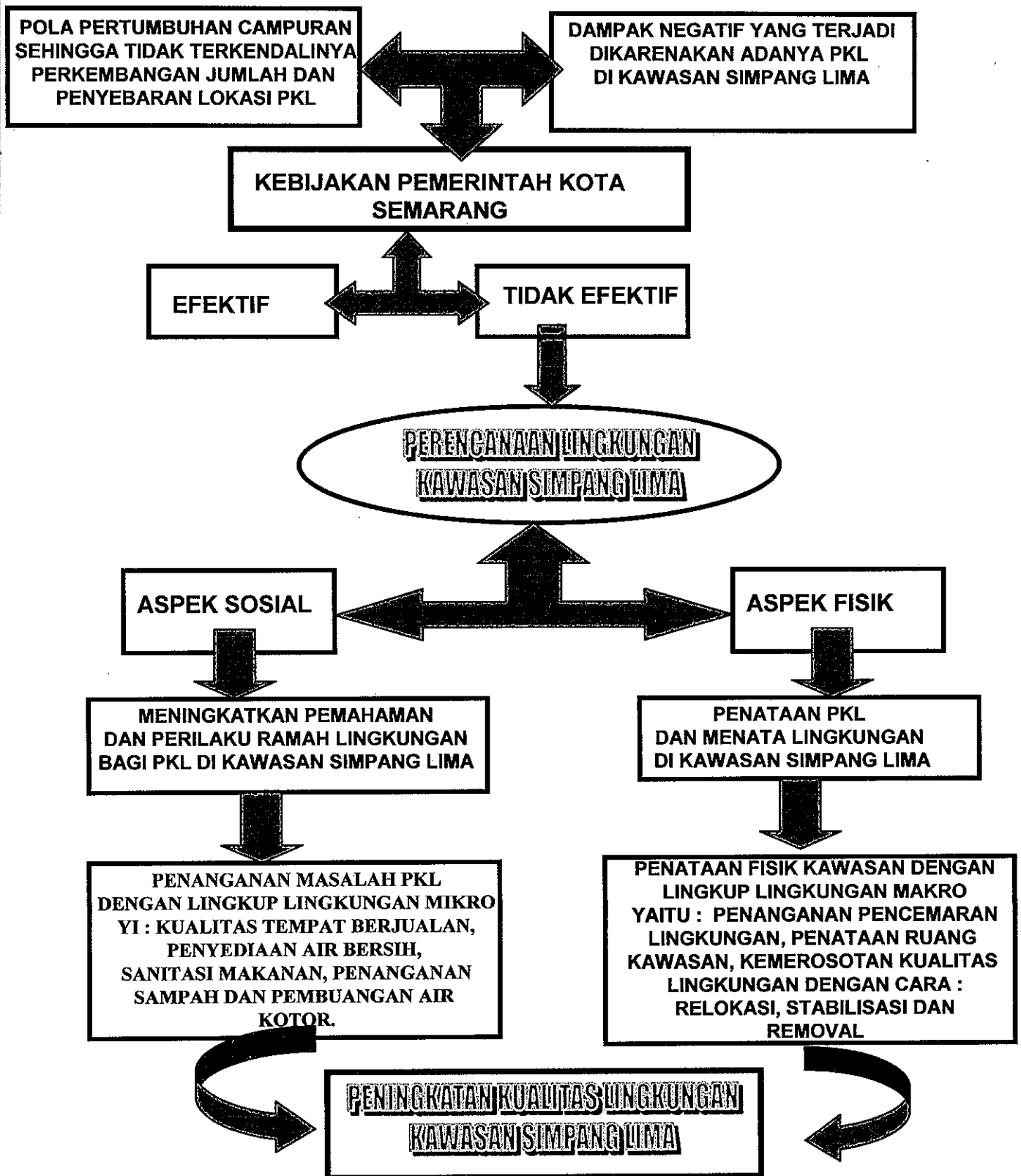
Simpang Lima.

Kawasan Simpang Lima pada dasarnya adalah ruang publik yang menguntungkan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. taman, pedestrian, lapangan, ruang publik, ruang interaksi, pusat aktivitas dan sebagainya. Karena letaknya yang strategis di pusat kota yang merupakan 5 pertemuan jalur utama , sehingga kawasan ini akan menguntungkan bila mampu mewadahi aktivitas-aktivitas warga.

Kondisi sekarang ini menunjukkan berkembangnya jumlah PKL tanpa diiringi fungsi pengelolaan yang optimal , sehingga terjadi penyimpangan fungsi dan menurunnya citra dan kualitas lingkungan kota Semarang pada umumnya dan kawasan Simpang Lima pada khususnya.

Berikut adalah alternatif model penanganan masalah PKL, tabel usulan penataan PKL guna perencanaan lingkungan di Kawasan Simpang Lima dan gambar usulan penataan fisik lingkungan pada setiap Zona.

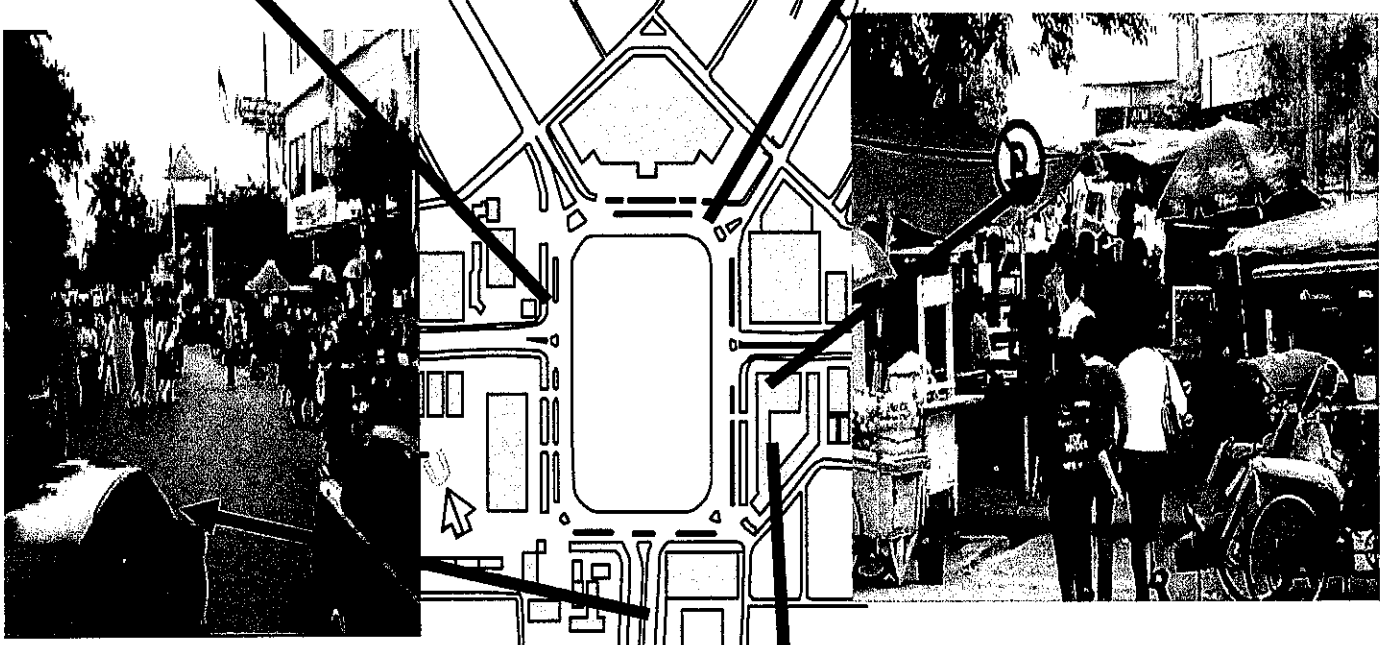
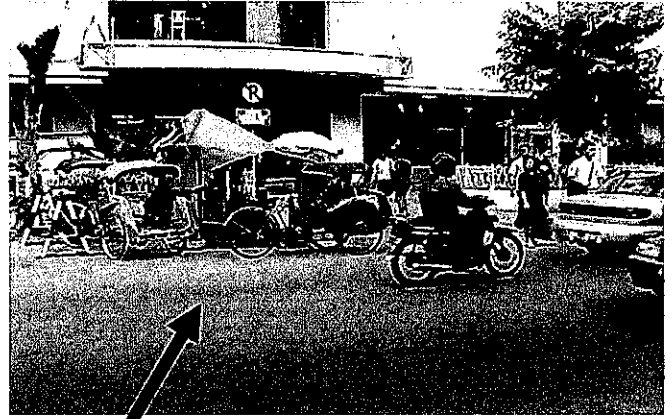
**MODEL PERENCANAAN LINGKUNGAN
UNTUK PENANGANAN MASALAH PKL
DI KAWASAN SIMPANG LIMA, SEMARANG.**



Gambar

Penurunan Kualitas lingkungan dan kualitas estetika yang diakibatkan oleh keberadaan

PKL di Kawasan Simpang Lima





MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PENELITIAN

PENGARUH PERTUMBUHAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TERHADAP PERENCANAAN
LINGKUNGAN DI KAWASAN
SIMPANG LIMA, SEMARANG

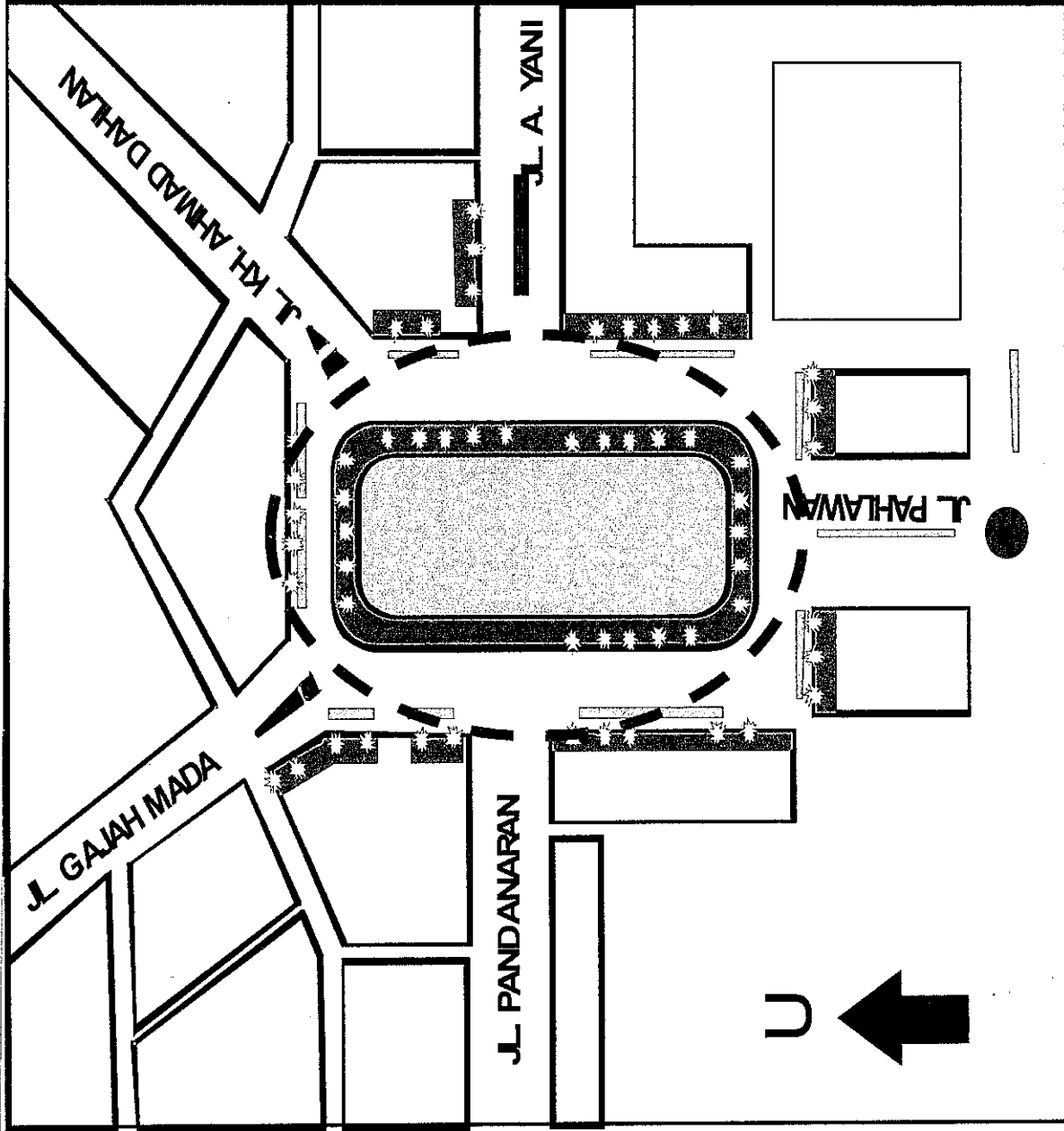
USULAN PENATAAN
FISIK LINGKUNGAN
DI ZONA I,
LAPANGAN
PANCASILA DI
KAWASAN SIMPANG
LIMA

= Area bebas PKL dan

bebas parkir

= taman

SUMBER : DATA PRIMER





MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PENELITIAN

PENGARUH PERTUMBUHAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TERHADAP PERENCANAAN
LINGKUNGAN DI KAWASAN
SIMPANG LIMA, SEMARANG

USULAN PENATAAN
FISIK LINGKUNGAN
DI ZONA II,
JL. AHMAD YANI,
KAWASAN SIMPANG
LIMA

Keterangan :



= PKL

Makanan/minuman



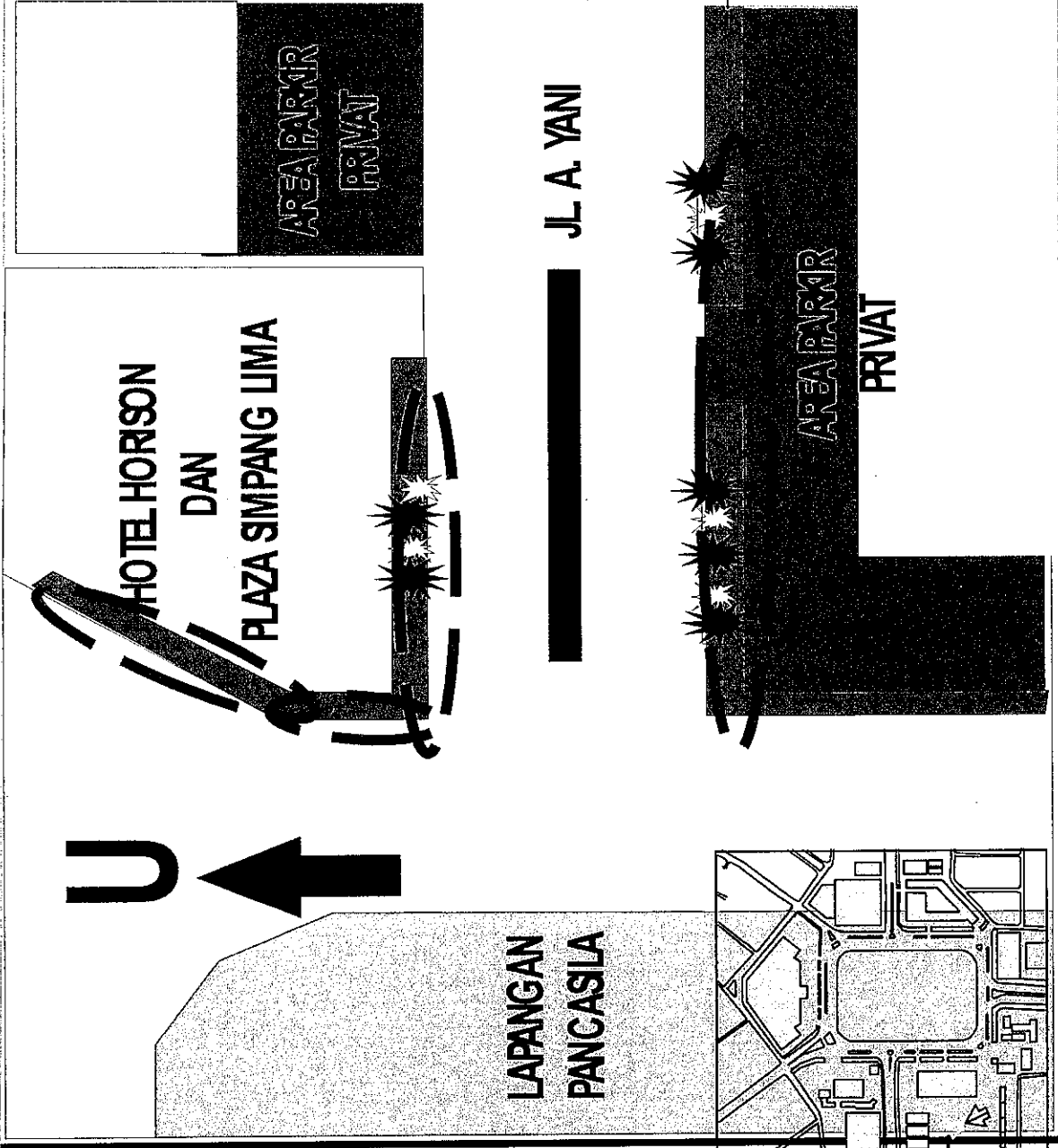
= PKL

Souvenir/kelontong



= taman

SUMBER : DATA PRIMER





MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PENELITIAN

PENGARUH PERTUMBUHAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TERHADAP PERENCANAAN
LINGKUNGAN DI KAWASAN
SIMPANG LIMA , SEMARANG

USULAN PENATAAN
FISIK LINGKUNGAN DI
ZONA III,
JL. PANDANARAN,
KAWASAN SIMPANG
LIMA

Keterangan :



= PKL



Makanan/minuman

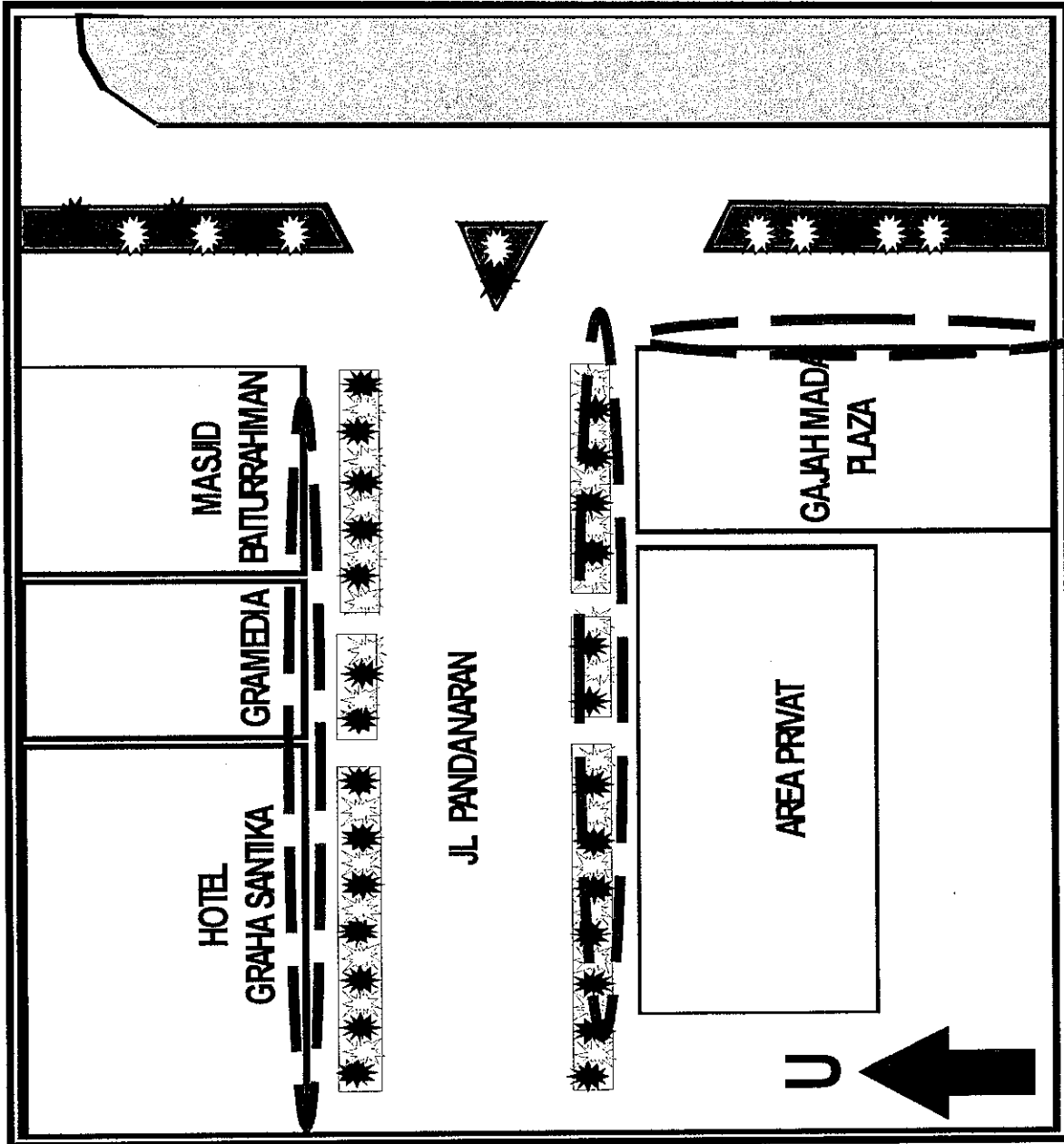
= PKL

Souvenir/kelontong



= taman

SUMBER : DATA PRIMER





MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PENELITIAN

PENGARUH PERTUMBUHAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TERHADAP PERENCANAAN
LINGKUNGAN DI KAWASAN
SIMPANG LIMA, SEMARANG

USULAN PENATAAN
FISIK LINGKUNGAN DI
ZONA IV,
JL. KH. AHMAD DAHLAN,
KAWASAN SIMPANG
LIMA

Keterangan :

= PKL

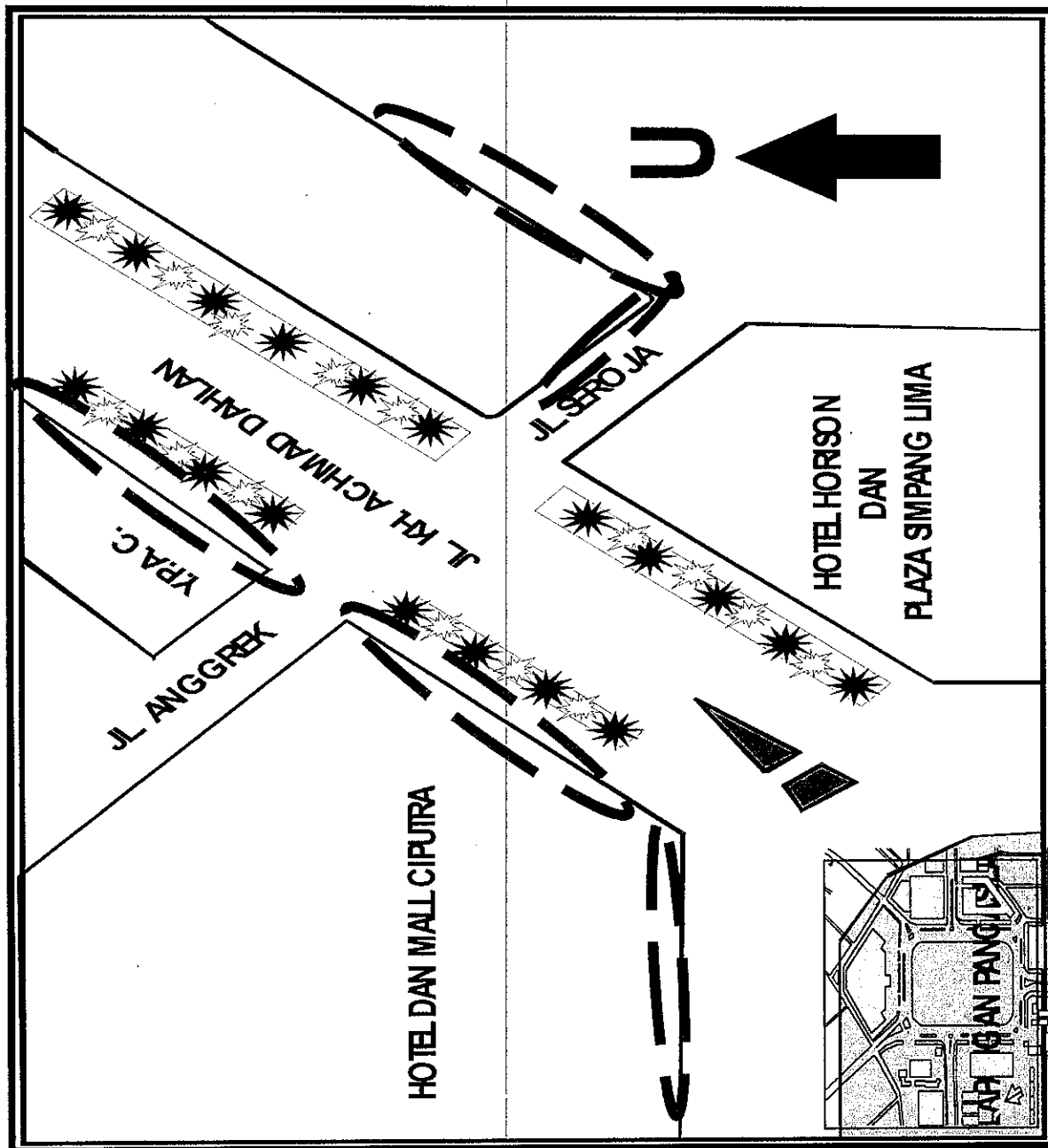
Makanan/minuman

= PKL

Souvenir/kelontong

= taman

SUMBER : DATA PRIMER





MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PENELITIAN

PENGARUH PERTUMBUHAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TERHADAP PERENCANAAN
LINGKUNGAN DI KAWASAN
SIMPANG LIMA, SEMARANG

USULAN PENATAAN
FISIK LINGKUNGAN DI
ZONA VI,
JL. PAHLAWAN,
KAWASAN SIMPANG
LIMA

Keterangan :



= PKL

Makanan/minuman



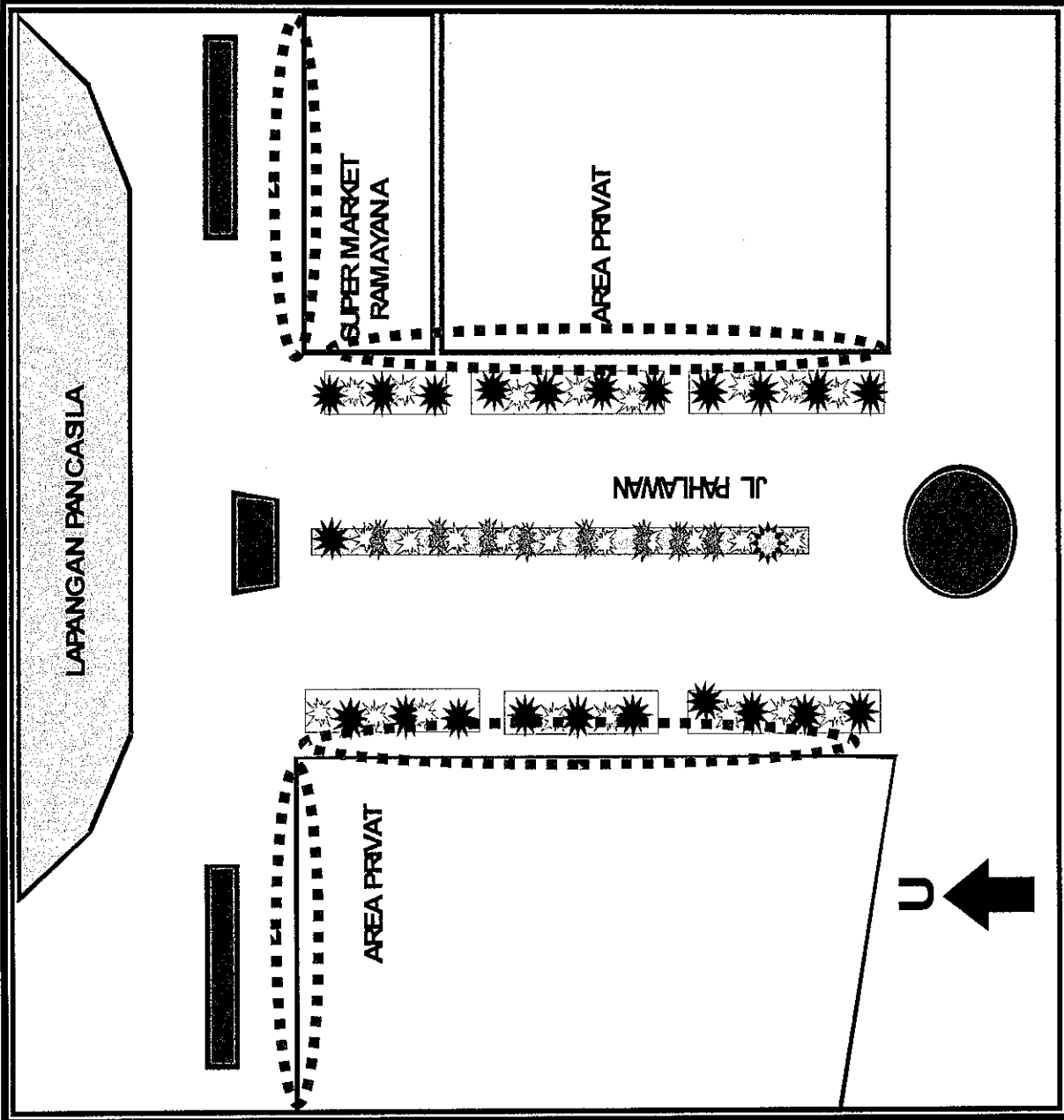
= PKL

Souvenir/kelontong



= taman

SUMBER : DATA PRIMER






MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PENELITIAN

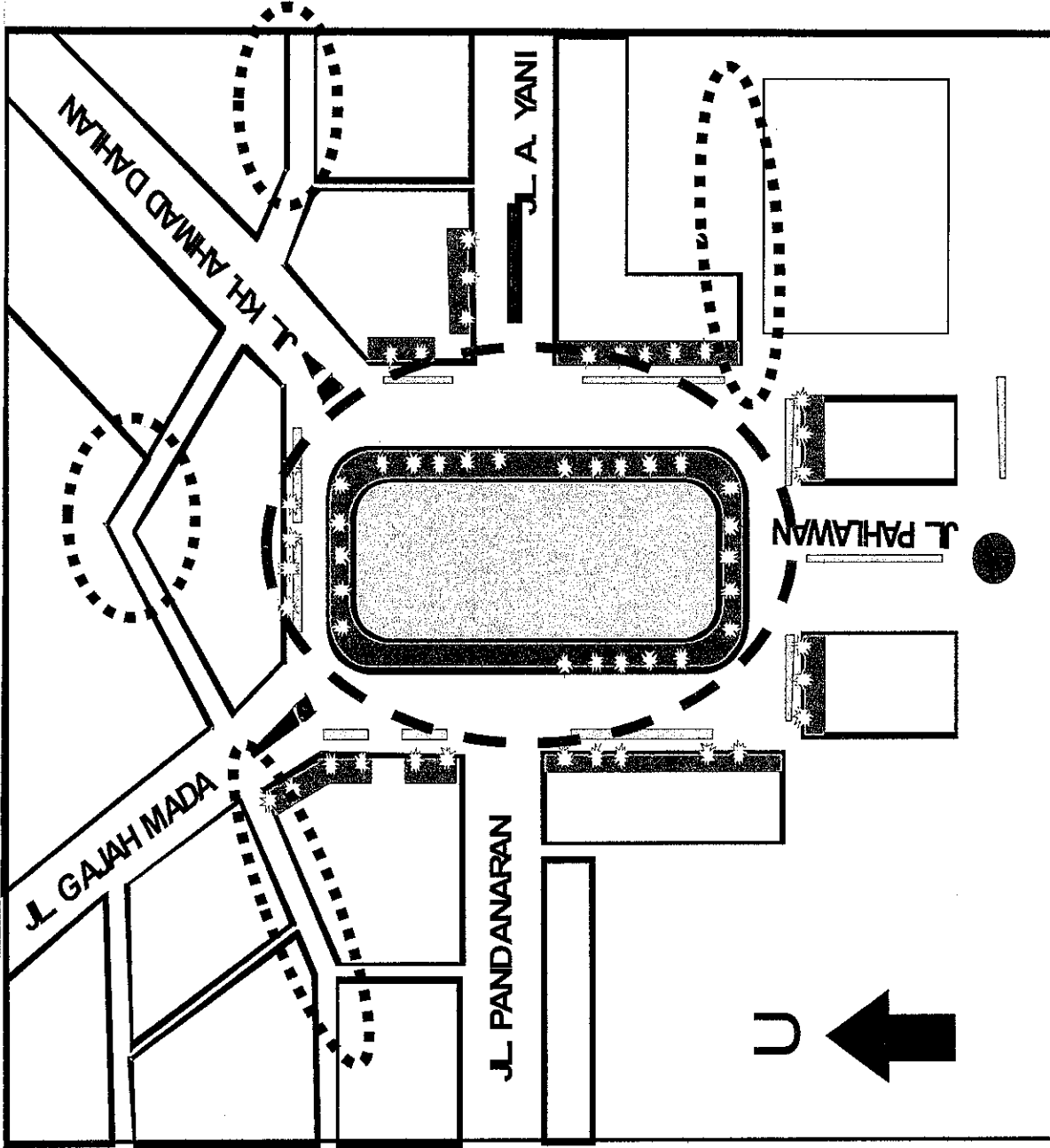
PENGARUH PERTUMBUHAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TERHADAP PERENCANAAN
LINGKUNGAN DI KAWASAN
SIMPANG LIMA, SEMARANG

USULAN LOKASI
PEMINDAHAN PKL DI
KAWASAN SIMPANG
LIMA

 = Area bebas PKL
dan parkir

 = Area lokasi pemindahan
PKL di Kawasan Simpang
Lima

SUMBER : DATA PRIMER







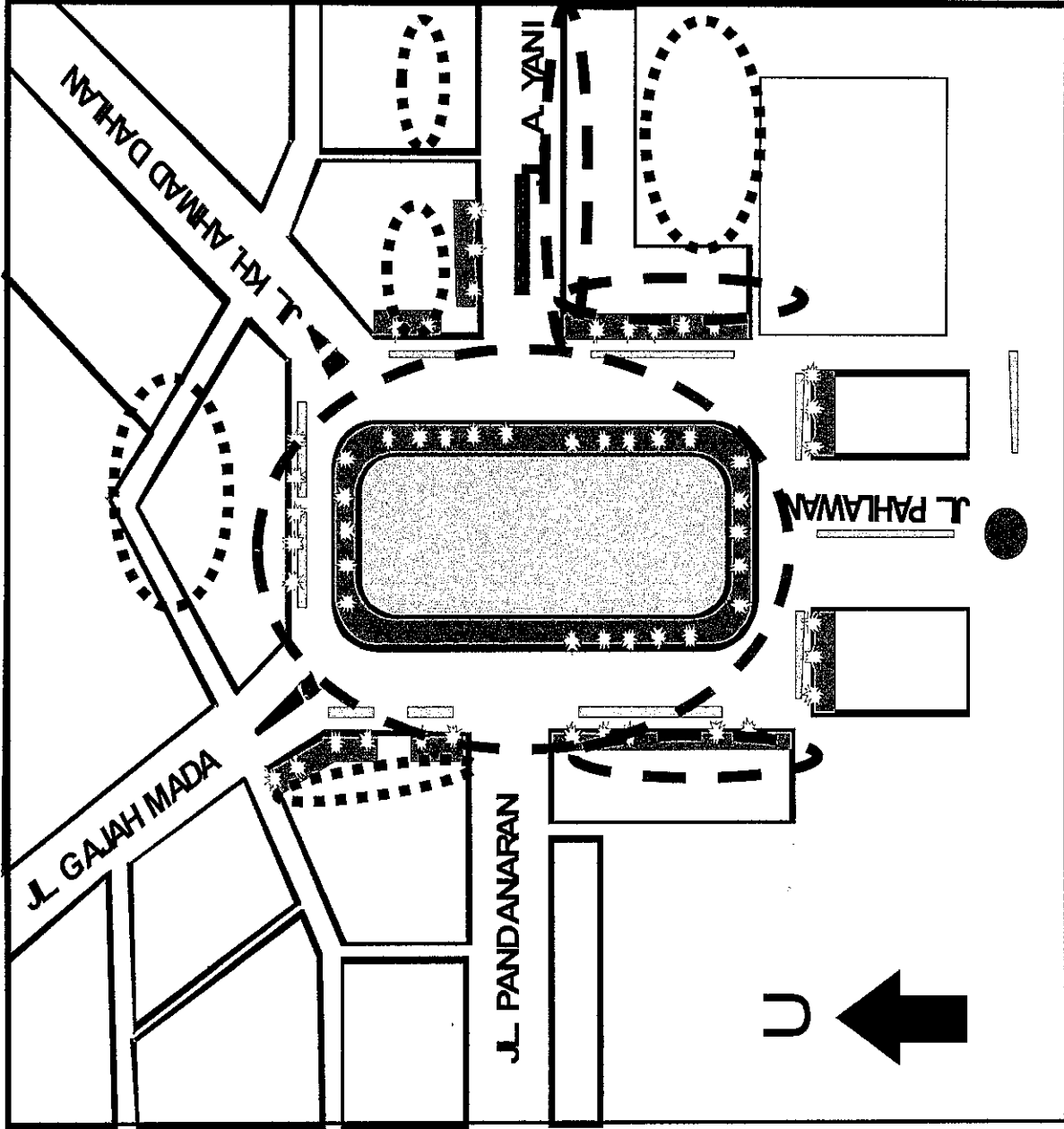
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PENELITIAN

PENGARUH PERTUMBUHAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
TERHADAP PERENCANAAN
LINGKUNGAN DI KAWASAN
SIMPANG LIMA, SEMARANG

USULAN PENATAAN
PARKIR DI
KAWASAN SIMPANG
LIMA, SEMARANG.

 = Area bebas PKL
 = USULAN KANTONG
PARKIR



DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong (WR); Mac Gee (TG); *Revolutionary Change and The Tbird World Cities : A Theory Of Urban Involution*; Journal: Civilazation, 1968.
- Agung Ridlo, Muhammad, *Kemiskinan di Perkotaan* , Penerbitan Unissula, Press,Semarang, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Amsyari, Fuad, *Dasar-dasar dan metoda Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan Nasional*, Widya Medika, Jakarta, 1995.
- Asworth, G.J. and Voodg, H. *Selling The City*. Belhaven Press. London. 1990.
- Blakely, E.J; *Planning Local Economic Developmen : Theory and Practice*; New York: Sage Publication, 1989
- Bagoes Mantra, Ida , *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Blakely, E.J., *Planning Local Economic Development*, Sage Publication, New York, 1989.
- Budihardjo, Eko ; Harjdohubojo, Sudanti, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1993.
- Darmawan, Edy, *Teori dan Implementasi Perancangan Kota*, Undip Press, Semarang, 2003.
- , *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*,Undip Press, Semarang, 2003.
- Djojodipuro, Marsudi.; *Teori Lokasi*; Lembaga Penerbit Fakultas F.Ekonomi – Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Epstein, B and Schell, E; *Marketing Geography : Problems and Prospects* ; Applied Geography 1982.
- Hadi, Sudharto P., *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjahmada University Press, 2001.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- , *Metode Penelitian Sosial : Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak*, Fisip Undip, 1997.
- Hakim , Rustam dan Utomo, Hardi, *Komponen Perancangan Arsitektur, Lansekap, Prinsip, Unsur dan Aplikasi Desain*. Burni Aksara Press, Jakarta, 2003.
- Inoguchi, Takasi, dkk, *Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*. LP3ES, Jakarta, 2003
- Isard, Walter, *Location and Space Economy*, The MIT Press, Cambridge, 1959.
- Jones, Ken and Simons, Jim, *Location, Location, Location*, Nelson , Canada, 1959
- Kodoatie, J.Robert, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur* Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2003.
- Universitas Semarang dan Pemerintah Kota Semarang , *Laporan Final, Studi Kajian Pengelolaan Kawasan Simpanq Lima*, Semarang, 2003.
- Isard, Walter, *Location and Space Economy*, The MIT Press, Cambridge, 1959.
- De Chiara, Joseph.; Koppelman, Lee., *Urban Planning and Design Criteria* , Litton Education Publishing, New York 1985.
- Haeruman, Herman (ed.); *Memelihara Momentum Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985
- International Labour Office; *World Employment Programme-GENEVA 1981; The Urban Informal Sektour in the Developing Countries: employment, poverty, and environment*, 1981
- Lynch, Kevin, *Managing Sense of the Religion*, MIT Press, Cambridge, Massachusset, USA, 1977.
- , *The Image of The City*, MIT Press, Cambridge, Massachusset, USA, 1985.
- Mac. Gee dan Yeung, *Hawkers in South Asian Cities : Planning for the Bazaar Economy* , International Development Research Centre, Ottawa, 1997.
- Mac Gee (T.G.); *Catalist or Concerns? The role of Cities in Asia; The urbanization an National Development; Edited by: Jakobson (Leo) and Prakash (Ved)*, 1967.

- Mier, R. dari Bingham, R (eds.); *Theories of Local Economic Development*, New York: Sage Publication, 1993.
- Nicholls, WH, *Industrialization, Factor Market and Agricultural Development*, Cam MIT Press, Cambridge, 1975.
- Patton, Carl V., Sawicky, David S., *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice Hall, New Jersey, 1986.
- Saaty, Thomas.; *Decision Making for Leaders, The Analytical Hierarchy Process for Decision Making In A Complex Word*; University of Pittsburgh, Pittsburgh, 1988.
- , *Decision Making : The Analytical Hierarchy Process, Planning, Priority Setting, Resource Allocation*; University of Pittsburgh, Pittsburgh, 1988.
- Salih, Kamal; *Urban Dilemmas In The Southeast Asia*, Singapore journal of Tropical Geography. Vol.3 N6v.2 Dec 1982.
- Shirvani, Hamid.; *The Urban Design Process*; Van Nostrand Reinhold Company Inc, Melbourn, 1985.
- Stohr, W.B. dan Taylor, D.R.F; *Development from Above or Below?*. New York: John Wiley and Sons, 198
- Stabler, Jack C; *Trade Center Evolufion in The Great Plains*; Journal of Regional Science, 1987,
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, CV Alvabeta, Bandung, 2000.
- Suparmoko ; Maria R, *Ekonomika Lingkungan* , BPEF, Yogyakarta, 2000.
- Tietz, Michael B; *Location Strategies for Competitive System*; Journal of Regional Science; 1968.
- Tokman (Victor); *Infioral-Formal Sector Inter. Relationship; An Exploration Their Nature* CEPAL Review, First half of 1978, pp98-134
- West, D.S. and Von Hohenbalken. B; *Spatial Predation in Canadian Retail Oligopoly*, Jounal of Regional Science, 1984.
- Warpani, Suwardjoko.; *Merencanakan Sistem Perangkulan*; ITB Press, Bandung, 1990

Weaver, Clyde; *Regional Development and Local Community : Planning, Politics, and Social Context*, New York: Sage Publications, 1987.

Weeks (J.); *Policies for Expanding Employment In The Informal Urban Sector Of Development Countries; L.O. Review* Janv 1975. pp I - 13.

Zahnd , Markus, *Perancangan Kota Secara Terpadu* , Yayasan Sugiyopranoto, Semarang, 2003

Zoeraini, Djamal Irwan, *Prinsip-prinsip Ekologi dan organisasi Ekosistern Komunitas dan Lingkungan*, Bumi Aksara Press, Jakarta, 1992.

C PERATURAN DAN PERUNDANGAN

-----, *Semarang Dalam Angka 2001, Kantor Statistik Kota Semarang, 2001.*

----- *Rencana Induk Kota Semarang 1975 - 2000*, Bappeda Kodya Dati II Semarang.

----- *Rencana Teknik Tata Ruang Kota BWK Pusat Kota 1992-2002*, Bappeda Kotamadya Dati II Semarang

-----, *Perubahan Perda tentang Rencana Kota Semarang, Tahun 1975 sampai Tahun 2000*, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Semarang , 1990

-----, *Perda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Semarang*, Pemerintah Kota Semarang, 2000.

-----, *Studi Pengelolaan Kawasan Simpang Lima Kotamadya Tingkat II Semarang*, Semarang, 1992